

e-ISSN 2798-8961



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

HITA AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOLUME 5 NOMOR 1 TAHUN 2024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI BISNIS
DAN PARIWISATA**

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

DAFTAR ISI

PENGARUH FAKTOR FINANSIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA

Ni Kadek Ayu Astra Antini (1-9)

PENGARUH FUNGSI BADAN PENGAWAS, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN PAYANGAN

Ni Komang Devi Andriani, Ni Wayan Yuniasih, I Wayan Budi Satriya (10-20)

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, *LOVE OF MONEY*, PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA KSU SE-KECAMATAN SUKAWATI

Ni Putu Diah Savitri, Ni Wayan Alit Erlina Wati, I Made Endra Lesmana Putra (21-31)

PERILAKU TIDAK ETIS, ASIMETRI INFORMASI DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP FRAUD AKUNTANSI PADA LPD SE-KECAMATAN MENGWI

Ni Made Megi Dwi Lestari, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Ni Ketut Muliati (32-43)

PENGARUH KEPUASAN KOMPENSASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP *FRAUD* PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSAT SE-KOTA DENPASAR

Ni Putu Novi Damayanti Putri, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Cokorda Gde Bayu Putra (44-55)

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN BANJARANGKAN KLUNGKUNG

Ida Bagus Gede Putra Paketan Arimbawa, Putu Cita Ayu, Putu Nuniek Hutnaleontina (56-68)

PENGARUH KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN *BYSTANDER EFFECT* TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA LPD SE-KECAMATAN DAWAN KLUNGKUNG

I Gusti Ngurah Satia Wiguna, Ni Wayan Alit Erlina Wati, Kadek Dewi Padnyawati (69-79)

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI DAN KOMITMEN TERHADAP KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KECAMATAN SIDEMEN

Ni Made Sri Ustini (80-89)

PENGARUH SOSIALISASI SAK EMKM, UMUR USAHA, DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP IMPLEMENTASI SAK EMKM PADA UMKM DI KABUPATEN BADUNG

Dewa Ayu Agung Trisna Dewi, Ni Komang Sumadi (90-100)

PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI DAN LAMA USAHA TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM SEKTOR PENGRAJIN KAIN ENDEK DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Wiwik Priswiyanti (101-110)

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN MENGWI

Rai Ayuni Sayang Pridari (111-120)

ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ-45 DI BEI PERIODE 2019-2021

Ni Putu Pitri Widnyani, Ni Putu Ayu Kusumawati, Putu Nuniek Hutnaleontina (121-132)

NILAI KEARIFAN LOKAL BALI DI BALIK MOTIF PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SADGUNA)

Ni Made Pradnyasari, Cokorda Gde Bayu Putra, Ni Wayan Alit Erlinawati (133-140)

PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, TRI HITA KARANA DAN KARMA PHALA TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA LPD SE-KECAMATAN UBUD

Ni Kadek Anis Santika Dewi, Ni Komang Sumadi, Ni Putu Ayu Kusumawati (141-150)

PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP *AUDIT JUDGEMENT* DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PROVINSI BALI

Ni Made Indah Suhesti, Ni Putu Ayu Kusumawati, Ni Made Wisni Arie Pramuki (151-161)

PENGARUH *FIRM SIZE*, *PROFITABILITAS*, KOMITE AUDIT DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PASAR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2021)

Kadek Sukma Intan Cahyani, Ni Wayan Yuniasih, Rai Dwi Andayani W. (162-175)

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR KULINER SE-KOTA DENPASAR
Ni Kadek Dwi Astarinaya, Kadek Dewi Padnyawati, Ni Wayan Alit Erlinawati (176-182)

PENGARUH PERSEPSI PELAKU UKM TENTANG AKUNTANSI DAN PENGETAHUAN
AKUNTANSI TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UKM DI
KABUPATEN TABANAN
Ni Putu Sukmawati Merta Dewi, I Putu Deddy Samtika Putra (183-194)

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SE-
KABUPATEN BANGLI SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) MENGGUNAKAN METODE
CAPITAL ASSETS MANagements EARNINGS LIQUIDITY (CAMEL)
Putu Risa Agustina (195-204)

PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DI BIDAANG AKUNTANSI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
I Gede Eka Dharma Wicaksana, Ni Wayan Yuniasih, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (205-218)

PENGARUH KONSEP TRI KAYA PARISUDHA, BUDAYA ORGANISASI DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*)
PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA SE-KECAMATAN KUTA SELATAN
Ni Kadek Ari Averina, Ni Komang Sumadi, I Putu Deddy Samtika Putra (219-230)

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA SELUMBUNG
KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM
Ni Kadek Ayu Ratih Pratiwi, Ni Wayan Yuniasih, I Putu Fery Karyada (231-242)

PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA
DESA, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS: PADA KANTOR DESA SE-
KECAMATAN NUSA PENIDA)
Dewa Ayu Nita Melinda Sari, I Wayan Suidiana, Putu Cita Ayu (243-256)

PENGARUH *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *QRIS* DAN LITERASI KEUANGAN
TERHADAP KINERJA UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN
KARANGASEM
Arya Agus Indra Dwi Parawangsa, Ni Putu Ayu Kusumawati, Ni Ketut Muliati (257-268)

PENGARUH PERSEPSI DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DI
KOTA DENPASAR
I Putu Yoga Pranata, Putu Cita Ayu, Rai Dwi Andayani W. (269-282)

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) YANG TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19* DI KOTA DENPASAR

I Made Agus Armawan, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Ni Wayan Yuniasih (283-295)

PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*) AKUNTANSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN MENGWI

I Gusti Putu Tariani, Kadek Dewi Padnyawati, Putu Nuniek Hutnaleontina (296-304)

PENGARUH PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN *LOCUS OF CONTROL* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA SE-KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR)

Ni Kadek Eka Putri, Ni Ketut Muliati, Ni Putu Yeni Yuliantari (305-315)

ANALISIS PERBANDINGAN METODE KONVENSIONAL DENGAN METODE *ACTIVITY BASED COSTING* DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA CV. NATAOKA BALI

Ni Putu Yeni Handayani, I Made Endra Lesmana Putra (316-326)

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Ni Made Merry Sari Karyani, Ni Putu Ayu Kusumawati, Rai Dwi Andayani W. (327-337)

sangat didasari bermacam faktor. Faktor-faktor yang di maksud yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Jika keuntungan tinggi yang dicapai industri, maka tagihan pajak yang wajib dilunasi juga tinggi. Dengan tujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal perusahaan menggunakan pendanaan dari luar (hutang). Ukuran perusahaan juga mampu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar pajak (Moeljono, 2020). Penelitian dari Oktamawati (2017) dan Stawati (2020) menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berkaitan positif didalam tindakan menghindari pajak. Namun dalam penelitian Aulia dan Mahpudin (2020) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan menghindari perpajakan. Penelitian dari Novriyantia (2020), Puspita, dkk (2017) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Prayogo (2015) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Pengaruh Faktor Finansial Terhadap Penghindaran Pajak Saat Pandemi COVID-19 Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia”.

KAJIAN PUSTAKA

Bagi Jensen & Meckling (1976) teori keagenan dijelaskan sebagai status diantara prinsipal dan agen. Perselisihan pola diantara kelompok pemungut pajak dan industri menjadikan perlawanan wajib pajak yaitu manajemen industri untuk menjalaksana penghindaran pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Industri mengambil peluang itu dikarenakan mempunyai bukti yang tidak sedikit, yang pada dasarnya tetpa patuh pada undang-undang perpajakan yang diterapkan. Industri berkeinginan mengakali tagihan pajaknya sesuai keinginannya, maka tagihan pajak tersebut menurunkan keuntungan perusahaan dan bukan menurunkan pembayaran kinerja industri.

Menurut Ngadiman *et al.*, (2014) dalam penelitian Prasetyo (2017) menyatakan pengalihan pajak merupakan cara untuk diterapkan oleh wajib pajak demi menurunkan tagihan pajak yang wajib dilunasi dengan memakai kekurangan dari sebuah aturan undang-undang. ETR atau dengan ata lainnya *Effective Tax Rate* merupakan bea pajak sesungguhnya yang harus dilunasi oleh penanggung pajak berbanding pada penghasilan yang diperoleh oleh penanggung pajak.

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan industri barang konsumsi yang terdata didalam Bursa Efek Indonesia kurun waktu 2018-2020 yang didapat pada www.idx.co.id. Dalam penentuan sampel pengamatan, dilakukan pembatasan sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Uraian	Total
1	Menjadi perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020	69
2	Perusahaan tidak untung kurun waktu tahun 2018-2020	(3)
	Sampel Penelitian (66 x 3 tahun)	198

Sumber: data diolah (2023)

Variabel Dependen atau Variabel Terikat :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen atau Variabel Bebas :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dari pengujian statistik deskriptif, dapat diuraikan menjadi variabel X1 (ROA) didapat nilai terkecil 0,000 nilai terbesar 0,967 dengan rata-rata 0,08604 standard deviasi 0,106873. Untuk variabel X2 (DER) didapat nilai terkecil 0,2560 nilai terbesar 6,218 dengan rata-rata 0,90375 standard deviasi 0,984683. Untuk variabel X3 (SIZE) didapat nilai terkecil 21,733 nilai terbesar 33,494 dengan rata-rata 28,47437 standard deviasi 1,719894

Hasil uji normalitas didapat nilai *Unstandardized Residual* senilai 0,115 > 0,05 mengartikan data dipergunakan sebagai pengamatan sudah normal. Uji multikolinearitas

Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1: 38-46. (ISSN: 1410-9875).

Putri, V. R., dan Putra, B. I. 2017. Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19, 1–11.

Reinaldo, R. 2017. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, Vol. 4, No.1: 45–59.

Sandy, S., dan Lukviarman, N. 2015. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.

Siregar, B. P. 2020. Kekurangan Penerimaan Pajak Hingga Akhir Tahun Hampir Rp. 388 T. <https://www.wartaekonomi.co.id/read287037/kekurangan-penerimaan-pajak-hingga-akhir-tahun-hampirrp388-triliun>.

Stawati, Vicka. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, Vol. 6, No. 2: 147 – 157. (ISSN 2503-0337 (Online)).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dimana semua variabel memiliki nilai koefisien korelasi berada di atas 0,30 dan koefisien alpha (α) lebih besar dari 0,6 dengan demikian semua instrumen tersebut adalah valid dan reliabel, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Normalitas (sig. 2 tailed)	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas (sig)
		Tolerance	VIF	
Fungsi Badan Pengawas	0.200 ^c			
		0.155	6.458	0.219
Pemanfaatan Teknologi Informasi		0.111	9.028	0.290
Tingkat Pemahaman Akuntansi		0.111	9.044	0.270

Sumber: Data diolah, 2023

Pada hasil uji statistik pada tabel 4.3 terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas melihat nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan uji multikolinearitas pada Tabel 4.3, terlihat nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 10% ($X_1=0.155$; $X_2=0.111$; $X_3=0.111$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ($X_1=6.458$; $X_2=9.028$; $X_3=9.044$) yang berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai *absolut residual* dengan variabel bebas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Pada hasil uji statistik pada tabel 4.3 terlihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil Uji hipotesis (Uji t) pada tabel 4.6, ditemukan hasil bahwa:

Variabel Fungsi Badan Pengawas memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,774 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 dibawah nilai alpha (α) 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Fungsi Badan Pengawas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian alternative (H1) diterima.

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,757 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dibawah nilai alpha (α) 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan, dengan demikian alternative (H2) diterima.

Variabel Tingkat Pemahaman Akuntansi memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,539 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dibawah nilai alpha (α) 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian alternative (H3) diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

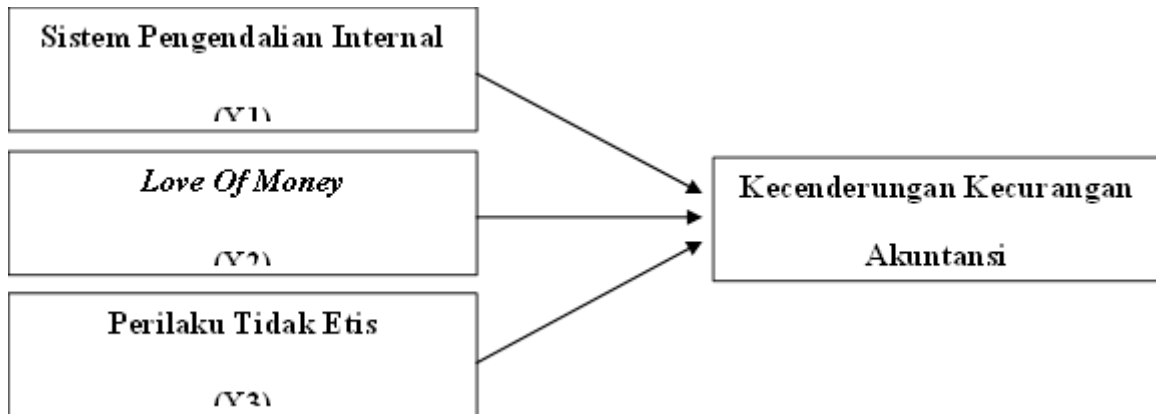
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1). Fungsi Badan Pengawas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin baik berjalannya fungsi badan pengawas akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2). Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa teknolog informasi yang dimanfaatkan dengan baik akan meningkatkan kualitas dari sebuah laporan keuangan, (3). Tingkat Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat disarankan beberapa hal yaitu Bagi seluruh LPD Se-Kecamatan Payangan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Untuk membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan lpd dapat memberikan pelatihan bersertifikasi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan menguasai pemahaman akuntansi sehingga badan pengawas atau karyawan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi serta contoh dalam menelaah studi kasus pada mata kuliah tertentu serta penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan selain dari tiga variabel bebas yang diteliti saat

ini seperti kompetensi pegawai dan gaya kepemimpinan sehingga dihasilkan data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi , Fungsi Badan Pengawas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada LPD SeKecamatan Gianyar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 432–447.
- Anggreni, N. M. (2021). Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se- Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 152–164. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2003>
- Astrayani. (2017). *Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.*
- Bastian. (2003). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat. Pengembangan Akuntansi. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada. Brotodihardjo, R. Santoso.*
- Bhegawati. (2021). Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Lpd Di Kota Denpasar. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4062>
- Della. (2002). Jurnal Ekonomi FE UNRI. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 166–176. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/5826/5380>
- Desak. (2022). Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desadi Kecamatan Blahbatuh. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 180–189.
- Dewishabrina, A. I., Sugiartono, E., & Ristianingsih, I. (2021). Determinan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(2), 115–123. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i2.2776>
- Dewi, I. P. (2019). Pengaruh Sisten Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi SDM terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. (Studi Empiris Koperasi di Kabupaten Buleleng). Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dharmika. (2021). Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Lpd Di Kota Denpasar. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4062>
- fajarini. (2014). *Menguasai Akuntansi Dasar. Jakarta: Sealova Media.*
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.*
- Herman. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 1(2), 76–87. <https://doi.org/10.51182/jeamm.v1i2.1850>
- Janson. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*”, *Journal of Finance Economic* 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Kartikahadi., D. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAKBerbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.*
- novi. (2021). *17 LPD di gianyar macet.* <https://www.nusabali.com/berita/96155/17-lpd-di-gianyar-macet>
- Nurjaya. (2011). *Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja. Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Hazara Cipta Pesona. Jurnal Ilmiah.*



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Total ada 237 orang yang disurvei dari 45 Koperasi Multi Usaha di Kecamatan Sukawati. Purposive sampling digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini. Purposive sampling yang dimaksud di sini adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Metode berikut digunakan untuk menganalisis data untuk penelitian ini:

1. Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan Uji Validitas (Ghozali, 2016). SPSS digunakan dalam analisis validitas ini. Korelasi Pearson dihitung dengan membandingkan skor masing-masing pertanyaan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi yang kuat di antara keduanya. Jika total nilai korelasi Pearson setiap item pertanyaan lebih besar dari 0,30, maka item tersebut dapat dinyatakan valid dan digunakan dalam analisis kuesioner.
2. Uji reliabilitas merupakan metode untuk mengukur keakuratan suatu kuesioner yang digunakan untuk menilai suatu konstruk atau variabel. Jika jawaban responden terhadap suatu kuesioner tetap stabil dari waktu ke waktu, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi (Ghozali, 2016). Alfa Cronbach digunakan untuk menentukan stabilitas suatu variabel dalam penelitian ini, dan nilai 0,70 atau lebih tinggi menunjukkan keandalan.
3. Uji normalitas menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Uji homogenitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilakukan dengan satu kumpulan data. Jika probabilitas

signifikansi suatu variabel dalam uji satu sampel Kolmogrof-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

4. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dengan menghitung variance inflasi fatcor (VIF) atau nilai toleransi. Model bebas dari permasalahan multikolinearitas jika nilai toleransinya lebih besar dari 10% atau VIFnya kurang dari 10 (Ghozali, 2016:107).
5. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians model regresi tidak sama antar observasi. Heteroskedastisitas statistik tidak ada dalam model regresi jika nilai absolut dari residu statistik mempunyai nilai signifikansi variabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2016:134).
6. Analisis regresi berganda digunakan untuk pengujian hipotesis karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda yang digunakan menggunakan rumus: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$
7. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen diuji dengan menggunakan prosedur statistik yang disebut uji T, yang dilakukan sebagai uji hipotesis ketujuh dan terakhir. Tingkat signifikansi 5% digunakan untuk membandingkan hasil pengujian dengan tingkat signifikansi (Ghozali, 2016:99).
8. Untuk menguji pengaruh bersama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji signifikansi secara simultan (uji statistik F). Jika F hitung lebih besar dari 4, dengan probabilitas $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memang berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:99).
9. Sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimaksud adalah koefisien determinasi (Adjusted R Square). Mendekati 1, garis regresi yang digunakan menjelaskan seluruh varians pada Y. Nilai R Square berkisar antara 0 hingga 1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seluruh variabel yang diuji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian mempunyai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 dan nilai korelasi lebih besar dari 0,30 maka hal tersebut menunjukkan valid dan reliabel. Asim. tanda tangan. (2-tailed) nilai sebesar 0,108 menunjukkan bahwa data penelitian mengikuti distribusi normal yang ditentukan melalui uji normalitas. Nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 diamati untuk konsep

pengendalian internal, moralitas individu, dan kepatuhan terhadap aturan akuntansi. Akibatnya, gagasan Sistem Pengendalian Internal, Cinta Uang, Perilaku Tidak Etis, dan Tren Penipuan Akuntansi tidak saling bersinggungan satu sama lain. Setiap model mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari 5% (atau 0,05) pada uji heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Uji Analisis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.822	.353		2.328	.021
Sistem Pengendalian Internal	-.108	.058	-.199	-2.870	.003
<i>Love Of Money</i>	.681	.062	1.160	10.945	.000
Perilaku Tidak Etik	.314	.040	.227	4.377	.010
R					.981
<i>R Square</i>					.962
<i>Adjusted R Square</i>					.961
Uji F					310.006
Sig. Model					.000

Sumber: Data diolah, 2023

Persamaan Regresi linear berganda: $Y = 0,822 - 0,108X_1 + 0,681X_2 + 0,314X_3 + e$

Koefisien determinasi setelah disesuaikan dengan variabel yang mungkin adalah 0,961% (R Squared). Sistem Pengendalian Internal, Keinginan untuk Mendapatkan Keuntungan Finansial, dan Tindakan Tidak Etis semuanya berperan dalam kemungkinan terjadinya Penipuan akuntansi. Sisanya sebesar 3,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Fhitung sebesar 31,006 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sesuai hasil pengujian. Dapat kita simpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, atau gunakan model regresi untuk melakukan prediksi terhadap variabel dependen, karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan kepraktisan model yang digunakan dalam penyelidikan ini.

Analisis menunjukkan terdapat hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara variabel Sistem Pengendalian Intern dengan Tendensi Fraud Akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -2,870 pada tingkat signifikansi 0,003.” Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi menurun seiring dengan kualitas sistem pengendalian internal. Sistem

Perilaku Tidak Etis, Asimetri Informasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Akuntansi Pada LPD Se-Kecamatan Mengwi

**Ni Made Megi Dwi Lestari⁽¹⁾
 Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
 Ni Ketut Muliati⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jln Sanggalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: Mademegi6@gmail.com

ABSTRACT

LPD accounting fraud can disrupt their financial and business operations and cause harm to clients, stakeholders and the local community. The purpose of this study was to analyze the impact of unethical conduct, information asymmetry, and accounting compliance on trends in accounting fraud in Mengwi District LPD. The study included her 152 respondents who were selected using targeted random sampling and whose data were collected through questionnaires. Data analysis includes hypothesis testing using multiple regression analysis and t-test. The results show that unethical behavior and information asymmetry have a significant and positive impact on accounting fraud trends, while compliance with accounting rules has a significant and negative impact on accounting fraud trends. The report recommends improving internal controls to prevent accounting fraud as early as possible.

Keywords: *Unethical behavior, information asymmetry, accounting rule compliance, accounting fraud tendency*

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melukiskan suatu badan menguntungkan yang dipunyai oleh dusun adat ataupun pakraman, yang beranjak ataupun beranjak di aspek perkreditan serta tidak cuma beranjak di aspek ekonomi ataupun sosial ekonomi, namun mempunyai tujuan yang amat berarti ialah: mengenai mengiklankan proteksi kehidupan adat. LPD tidak hanya bermanfaat sebagai lembaga keuangan yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga menjadi solusi atas terbatasnya ketersediaan pembiayaan bagi warga desa. Namun, mengingat pesatnya perkembangan LPD, terdapat permasalahan terkait penyalahgunaan anggaran pengguna (Nitimiani & Suardika, 2020).

Aksi penyimpangan ini merupakan salah satu aksi kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi merupakan wujud penipuan yang disengaja yang berakibat terjadinya kerugian tanpa diketahui oleh terdakwa dan membayar keuntungan kepada pelaku. Kecurangan akuntansi disebabkan oleh sistem regulasi dan kontrol yang tidak memadai di industri. Selingkuh biasanya

Menurut (Patabang *et al.*, 2021) ketaatan ketentuan akuntansi merupakan sesuatu informasi finansial diklaim mematuhi ketentuan akuntansi bila mempraktikkan kaidah-kaidah maupun ketentuan yang tertuang dalam standar akuntansi. Ketaatan ketentuan akuntansi dapat dibilang seluruh peranan dalam badan buat penuh seluruh ketaatan ketentuan akuntansi dalam melakukan pengurusan finansial dalam pembuatan informasi finansial serta informasi finansial yang diperoleh efisien, andal dan cermat datanya. Kekalahan kategorisasi informasi finansial yang diakibatkan sebab ketidaktaatan pada ketentuan akuntansi, hendak memunculkan kecurangan industri yang tidak bisa dideteksi. Riset yang dicoba oleh (Batkunde & Dewi, 2022), (I Putu & Ayu, 2021) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi ber negatif dan signifikan terhadap Fraud Akuntansi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai *fraud* dengan judul “ Perilaku Tidak Etis, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Akuntansi Pada LPD Se-Kecamatan Mengwi”.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut (Batkunde & Dewi, 2022) filosofi atribusi ini menarangkan kalau kala orang mencermati sikap seorang, orang itu berusaha memastikan apakah sikap itu diakibatkan dengan cara dalam ataupun eksternal. Filosofi ini pula menarangkan kalau ada sikap yang berkaitan dengan tindakan serta karakter orang (Schuchter & Levi, 2016). Filosofi atribusi menekuni cara gimana seorang menafsirkan sesuatu insiden, alibi, ataupun karena perilakunya yang dii oleh daya dalam serta eksternal yang hendak memantulkan sikap kepemimpinan seorang itu. Filosofi atribusi menarangkan aksi seseorang buat bersikap yang di memi oleh aspek eksternal serta pula internalnya. Kecondongan seorang buat melaksanakan kecurangan akuntansi bisa diakibatkan oleh aspek eksternal ialah asimetri data serta aspek dalam ialah perilaku serta pula ketaatan orang kepada ketentuan yang terdapat dalam perihal ini ketaatan ketentuan akuntansi.

Menurut (Egita, E., & Magfiroh, 2018) *fraud* ialah aksi tidak jujur yang dicoba dengan bermacam metode tipu serta bertabiat membodohi dan kerap tidak diketahui oleh korban yang dibebani. Fraud merupakan aksi yang dicoba dengan cara tipu serta mempunyai watak membodohi, tetapi pihak yang dibebani kerap tidak mengetahui sementara itu aksi itu amat mudarat. Fraud ialah aksi melawan hukum yang di lakukakan dengan cara terencana dengan tujuan khusus semacam akal busuk, membagikan informasi yang galat ataupun wujud aksi lain yang di jalani oleh pihak khusus bagus dalam badan ataupun yang dari luar badan (Egita, 2020).

Kecondongan kecurangan akuntansi merujuk pada kecurangan di aspek finansial, penyalahgunaan peninggalan ataupun sikap bawah tangan yang melanggar keyakinan. Kecondongan kecurangan akuntansi sudah menghirup atensi khalayak serta alat dengan cara besar di Indonesia serta bumi. Kecondongan kecurangan akuntansi didefinisikan selaku sikap yang disengaja, pembohongan, penyembunyian serta kamuflase dalam penyajian informasi finansial serta pengurusan peninggalan badan buat menggapai tujuan mencari profit untuk diri sendiri serta menghasilkan pihak lain selaku korban (Putri & W., 2018). Kecurangan akuntansi ialah dengan terencana melenyapkan jumlah informasi finansial buat membodohi konsumen informasi finansial, pengasingan asset yang tidak pas yang memunculkan kehilangan (Laoli, 2022).

Perilaku merupakan sikap yang menyalahgunakan peran, sikap yang menyalahgunakan kewenangan, sikap yang menyalahgunakan pangkal energi badan, dan sikap yang tidak melakukan apa-apa (Saraswati & Purnamawati, 2022). Perilaku merupakan sikap yang menyimpang dari kewajiban utama ataupun tujuan penting yang sudah disetujui. Perilaku sepatutnya tidak dapat diperoleh dengan cara akhlak sebab menyebabkan ancaman untuk orang lain serta area (Kalau & Leksair, 2020).

Menurut (Putri & W., 2018) asimetri data ialah suatu kondisi dimana administrator memiliki akses data atas peluang industri yang tidak dipunyai oleh pihak luar industri. (I Putu & Ayu, 2021) Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak industri yang mengidentifikasi informasi lebih baik daripada pihak di luar industri. (*stakeholder*).

Ketaatan ketentuan akuntansi ialah peranan dalam badan, sebab bila informasi finansial yang disusun tidak menjajaki ketentuan akuntansi hingga bisa memunculkan kesempatan terbentuknya perilaku serta kecurangan akuntansi (Laoli, 2022). Menurut (Dasuki & Yudawati, 2022) ketaatan ketentuan akuntansi Merupakan tanggung jawab Dewan untuk mematuhi setiap keputusan atau peraturan akuntansi dalam pelaksanaan manajemen keuangan dan penyusunan informasi keuangan untuk memberikan kejelasan dan akuntabilitas pengurusan finansial serta informasi finansial yang diperoleh efisien, andal dan cermat datanya.

Hipotesis Penelitian

- H1: Perilaku tidak etis ber terhadap Fraud Akuntansi
- H2: Asimetri informasi ber terhadap Fraud Akuntansi
- H3: Ketaatan aturan akuntansi ber terhadap Fraud Akuntansi

menyalahgunakan pangkal energi badan, dan sikap yang tidak melakukan apa- apa. Perilaku bisa terjalin dampak minimnya pengawasan kepada pegawai dalam melakukan kewajiban serta peranan alhasil pegawai leluasa melaksanakan kecurangan dalam suatu industri ataupun lembaga yang bisa membagikan profit buat dirinya sendiri (Saraswati & Purnamawati, 2022). Perilaku sepatutnya tidak dapat diperoleh dengan cara akhlak sebab menyebabkan ancaman untuk orang lain serta area(Jika& Leksair, 2020). Riset ini mensupport hasil riset yang dicoba oleh (Saraswati & Purnamawati, 2022), (Kalau & Leksair, 2020) melaporkan kalau perilaku memi positif kepada kecondongan kecurangan akuntansi. Maksudnya bila perilaku yang dipunyai orang besar hingga kecondongan kecurangan akuntansi hendak bertambah.

Asimetri Informasi Terhadap Fraud Akuntansi

Variabel asimetri data mempunyai angka koefisien patokan sebesar 0, 511 dengan angka signifikansi sebesar 0, 001< 0, 05. Perihal ini membuktikan kalau asimetri informasi mempunyai akibat positif serta penting kepada kecondongan kecurangan akuntansi. Anggapan 2 dalam riset ini diperoleh. Hasil riset membuktikan Jika asimetri informasi tetap tinggi, Fraud Akuntansi akan meningkat. Asimetri informasi adalah kondisi dimana adanya kesenjangan kepemilikan informasi antara prinsipal dan agen disaat prinsipal mempunyai informasi yang kurang tentang keahlian agen, sedangkan agen mempunyai lebih banyak informasi tentang keterampilan pribadi, industri, dan industri. ukuran Ketika ada asimetri informasi, manajemen industri memberi mereka informasi keuangan yang berguna yang memotivasi mereka untuk menerima imbalan tambahan yang besar, mempertahankan status mereka, dll. Studi ini mendukung mis. (Laoli, 2022), (Putri & W., 2018), (I Putu & Ayu, 2021) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud Akuntansi. Artinya adanya asimetri informasi yang tinggi berakibat pada meningkatkannya *Fraud* Akuntansi

Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Akuntansi

Variabel ketaatan ketentuan akuntansi mempunyai angka koefisien patokan sebesar- 1, 179 dengan angka signifikansi sebesar 0, 000< 0, 05. Perihal ini membuktikan kalau ketaatan ketentuan akuntansi mempunyai akibat minus serta penting kepada kecondongan kecurangan akuntansi. Anggapan 3 dalam riset ini diperoleh. Hasil riset membuktikan kalau terus menjadi besar ketaatan ketentuan akuntansi hingga kecondongan kecurangan akuntansi hendak menyusut. Menurut (Patabang *et al.*, 2021) ketaatan ketentuan akuntansi merupakan sesuatu informasi finansial diklaim mematuhi ketentuan akuntansi bila mempraktikkan kaidah-kaidah ataupun prinsip- prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Ketaatan ketentuan akuntansi dapat dibilang seluruh peranan dalam badan buat penuhi seluruh ketaatan ketentuan akuntansi dalam melakukan

Pengaruh Kepuasan Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Religiusitas terhadap *Fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat Pusat Se-Kota Denpasar

Ni Putu Novi Damayanti Putri ⁽¹⁾
 Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati ⁽²⁾
 Cokorda Gde Bayu Putra ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia Denpasar
 e-mail: novidamayantiputri30@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of compensation satisfaction, obedience to accounting rules and religiosity on fraud. This research was conducted at BPRs in Denpasar City. The sample in this study was 168 people. The data were tested using the classical assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing and the coefficient of determination. The results showed that the compensation satisfaction variable had a negative and significant effect on fraud. Compliance with accounting rules has a negative and significant effect on fraud. Religiosity has a negative and significant effect on fraud. Suggestions given by BPRs should maximize compensation satisfaction which is implemented by providing appropriate remuneration efforts with constant methods, providing training on accounting to employees to increase employee knowledge about accounting rules, in addition BPRs should have qualified employees who know about accounting rules so as to minimize fraud.

Keywords: *Compensation Satisfaction, Compliance with Accounting Rules, Religiosity and Fraud.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia akuntansi yang semakin meningkat, bukan hanya memberikan akibat yang baik, akan tetapi memberikan akibat yang tidak baik misalnya masalah kecurangan (*fraud*) yang semakin semena-mena di dalam kehidupan. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi entitas atau pihak lain (Suprapta dan Padnyawati, 2021).

Fraud merupakan perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara licik dan bersifat menipu serta sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. *Fraud* di bidang perbankan dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal (kebijakan, sistem, dan prosedur) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan pribadi atau pihak lain yang berpotensi merugikan bank dan pihak-pihak terkait baik material maupun moril (Egita dan Mahfiroh, 2018). Dalam kasus-kasus yang pernah terjadi, *fraud* di perbankan lebih banyak melibatkan pihak internal bank baik dari pengurus, pemegang saham maupun pegawai di BPR. Beberapa kasus yang melibatkan BPR di Provinsi Bali pada tahun 2020 tercatat 8 BPR dan tahun 2019 tercatat 9 BPR di Bali telah dilikuidasi karena *fraud* (Suara.com, 2021).

Salah satu kasus kecurangan yang terjadi melibatkan kerugian terhadap BPR Lestari. Kasus pembobolan rekening nasabah hingga miliaran yang dilakukan oleh karyawan BPR Lestari. Kasus ini terungkap dari korban mengadu ke BPR Lestari karena ada transaksi yang tidak wajar direkening tabungannya. Pihak bank lalu melakukan investigasi internal. Hasilnya ditemukan transaksi tidak wajar dengan menggunakan mobile banking pada rekening karyawan BPR. Korban tidak pernah melakukan transaksi pada mobile banking. Namun, korban mengaku pernah meminta seorang karyawan bank yang tak lain tersangka untuk mengakses mobile banking. Fenomena *fraud* yang terjadi pada BPR Lestari disebabkan oleh banyak faktor yaitu kepuasan kompensasi yang belum di terima pelaku, tidak taatnya pada aturan akuntansi, dan rendahnya religiusitas yang dimiliki oleh pelaku kecurangan (radarbali.jawapos.com, 2021).

Fraud terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kompensasi yang diterima tidak sesuai, sehingga terjadi ketidakpuasan kompensasi yang diterima. Menurut Parukan, dkk (2020) kompensasi merupakan segala sesuatu yang di terima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus di hitung dan di berikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Wexley dan Yukl (2003) dalam Widyaswari (2017), mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Parukan, dkk (2020), Egita dan Mahfiroh (2018) menyatakan bahwa kepuasan kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Religiusitas merupakan faktor pendukung terjadinya *fraud*. Religiusitas merupakan rasa percaya terhadap Tuhan yang disertai oleh adanya komitmen-komitmen dalam menjalani berbagai prinsip yang diyakini (Egitam 2020). Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi secara tidak langsung akan mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Parukan, dkk (2020), Egita (2020) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pegawai BPR tentang bagaimana kepuasan kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan religiusitas untuk dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* Pada BPR Pusat Se-Kota Denpasar.

KAJIAN PUSTAKA

Agency theory (teori keagenan) seperti yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa, pemisahan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (*agen*) suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). *Agency problem* yang dimaksud antara lain adalah terjadinya informasi yang asimetri (tidak sama) antara yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola. Dengan adanya kepemilikan informasi yang tidak setara itu maka manajemen (*agen*) perusahaan cenderung melakukan moral hazard dan adverse selection. Manajer memang mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Memburuknya kondisi dari *agency problem* juga disebabkan, walaupun manajer mendapatkan kompensasi dari pekerjaannya, namun pada kenyataannya perubahan kemakmuran manajer jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perubahan kemakmuran pemegang saham atau pemilik.

Kompensasi adalah penghargaan atau ganjaran kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja. Wexley dan Yukl (2003) dalam Widyaswari (2017), mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Parukan, dkk (2020), Dasuki dan Yudawati (2022) menyatakan bahwa kepuasan kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Artinya apabila kompensasi yang diberikan organisasi/perusahaan kepada karyawan sesuai maka *fraud* akan menurun. Berdasarkan pengaruh kepuasan kompensasi terhadap *fraud* maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap *fraud*.

Menurut Patabang, dkk (2021) ketaatan aturan akuntansi adalah suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi bisa dikatakan semua kewajiban dalam organisasi untuk memenuhi segala ketaatan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, andal serta akurat informasinya. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi,

akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi. Penelitian yang dilakukan oleh Patabang, dkk (2021), Dasuki dan Yudawati (2022) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Artinya semakin tinggi ketaatan terhadap aturan akuntansi maka akan semakin rendah kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian diatas dan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua adalah sebagai berikut :

H₂: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap *fraud*.

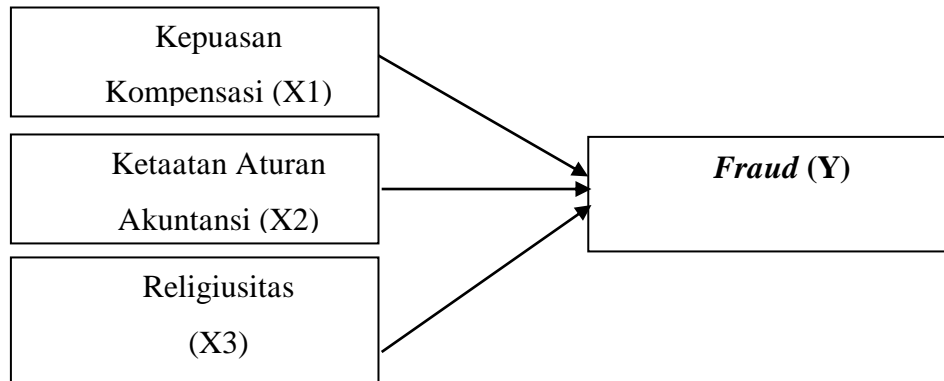
Menurut Parukan, dkk (2020) bila dalam agama menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, religiusitas menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi secara tidak langsung akan mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Parukan, dkk (2020), Egita (2020) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan pemikiran dan penjelasan diatas, maka usulan hipotesis ketiga adalah:

H₃: Religiusitas berpengaruh terhadap *fraud*.

METODE PENELITIAN

Fraud dipengaruhi oleh kepuasan kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan religiusitas. Apabila kompensasi yang diberikan organisasi/perusahaan kepada karyawan sesuai maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan menurun. Ketaatan aturan akuntansi bisa dikatakan semua kewajiban dalam organisasi untuk memenuhi segala ketaatan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, andal serta akurat informasinya. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi secara tidak langsung akan mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Berdasarkan uraian diatas kerangka berpikir yang bisa digambarkan berdasarkan satu variabel dependen *fraud* yang dipengaruhi tiga variabel independen (Kepuasan Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Religiusitas) adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Model Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian
Pengaruh Kepuasan Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Religiusitas Terhadap *Fraud*



Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:136). Populasi dalam penelitian ini adalah 24 BPR Pusat Se-Kota Denpasar dengan jumlah responden sebanyak 768 orang. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability sampling* dengan metode *Proposive Sampling*. *Proposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun Kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pegawai BPR yang menduduki jabatan sebagai Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, Komisaris, Kabag Keuangan, *Accounting*, dan SPI. Jumlah sampel yang akan digunakan yakni sebanyak 168 Memakai Percobaan hipotesis dengan cara analisis regresi berganda supaya bisa tahu atau mendapatkan gambaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang dipakai yaitu model regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = *Fraud*

a = Konstanta

B_{1-3} = Koefisien regresi

X_1 = Kepuasan Kompensasi

X_2 = Ketaatan Aturan Akuntansi

X_3 = Religiusitas

$e = error$

Pengujian hipotesis diujikan lewat uji statistik t. Uji statistik T dipakai pada percobaan terakhir, uji ini dipakai guna mengerti sebesar apa dampak yang dihasilkan beberapa variabel bebas secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi menggunakan taraf nyata a sebesar 5% (Ghozali, 2016:99). Uji signifikansi simultan (uji statistik F) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan melihat F hitung lebih besar dari 4 pada probabilitas $\alpha = 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:99). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2). Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Pengumpulan Data

Tabel 1 Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	Validitas		Reabilitas
	Korelasi (r)	Probabilitas (p)	Koefisien Alpha
Kepuasan Kompensasi (X_1) $X_{1.1}$ s.d $X_{1.9}$	0,904; 0,897; 0,913; 0,895; 0,900; 0,902; 0,916; 0,875; 0,920	0,000	0,972
Ketaatan Aturan Akuntansi (X_2) $X_{2.1}$ s.d $X_{2.7}$	0,943; 0,894; 0,925; 0,899; 0,926; 0,930; 0,924	0,000	0,970
Religiusitas (X_3) $X_{3.1}$ s.d $X_{3.5}$	0,938; 0,915; 0,918; 0,921; 0,944	0,000	0,959
Fraud (Y) $Y.1$ s.d $Y.9$	0,866; 0,876; 0,873; 0,883; 0,867; 0,867; 0,848; 0,887; 0,890	0,000	0,961

Sumber: Data diolah, (2022)

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel memiliki nilai korelasi lebih dari 0,30 dan koefisien alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan valid dan reliable. Instrumen penelitian sudah baik dan dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas (sig. 2 tailed)	Multikolinearitas		Heterokedastisitas (Sig)
		Tolerance	VIF	
X1	0.060	.669	1.494	.083
X2		.544	1.837	.066
X3		.621	1.611	.492

Sumber: Data diolah, (2022)

Uji normalitas dapat dikatakan berdistribusi normal apabila sig $>0,05$. Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan. Pada hasil uji statistik yang disajikan, terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* $>0,05$ yaitu sebesar 0,060 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal.

Sebuah penelitian dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai *tolerance* $>0,1$, dan *VIF* < 10 . Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan, nilai *tolerance* semua variabel $> 0,1$ ($X_1=0,669$; $X_2=0,544$; $X_3=0,621$) dan nilai *VIF* < 10 ($X_1=1,494$; $X_2=1,837$; $X_3=1,611$), yang berarti sudah tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Jika nilai sig $>0,05$ maka model bebas dari heteroskedastisitas. Pada hasil uji statistik yang disajikan terlihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki sig $>0,05$ atau sebesar $X_1=0,083$; $X_2=0,066$; $X_3=0,492$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				Beta
1	(Constant)	45.643	1.959		23.300	.000
	Kepuasan Kompensasi	-.289	.061	-.309	-4.737	.000
	Ketaatan Aturan Akutansi	-.320	.081	-.285	-3.948	.000
	Religiusitas	-.443	.105	-.286	-4.234	.000

a. Dependent Variable: Fraud

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan output SPSS, model penelitian dapat dituliskan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = 45,643 - 0,289X_1 - 0,320X_2 - 0,443X_3$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 45,643 artinya jika kepuasan kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan religiusitas dianggap sama dengan nol, maka besarnya nilai *fraud* adalah sebesar 45,64 atau 45,64%.

Berdasarkan *output* SPSS R^2 sebesar 0,534 atau sebesar 53,4%. Hal tersebut berarti bahwa 53,4% variabel *fraud* dapat dijelaskan oleh variabel kepuasan kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan religiusitas. Sedangkan 46,6% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain. Berdasarkan Uji Anova atau *F-Test* nilai F_{hitung} sebesar 62,663 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai profitabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kepuasan kompensasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar 0,289 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang negatif antara kepuasan kompensasi dengan *fraud*. Kompensasi adalah penghargaan atau ganjaran kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja. Wexley dan Yukl (2003) dalam Widyaswari (2017), mengatakan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja.

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang mempelajari hubungan keagenan yang terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan yang timbul akibat adanya kepentingan antara *principal* dan agen. *Principal* dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen. Dengan kompensasi yang sesuai perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan perilaku tidak etis serta berlaku

curang dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Parukan, dkk (2020), Dasuki dan Yudawati (2022) menyatakan bahwa kepuasan kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Artinya apabila kompensasi yang diberikan organisasi/perusahaan kepada karyawan sesuai maka *fraud* akan menurun.

Hasil uji t menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Sehingga hipotesis kedua penelitian ini diterima. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar 0,320 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang negatif antara ketaatan aturan akuntansi dengan *fraud*. Menurut Patabang, dkk (2021) ketaatan aturan akuntansi adalah suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi bisa dikatakan semua kewajiban dalam organisasi untuk memenuhi segala ketaatan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, andal serta akurat informasinya. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi.

Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan. Dari pihak ekstern, pemakai laporan keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Patabang, dkk (2021), Dasuki dan Yudawati (2022) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Artinya semakin tinggi ketaatan terhadap aturan akuntansi maka akan semakin rendah kecurangan (*fraud*).

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Sehingga hipotesis ketiga penelitian ini diterima. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar 0,443 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan yang negatif antara religiusitas dengan *fraud*. Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontaktual antara *principals* dan *agents*. Pada penelitian ini manajemen BPR yang bertindak sebagai agen yang secara moral dapat bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan bagi para pemilik yang bertindak sebagai *principals*, namun disisi lain terkadang pihak manajemen dalam hal ini khususnya pegawai BPR memiliki kepentingan untuk mensejahterakan diri mereka sendiri. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara *principals* dan agen dapat mengakibatkan timbulnya *agency problem* sehingga terjadinya kecurangan. Kecenderungan kecurangan dapat disebabkan karena rendahnya religiusitas yang dimiliki pegawai BPR. Sehingga dibutuhkan adanya religiusitas yang tinggi, maka religiusitas dapat diandalkan untuk melindungi dari *fraud*.

Menurut Parukan, dkk (2020) bila dalam agama menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, religiusitas menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi secara tidak langsung akan mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Parukan, dkk (2020), Egita (2020) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Artinya semakin tinggi religiusitas maka akan semakin rendah kecurangan (*fraud*).

SIMPULAN DAN SARAN

Menurut hasil analisis dan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kepuasan Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Religiusitas memberi pengaruh signifikan dan negatif terhadap *fraud*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu BPR sebaiknya memaksimalkan kepuasan kompensasi yang diimplementasikan dengan upaya penyerahan imbalan yang pantas dengan metode yang konstan. Sehingga diharapkan bisa menyampaikan rasa keseimbangan untuk para karyawan dan meminimalisir tingkat penyelewengan. BPR juga sebaiknya memberikan pelatihan tentang akuntansi kepada pegawainya untuk menambah pengetahuan pegawai

tentang aturan akuntansi, selain itu BPR sebaiknya memiliki kualifikasi pegawai yang mengetahui mengenai aturan akuntansi, sehingga dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang akan terjadi dari ketidaktaatan aturan akuntansi. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kecurangan (*fraud*) seperti *reward and punishment*, pengendalian internal, moralitas individu, *financial pressure*, komitmen organisasi dan etika organisasi, serta variabel lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, T. M., & Fitri, F. A. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Etika Organisasi, Keadilan Kompensasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* , Vol.3, No.3 527-537 E-ISSN: 2581-1002.
- Dasuki, T.M.S. dan Yudawati, Y. (2022) Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*. Vol. 5 No. 1. E-ISSN: 2622-5379
- Egita, E. (2020). Pengaruh Religiusitas, Reward and Punishment, dan Job Rotation Terhadap Fraud. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* , 55-64.
- Egita, E., & Mahfiroh, S. (2018). Pengaruh Kepuasan Kompensasi, Reward and Punishment dan Religiusitas Terhadap Fraud (Studi Pada Karyawan BMT di Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* , Vo. 20 No. 4.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istiqomah, N. L., (2017) Analisis Pengaruh *Reward and Punishment*, *Job Rotation*, dan *Religiusitas* Terhadap *Fraud* pada BMT di Yogyakarta. *Digital Library*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Jaelani, A. (2020) Pengaruh Religiusitas, Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan (*Fraud*). *Skripsi UIN Jakarta*.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W. (1976) *Theory of the firm:Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. *Jurnal of Finance Economic* 3:305-360
- Mar'ati, F.S. dan Sudarmawati, E. (2021) Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Kepatuhan Sistem Pengendalian dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Pada Pegawai di Instansi Pemerintah Kota Salatiga. *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. Vol. 10 No. 2
- Patabang, L. Fitriana, R. dan Nurhaliza, F. (2021) Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap

Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Bisnis*. Vol. 17. No.1 ISSN: 0216-6437

- Prasetya, E. (2015). Pengaruh Kompensasi Terhadap Fraud dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi pada BMT di Wonosari). *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta* .
- Purukan, R. M., Kojo, C., & Lengkong, V. P. (2020). Pengaruh Kepuasan Kompensasi, Reward and Punishment dan Religiusitas Terhadap Fraud Pada PLN (Persero) Rayon Airmadidi Minahasa Utara. *Jurnal EMBA* , Vol. 8 No.1 389-390 ISSN: 2303-1174.
- Radarbali. (2021, Juli 02). *Bobol Rekening Nasabah hingga Miliaran, Karyawan BPR Dituntut 7 Tahun*. Retrieved September 24, 2021, from Radarbali.id: <https://radarbali.jawapos.com>
- Sudariani, N.M.R. dan Yudiantara, I.G.A.P. (2021). Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*. Vol. 12 No. 1
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Afabeta.
- Suprpta, E. L., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Financial Pressure, Kepuasan Kompensasi dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada LPD Di Kecamatan Tampaksiring Denpasar. *Hita Akuntansi dan Keuangan* .
- Wexley, K. N., & Gary, Y. A. (2003). *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia Ed. Shobaruddin*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wibisono, P. (2015). Pengaruh Reard and Punishment dan Job Rotation Terhadap Fraud. *ePrints@UNY Universitas Negeri Yogyakarta* .
- Widyaswari, I., Yuniarta, A., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kepuasan Kompensasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Susut. *e-Journal Ak Universitas Pendidikan Ganesha* , Vol. 8, No.2.

Penyajian laporan keuangan perlu memberikan manfaat dan informatif untuk pihak yang mengambil keputusan mengenai perekonomian. Laporan keuangan diterapkan dalam memutuskan keputusan peneneman modal, syarat utang piutang dan perjanjian kompensasi.

LPD di Kecamatan Banjarangkan yang mengalami tindak pidana korupsi yaitu di LPD Bakas. Kejari Klungkung memberikan kenaikan pada penyelidikan tindak pidana korupsi di LPD Bakas, Kecamatan banjarangkan, Klungkung dijadikan penyidikan, Kamis 21 Juli 2022. Terdapat kerugian finansial dari LPD Bakas lebih senilai 4,2 Milliar (Bali.tribunnews.com). Sesuai hasil penyidikan terdapat berbagai tindakan yang memberikan perlawanan hukum yang menyebabkan LPD Bakas tidak menjalankan Peraturan Gubernur Bali NO. 14 Tahun 2017 mengenai Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Provinsi Bali NO. 3 Tahun 2017 mengenai LPD secara maksimal. Pengurus LPD juga belum menerapkan SOP pada penerimaan simpanan data dan pemberian kredit, tidak tertib pada laporan pertanggungjawaban dan keuangan, maka tidak melakukan pengindahan prinsip hati-hati dalam mengelola dana LPD. Dalam pemeriksaan pada LPD Bakas juga terdapat berbagai kredit fiktif, kredit macet dimana belu disesuaikan pada kredit yang dimohonkan, kemudian terdapat juga kredit uang tidak mendapatkan agungan baik pada luar maupun dalam Desa Bakas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang faktor-faktor penting yang berpengaruh pada **Kualitas Laporan Keuangan seperti “Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**. Adapun rumusan masalahnya, yakni : 1. Bagaimana pengaruh Kompetensi SDM pada Kualitas Laporan Keuangan LPD Se-Kecamatan Banjarangkan ? 2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Akuntansi pada Kualitas Laporan Keuangan LPD Se-Kecamatan Banjarangkan ? 3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas Laporan Keuangan LPD Se-Kecamatan Banjarangkan? Tujuan Penelitian : 1. Agar bisa melihat pengaruh kemampuan SDM dalam Kualitas Laporan Keuangan LPD Se-Kecamatan Banjarangkan. 2. Agar bisa melihat pengaruh Pengetahuan Akuntansi dalam Laporan Keuangan LPD Se-Kecamatan Banjarangkan. 3. Agar bisa melihat pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas Laporan Keuangan LPD Se-Kecamatan Banjarangkan. Manfaat Penelitian ini : 1. Manfaat Teoritis yaitu, hasilnya agar bisa memberi pemahaman maupun pengetahuan tambahan pembacanya dan menjadi bahan pertimbangan serta referensi pada penelitian mendatang. 2. Manfaat Praktis yaitu, Dapat memberikan pemahaman tentang faktor yang berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang

didapatkan dalam perkuliahan ke dalam kenyataan serta dapat menambah wawasan tentang Akuntansi.

KAJIAN PUSTAKA

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) dalam Wahida (2015), menjelaskan kondisi yang mana manajemen tidak mendapatkan motivasi dari tujuan seseorang namun lebih dijelaskan dalam sasaran hasil utama pada urusan organisasi. Teory ini mengasumsi terdapat hubungan dari kesuksesan dan kepuasan organisasi.

Kualitas laporan keuangan yakni sebuah informasi yang bisa memberikan kemudahan pembaca dan pengguna untuk memberikan pemahaman dan bisa dijelaskan pada pengetahuan yang memadai mengenai sebuah kegiatan bisnis, ekonomi, akuntansi dan bisa memberikan pembelajaran pada informasi dengan ketekunan yang wajar.

Pada penyusunan laporan keuangan yang memiliki kualitas bisa diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pemahaman terkait akuntansi. Sumber daya manusia yakni sebuah pedoman untuk pembuatan laporan keuangan yang bermutu dikarenakan memberikan susunan laporan keuangan atau mereka yang telah memberikan standar akuntansi.

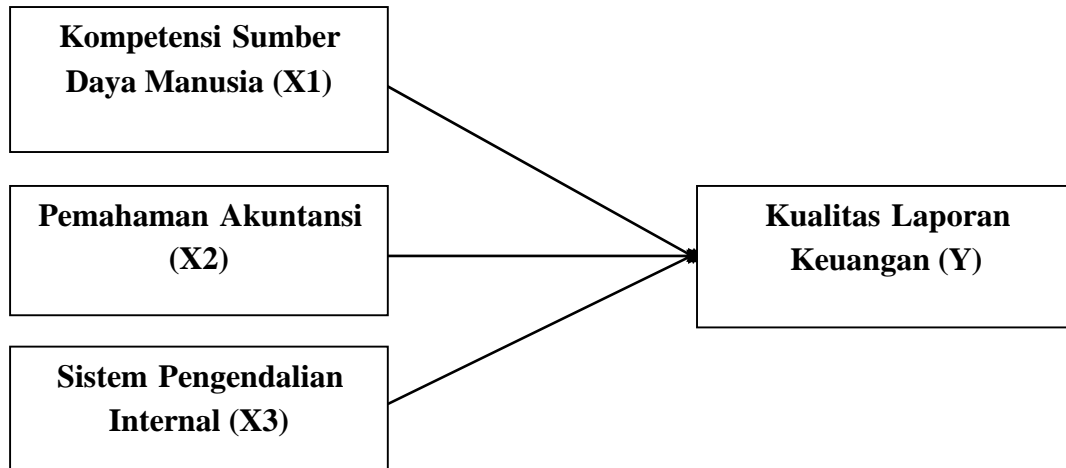
Pemahaman Akuntansi sesuai dengan KBBI (Poerwadaminta, 2006) mempunyai arti pemahaman yang benar dan cerdas serta pemahaman merupakan metode, proses dan tindakan pemahaman. Banyak orang menjelaskan bahwa pemahaman pekerjaan akuntansi yaitu panda dan memahami bagaimana panerapan proses akuntansi sampai dijadikan sebagai laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar dan prinsip yang menjadi ketetapan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.

Pendapat SA Seksi 319, SPI yakni sebuah sistem akuntansi yang disusun sebagai pemberian kepercayaan yang baik pada capaian 3 (tiga) golongan tujuan (efisiensi dan efektifitas operasi, patuh pada suatu aturan dan laporan yang baik) diterapkan oleh manajemen, dewan komisaris, serta personil lainnya.

Sumber daya manusia yaitu sebuah pedoman untuk pembuatan lapora keuangan yang bermutu dikarenakan yang menyusun laporan keuangan yaitu orang yang telah memberikan penguasaan pada standar akuntansi. Temuan dari Ni Putu Riska Fernanda Dewi, Ni Putu Yuria Mendra dan Putu Wenny Saitri (2022, Ni Putu Diah Utari, Luh Kade Datrini dan Ni Luh Putu

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Banjarangkan, Klungkung



Kompetensi SDM merupakan potensi seseorang pada sebuah perusahaan atau sistem untuk menjalankan kewenangan dan tugas dalam mewujudkan keberhasilan yang maksimal (Ihsanti, 2014). Indikator dari kompetensi sumber daya manusia yaitu : 1) Pengetahuan, 2) Keahlian, 3) Sikap (Riandani, 2017).

Pemahaman Akuntansi yakni sebuah kemampuan individu dalam mengerti dan mengenal akuntansi (Pratiwi, dkk, 2021). Indikator dari Pemahaman Akuntansi yaitu: 1) Memahami sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan keuangan, 2) Pelaporan dan penafsiran (Lestari, 2020).

Sistem pengendalian intern yakni suatu integritas yang dilakukan pimpinan untuk staff atau pegawai dengan berlanjut sebagai keyakinan seluruh aktivitas berdasarkan tujuan organisasi yang baik (I Putu Daniasa,2021). Indikator dari system pengendalian intern yaitu: 1) Penilaian Resiko, 2) Lingkungan Pengendalian, 3) Informasi dan Komunikasi, 4) Kagiatan Pengendalian, 5) Pemantauan (Ika Cahyani,2019).

Kualitas Laporan Keuangan yakni sebuah laporan yang bisa memberikan penyajian informasi mengenai sumber daya ekonomi, persediaan infromasi yang bisa dilihat pengguna dan informasi terkait prestasi perusahaan pada satu periode (Mulya dan Yuniasih,2021). Indikator dari kualitas laporan keuangan yaitu: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami (Putri Udiani, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	83	3,37500	5,00000	4,2168675	0,26843915
Pemahaman Akuntansi	83	3,00000	4,80000	4,1879518	0,29358906
Sistem Pengendalian Intern	83	4,00000	4,90909	4,2814896	0,22475970
Kualitas Laporan Keuangan	83	4,00000	4,72727	4,2683461	0,20957892
Valid N (listwise)	83				

Sumber: Lampiran 3

Tabel 4.1 menghasilkan kompetensi SDM (X1) mempunyai nilai terkecil 3,37, nilai terbesar 5,00, standar deviasi 0,26 dan nilai rata-rata 4,21. Pemahaman akuntansi (X2) mempunyai nilai terkecil 3,00, nilai terbesar 4,80, standar deviasi 0,29 dan nilai rata-rata 4,18. Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki nilai terkecil 4,00, nilai maksimum 4,90, nilai rata-rata 4,28 dan standar deviasi 0,22. Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan nilai terkecil 4,00, terbesar 4,72, standar deviasi 0,20 dan nilai rata-rata 4,26.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Nilai r Minimal	Keterangan	Niali Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0,696	Valid	0,743	Reliabel
X2	0,676	Valid	0,739	Reliabel
X3	0,593	Valid	0,713	Reliabel
Y	0,557	Valid	0,695	Reliabel

Sumber: Lampiran 4

Dari Tabel 4.2 bisa diuraikan seluruh variable memiliki koefisien $> 0,30$ serta koefisien alpha $> 0,6$ maka seluruh instrumennya dinilai reliabel dan valid.

Dari hasil analisis bisa dijelaskan pemahaman akuntansi menunjukkan nilai koefisiennya 0,362 serta signifikannya 0,019. Maka pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan LPD se Kecamatan Banjarangkan Klungkung. Artinya bahwa hipotesis kedua diterima. Dari adanya peningkatan pengetahuan akuntansi para pekerja LPD, maka bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman akan akuntansi yaitu seberapa jauhnya kemampuan dalam mengerti dan memahami benar akuntansi secara maksimal dari mencatat hingga menyusun laporannya. Kemudian, pemahaman akuntansi bisa dibutuhkan untuk pegawai LPD dikarenakan berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan yang bermutu dan laporan keuangannya mampu memberi informasi yang sesuai dan handal sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hasil analisis dapat dijelaskan SPI mempunyai nilai koefisiennya 0,623 dan signifikansi 0.000, maka SPI mempengaruhi positif signifikan pada kualitas laporan keuangan LPD seKecamatan Banjarangkan Klungkung. Artinya hipotesis ketiga diterima. Baiknya suatu sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu LPD maka akan berdampak baik pula terhadap kualitas laporan keuangannya. Adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dari penerapan dan pelaksanaan pengendalian inter yang baik bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik. Pengendalian intern dalam LPD di se Kecamatan Banjarangkan sudah dijalankan secara maksimal dan dipatuhi bagi semua stafnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berikut kesimpulan yang bisa diberikan oleh peneliti, adalah:

1. Kompetensi SDM berpengaruh negatif tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan di LPD se Kecamatan Banjarangkan Klungkung, hal ini diduga kompetensi sumber daya manusia yang di miliki LPD se kecamatan Banjarangkan Klungkung belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan, maka bisa memberikan hasil laporan keuangan yang baik
2. Pemahaman akuntansi mempengaruhi positif signifikan pada kualitas laporan keuangan di LPD se Kecamatan Banjarangkan Klungkung.
3. Sistem pengendalian internal mempengaruhi positif signifikan pada kualitas laporan keuangan di LPD se Kecamatan Banjarangkan Klungkung.

Terdapat 5 LPD yang tidak beroperasi yaitu 2 LPD di Kecamatan Banjarangkan, 1 LPD di Dawan, 2 LPD di Nusa Penida.

Namun, ditengah pertumbuhan LPD yang sangat pesat terdapat beberapa LPD yang melakukan tindakan kecurangan salah satunya pada LPD Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Pelaku dari tindakan korupsi dilakukan oleh ketua LPD, dan ia telah mengakui perbuatannya yang memanipulasi catatan transaksi LPD dengan cara mencatat tabungan para nasabah, namun uang tabungan tersebut tidak di setorkan ke kas LPD. Hal tersebut, catatan transaksi keuangan yang terjadi tidak sesuai dengan kas yang ada pada LPD, yang mengakibatkan LPD kehabisan uang saat ada nasabah melakukan transaksi penarikan. Dalam penyelidikan dilakukan oleh kejaksaan tinggi Kabupaten Klungkung dimana tercatat jumlah kerugian sebanyak Rp 12 Miliar. Dimana saat diklarifikasi mengaku siap mengembalikan dana nasabah itu. Namun, ia mengatakan tidak bisa mengembalikan langsung, namun secara di cicil. (*radarbali.jawapos.com 2021*)

Kecenderungan Kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk memanfaatkan pengelolaan informasi sehingga pembuatan informasi keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tuanakotta (2016), kecurangan akuntansi adalah pengungkapan informasi keuangan yang disengaja atau lalai dengan tidak melakukan apa yang diperlukan..

Ketaatan aturan akuntansi merupakan faktor yang juga dapat mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ketaatan adalah suatu sikap patuh terhadap aturan atau perintah yang berlaku, sedangkan aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) atau Tindakan yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Rahmawati dan Idjang (2012) menyatakan bahwa aturan akuntansi dibuat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dimana ketaatan aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen bagaimana melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan.

Sistem pengendalian internal berfungsi memberikan keyakinan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat

menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan (Herawati, 2014).

Timbulnya kecurangan akuntansi ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu *bystander effect*. Menurut Sarwono dan Meinarno (2009), *bystander effect* merupakan fenomena sosial dimana semakin banyak keberadaan orang lain (*bystander*) pada sebuah situasi darurat, maka semakin kecil kemungkinan keberadaan orang lain (*bystander*) tersebut membantu seseorang yang sedang berada dalam situasi darurat. Terjadinya *bystander effect* ini disebabkan karena seseorang tidak ingin terlibat dalam kasus kecurangan tersebut yang dapat membuat posisi dirinya bekerja akan terganggu.

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Tekanan Finansial Dan *Bystander Effect* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Se-Kecamatan Dawan, Klungkung. (*nusabali.com, 2021*).

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini di dukung dengan *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey dalam Rahimah *et al.*, (2018) menerangkan ada 3 faktor yang memicu timbulnya kecurangan yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), serta rasionalisasi (*rationalitation*). Pencegahan *Fraud* merupakan upaya yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu menurunkan tekanan pada pegawai kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat *fraud*, mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan. *Fraud triangle theory* digunakan dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan pentingnya suatu instansi meminimalkan kesempatan yang ada untuk melakukan kecurangan. Seseorang yang mempunyai sikap akan bertanggung jawab kepada tugas yang dibebankan, cenderung tidak akan menjalankan kecurangan (*fraud*).

Menurut Tuanakotta (2016), kecurangan akuntansi adalah pengungkapan informasi keuangan yang disengaja atau lalai dengan melakukan atau tidak melakukan apa yang diperlukan. Kecenderungan kecurangan akuntansi adalah keinginan seseorang untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui. Contohnya salah saji atas laporan keuangan , korupsi dan penyalahgunaan aset (Shintadevi, 2015).

Ketaatan Aturan Akuntansi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ketaatan adalah suatu sikap patuh terhadap aturan atau pemerintah yang berlaku, sedangkan aturan adalah

cara (ketentuan, patokan, petunjuk, pemerintah) atau Tindakan yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Rahmawati dan Idjang (2012) menyatakan bahwa aturan akuntansi dibuat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berpedoman terdapat aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI. Informasi yang tersedia didalam laporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen, sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari Tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

Sistem pengendalian internal berfungsi memberikan keyakinan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan.

Bystander effect adalah fenomena sosial di bidang psikologi dimana semakin besar jumlah orang yang ada di sebuah tempat kejadian, akan semakin kecil kemungkinan orang-orang tersebut membantu seseorang yang sedang berada dalam situasi darurat di tempat kejadian itu (Dewi, 2018). Menurut Asiah (2017) menjelaskan empat alasan berikut sebagai pembenar yang paling sering diberikan untuk tidak ikut campur: Sang *bystander* takut dirinya ikut tersakiti, *Bystander* takut menjadi target atas tindakan yang tidak dia lakukan, *Bystander* takut melakukan sesuatu yang hanya memperburuk situasi, *Bystander* tidak tahu Tindakan yang harus dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aysha Aulia Amril, Siska Yulia, Nidia Anggreni (2022), Ni Putu Nensy Aryanti Rahayu, I Made Endra Lesmana Putra, (2022), Wulandari dan Nuryanto (2018), Nurani (2016), Yulina Eliza (2015), Anak Agung Ayu Evy Putri Indraswari, Ni Wayan Yuniasih. (2022), Ni Wayan Redini Nariya Wati, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati (2021), telah membuktikan bahwa ketaatan aturan akuntansi, sistem pengendalian internal dan *bystander effect* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah di uraikan sebelumnya maka hipotesis yang dapat di ajukan dalam penelitian ini adalah

- H₁ = Ketaatan Aturan Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
H₂ = Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
H₃ = *Bystander Effect* Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

(X2) memiliki nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata 3,1630 dan standar deviasi 1,19952. Bystander effect (X3) memiliki nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum 4,58, nilai rata-rata 2,8778 dan standar deviasi 1,16840. Kecenderungan kecurangan akuntansi (Y) memiliki nilai minimum 1,83, nilai maksimum 4,58, nilai rata-rata 3,3981 dan standar deviasi 0,82675.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

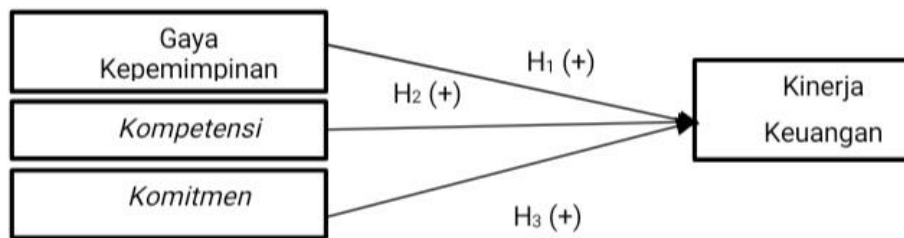
No	Variabel	Pernyataan	Validitas		Reliabilitas	
			Koefisien	Keterangan	Cronbach	Keterangan
			n	n	alpha	n
1	Ketaatan Akuntansi	X1.1	0,475	Valid	0,784	Reliabel
		X1.2	0,743	Valid		
		X1.3	0,785	Valid		
		X1.4	0,708	Valid		
		X1.5	0,592	Valid		
		X1.6	0,693	Valid		
		X1.7	0,801	Valid		
		X1.8	0,777	Valid		
		X1.9	0,750	Valid		
		X1.10	0,801	Valid		
		X1.11	0,711	Valid		
		X1.12	0,742	Valid		
		X1.13	0,571	Valid		
		X1.14	0,688	Valid		
		X1.15	0,739	Valid		
2	Sistem Pengendalian Internal	X2.1	0,674	Valid	0,773	Reliabel
		X2.2	0,725	Valid		
		X2.3	0,797	Valid		
		X2.4	0,705	Valid		
		X2.5	0,806	Valid		
		X2.6	0,757	Valid		
		X2.7	0,775	Valid		
		X2.8	0,728	Valid		
		X2.9	0,742	Valid		
		X2.10	0,810	Valid		
		X2.11	0,765	Valid		
		X2.12	0,769	Valid		
3	Bystander Effect	X3.1	0,741	Valid	0,779	Reliabel
		X3.2	0,736	Valid		
		X3.3	0,688	Valid		
		X3.4	0,791	Valid		
		X3.5	0,800	Valid		
		X3.6	0,732	Valid		
		X3.7	0,704	Valid		
		X3.8	0,705	Valid		
4	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Y1.1	0,529	Valid		
		Y1.2	0,307	Valid		
		Y1.3	0,551	Valid		

terampil individu dalam melaksanakan tugas dan memperkuat pola pikir dan sikapnya (Rosanti, E. D., 2022). Komitmen adalah motivasi batin individu untuk mendukung kesuksesan organisasi dan mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mengedepankan kepentingan organisasi (Magdalena, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif, yang berarti tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak variabel gaya manajemen, kompetensi, dan komitmen terhadap hasil keuangan. Lokasi penelitian ini berlangsung di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sidemen. Fokus utama penelitian ini adalah kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sidemen, yang dapat dijelaskan melalui variabel gaya kepemimpinan, kompetensi, dan komitmen.

Gambar 3.1
Model Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Dan Komitmen Terhadap Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Sidemen



Dalam penelitian ini populasinya adalah 118 pegawai yang bekerja di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sidemen per 31 Desember 2022. Metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan cara memilih sampel dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam teknik pengambilan sampel ini, beberapa kriteria digunakan untuk memilih sampel yang akan

diikutsertakan dalam penelitian. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini:

1. Karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sidemen
2. Karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sidemen yang bersangkutan dengan laporan keuangan dan akuntansi

Berikut ini merupakan tabel sampel sesuai kriteria yang sudah ditentukan:

Tabel 3.1
Jumlah Sampel Sesuai Kriteria

No	Keterangan	Jumlah
1	Karyawan LPD di Kecamatan Sidemen	118
2	Karyawan LPD di Kecamatan Sidemen yang tidak bersangkutan dengan laporan keuangan dan akuntansi	(8)
3	Total Sampel	110

Berdasarkan kriteria tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 110 karyawan yang bersangkutan dengan akuntansi dan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sidemen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperiksa melalui penggunaan analisis regresi berganda. Sebagai prasyarat penting dalam menjalankan penelitian yang relevan, instrumen yang valid dan reliabel diuji terlebih dahulu. Langkah pertama adalah menguji validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Kemudian, dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik, yang mencakup pengujian normalitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian heteroskedastisitas, dengan tujuan untuk memverifikasi bahwa variabel dalam penelitian ini tidak menunjukkan indikasi adanya asumsi klasik. Tujuannya adalah agar interpretasi hasil menjadi lebih tepat dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan normalitas mengindikasikan bahwa distribusi data seharusnya berdekatan dengan garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut. Dari hal ini, dapat disarikan bahwa data dalam penelitian ini memperlihatkan distribusi yang normal karena titik-titiknya terletak dekat dengan garis diagonal dan mengikuti pola tersebut.

Berdasarkan uji multikolinearitas diketahui toleransi variabel gaya kepemimpinan lebih besar dari 0,1 ($0,928 > 0,1$) dan VIF lebih kecil dari 10 ($1,0770,1$) dan VIF lebih kecil dari 10 ($1,3290,1$) dan VIF lebih kecil dari 10 ($1,375$ dan 10). Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Umur Usaha Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Implementasi SAK EMKM Pada UMKM di Kabupaten Badung

Dewa Ayu Agung Trisna Dewi⁽¹⁾

Ni Komang Sumadi⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Tembau, Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238
 email: dewaayutrisna.dt18@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the main pillars of the national economy. On January 1, 2018 IAI implemented a standard prepared to meet the financial reporting needs of micro, small and medium entities, namely SAK EMKM. MSMEs that are currently experiencing development are in Badung Regency. The number of MSMEs in Badung district has increased dramatically from 19,243 in 2019 to 40,989 in 2022 but many MSMEs do not prepare financial reports in accordance with applicable standards. The purpose of this study was to determine the effect of SAK EMKM socialization, business age, and accounting understanding on the implementation of SAK EMKM in MSMEs in Badung regency. In this study using the theory of Planned of Behavior (TPB). This research was conducted in Badung Regency with a population of 40,989 MSMEs. The sample for this study took MSMEs who had applied SAK EMKM to their businesses. The sample determination method in this study ia the statistical calculation method, namely using the slovin formula for MSMEs in Badung district, so that the number of samples from this study amounted to 100 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with data collection methods using questionnaires processed using SPSS. Based on the results of the study, it can be seen that the socialization of SAK EMKM has a positif effect on the implementation of SAK EMKM, age of business has no effect on the implementation of SAK EMKM, and understanding of accounting has an effect on the implementation of SAK EMKM.

Keywords: *Socialization, Business Age, Accounting's Understanding, SAK EMKM*

PENDAHULUAN

Salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia terdiri dari UMKM, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Lapangan kerja dan terbukanya pasar baru merupakan duan cara UMKM berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Darmasari & Wahyuni, 2020). Jika dibandingkan dengan sektor bisnis, UMKM dapat merespon dengan cepat pergeseran permintaan, menciptakan lapangan kerja baru, dan melakukan diversifikasi dengan cara yang tidak dapat dianggap tidak cukup guna memastikan tempat di meja perdagangan nasional (Wardani & Hartanto, 2019). Unit usaha dengan asset minimal Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan penghasilan maksimal Rp. 50.000.000.000 (Pemerintah Republik Indonesia, 2018 dalam Agustina et al., 2020) dianggap sebagai UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peningkatan kompetensi usaha sejalan dengan ledakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perusahaan yang beroperasi di ceruk pasar yang sempit akan berjuang untuk bertahan dalam jangka Panjang jika tidak dapat menawarkan harga yang kompetitif. Untuk menjawab kebutuhan khusus entitas mikro, kecil, dan menengah dalam pelaporan keuangan, IAI mengadopsi SAK EMKM pada 1 Januari 2018 (IAI, 2016). Usaha mikro, kecil, dan menengah kini dapat melacak transaksi keuangan mereka berkat ketersediaan SAK EMKM. Bahkan dengan menggunakan SAK yang paling dasar, SAK EMKM, UKM kesulitan melacak transaksi keuangan (Wardani & Hartanto, 2019).

Jika digabungkan dengan SAK UMUM dan SAK ETAP, SAK EMKM berfungsi sebagai standar yang nyaman bagi organisasi yang tidak dapat memenuhi kriteria SAK ETAP sendiri. Neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan merupakan tiga komponen utama laporan keuangan SAK EMKM (IAI, 2016). Laporan keuangan lengkap, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (arus kas),CALK, dan laporan keuangan lainnya telah disusun berbeda dengan SAK UMUM. Dengan adanya SAK EMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya lebih mudah menyusun catatan keuangan yang dibutuhkan lembaga keuangan sebelum memberikan pinjaman kepada mereka. Beberapa factor antara lain tingkat sosialisasi pelaku, umur usaha, dan pemahaman akuntansi secara umum beroengaruh dalam penerapan SAK EMKM bagi pelaku UMKM.

Penyebarluasan ilmu SAK EMKM difasilitasi melalui sosialisasinya. Sosialisasi terbukti meningkatkan implementasi SAK EMKM (Darmasari & Wahyuni, 2020), (Wardani & Hartanto, 2019) dan (Sholihin et al., 2020). Perekaman akuntansi sesuai standar yang berlaku berupa SAK EMKM akan semakin mudah dipahami oleh para pelaku UMKM karena semakin banyak informasi yang disampaikan kepada mereka tentang SAK EMKM.

Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki control atas usia bisnis mereka. UMKM yang sudah lama berdiri akan mendapatkan apresiasi yang lebih dalam atas pentingnya memelihara catatan keuangan yang akurat. Baik (Cahyaningrum & Andhaniwati, 2021) maupun (Sholihin et al., 2020) mengimplikasikan bahwa kematangan suaru perusahaan penting untuk keberhasilan penerapan SAK EMKM. Oleh karena itu, semakin lama UMKM berdiri, semakin besar kemungkinan pelaku UMKM menyadari pentingnya penerapan SAK EMKM bagi perusahaannya.

Kemampuan seseorang dibidang ini berkembang begitu mereka memahami dasar-dasar akuntansi. Pemahaman akuntansi dapat mempengaruhi seberapa baik SAK EMKM dipraktikkan (Darmasari & Wahyuni, 2020; Susilowati et al., 2021). Kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan meningkat seiring dengan tingkat pengetahuan akuntansi mereka.

Penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan oleh pelaku UMKM akan difasilitasi dengan landasan pengetahuan akuntansi yang kuat di pihak pelaku UMKM.

UMKM yang saat ini mengalami perkembangan adalah di Kabupaten Badung. Jumlah UMKM di kabupaten Badung meningkat drastis dari 19.243 di tahun 2019 menjadi 40.989 pada tahun 2022 (Tribun-Bali.com, 2022). Dari wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu pemilik UMKM di desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yaitu UMKM Sari Anugrah yang dikelola oleh ibu Ni Kadek Puspasari. Dalam sesi wawancara pemilik UMKM menerangkan bahwa dalam menjalankan usahanya hanya melakukan pencatatan keuangan sederhana sehingga tidak diketahui keuntungan/kerugian yang sebenarnya dalam menjalankan usahanya. Selain itu minimnya pengetahuan serta pemahaman terkait pencatatan laporan keuangan juga mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pada usaha tersebut. Pemilik UMKM Sari Anugrah belum mengetahui bagaimana menggunakan standar yang diberlakukan untuk mempermudah pencatatan keuangan pada UMKM yaitu SAK EMKM walaupun sosialisasi terkait pernah dilakukan di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk menguji mengenai pengimplementasian SAK EMKM. Dengan demikian peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Umur Usaha, Dan Pemahaman Akuntansi terhadap Implementasi SAK EMKM Pada UMKM di Kabupaten Badung”**.

KAJIAN PUSTAKA

Dengan menggunakan sikap seseorang terhadap perilakunya sendiri, norma subjektifnya sendiri mengenai perilakunya tersebut, dan rasa kontrolnya sendiri terhadap perilaku tersebut, Theory of Planned Behavior dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku tersebut (Ajzen dalam Wardani & Hartanto, 2019). Menurut pandangan ini, tindakan seseorang dapat diprediksi oleh tujuannya. Mempelajari SAK EMKM memungkinkan seseorang untuk mengkoordinasikan tindakannya dengan tindakan orang lain, menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan tumbuh sebagai pribadi sesuai dengan norma dan standar yang diterima secara universal. Seperti yang dinyatakan oleh Ritcher dalam Susilowati et al., 2021 Tujuan sosialisasi adalah mempersiapkan individu untuk perannya dalam masyarakat sebagai orang dewasa dengan mengajari mereka norma dan harapan dari peran tersebut, serta keterampilan yang diperlukan untuk menjalankannya. Usia perusahaan adalah jumlah waktu yang telah beroperasi. Terdapat korelasi antara kematangan suatu perusahaan dengan pergeseran cara berpikir dan berperilaku para pelakunya dalam menjalankan bisnis (Setiawan, 2022). Bisnis UMKM yang sudah lama berdiri cenderung memiliki pemilik yang termotivasi untuk melakukan perubahan positif terhadap cara pengelolaan perusahaan. Salah

Berdasarkan pengujian tersebut, dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:

$$SAK = 13.156 + 0.420SOS - 0.362AGE + 0.942PA + e$$

Faktor sosialisasi SAK EMKM, Umur Usaha, dan Pemahaman Akuntansi masing-masing menyumbang 56% dari varian nilai implementasi SAK EMKM, yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R square sebesar 0,566. Sisanya 44% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam analisis ini. Nilai p 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa ketiga faktor sosialisasi SAK EMKM, usia usaha, dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap adopsi SAK EMKM.

Analisis statistik mendukung penerimaan H1 dengan koefisien regresi 0,421 dan nilai t 3,65 pada tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan korelasi positif antara sosialisasi SAK EMKM dan adopsi selanjutnya. Semakin besar paparan pemilik usaha UMKM terhadap SAK EMKM, semakin luas penerapannya di sektor tersebut. Peningkatan sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM dapat dikaitkan dengan sosialisasi SAK EMKM dan teori Perilaku Berencana. Dengan meningkatkan kesadaran akan nilai pencatatan keuangan yang akurat sesuai dengan standar industri, sosialisasi SAK EMKM dapat membantu memotivasi para pelaku UMKM untuk melakukannya. Peningkatan sosialisasi SAK EMKM dapat membantu pelaku UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Beberapa temuan penelitian lain menguatkan temuan tersebut, antara lain dari (Darmasari & Wahyuni, 2020) dan (Wardani & Hartanto, 2019), yang menunjukkan bahwa sosialisasi SAK EMKM berdampak pada implementasinya.

Karena nilai t hitung sebesar -1,287 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,362 pada taraf signifikansi 0,201 > 0,05 maka hipotesis kedua terbukti salah. Hasil ini menunjukkan bahwa Umur Usaha tidak memiliki kontribusi terhadap Implementasi SAK EMKM. Semakin lamanya usaha berjalan tidak menjamin pelaku usaha mengimplementasikan SAK EMKM pada usahanya. Hal yang menjadi indikasi penyebab tidak berpengaruhnya umur usaha terhadap implementasi SAK EMKM adalah faktor internal pelaku usaha seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pelaku usaha dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan teori *Planned of Behavior*, sejumlah UMKM merasa kurang termotivasi dalam menerapkan pencatatan transaksi sesuai dengan SAK EMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aresteria, 2022), (Tanmaela, 2021) & (Desmiranda et al., 2022) menyatakan bahwa Umur Usaha tidak berpengaruh terhadap Implementasi SAK EMKM.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan hipotesis 3 diterima dengan nilai regresi 0.942, nilai t hitung 8.365 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan jika Pemahaman Akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap Implementasi SAK EMKM. Semakin

baik pemahaman keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin baik pula Implementasi SAK EMKM. Dalam teori *Planned of Behavior* pemahaman akuntansi dianggap sebagai faktor pengendali subyektif yaitu keyakinan pelaku usaha tentang kemampuan mereka untuk mengimplementasikan SAK EMKM, yang dapat mempengaruhi niat pelaku usaha untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Pemahaman akuntansi dapat membantu pelaku usaha dalam memahami pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta membantu mereka mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM. Hasil ini juga diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Darmasari & Wahyuni, 2020) & (Susilowati et al., 2021) menunjukkan bahwa Implementasi SAK EMKM dipengaruhi oleh Pemahaman Akuntansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan, sosialisasi SAK EMKM memiliki dampak positif terhadap implementasi SAK EMKM pada EMKM di Kabupaten Badung, umur usaha tidak berdampak terhadap implementasi SAK EMKM pada EMKM di Kabupaten Badung, dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Badung. Rekomendasi berikut dibuat sehubungan dengan temuan dan diskusi yang disebutkan di atas dari penelitian ini:

- 1) Meningkatkan Sosialisasi SAK EMKM, yang pada gilirannya akan meningkatkan penggunaan SAK EMKM oleh UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal bagi pemangku kepentingan eksternal.
- 2) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel umur usaha dengan memasukkan UMKM yang sudah ada selama beberapa waktu dan memasukkan variabel lain yang diduga mempengaruhi penerapan SAK EMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina,R.,Ardiana,M.,Anah,L.,Basyir,R.,Jakarta,U.N.,Supriyati,S.,Bahri,R.S.,Niati,A.,Suhardjo,Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2020). Analisis Implementasi SAK ETAP dan EMKM (Studi di Kawasan Religi PP Tebuireng Jombang). *Jurnal Surya Masyarakat*, 5 (2), 45–46.
- Aresteria,A.(2022). Jurnal Ekonomika dan Bisnis. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 8(2), 27–41.
- Aryanta,K.A.(2022). Meningkatkan Drastis, UMKM di Badung Menjadi 40.989 di Tahun 2022.TribunBali.com.<https://bali.tribunnews.com/2022/03/22/meningkat-drastis-umkm-di-badung-menjadi-40989-di-tahun-2022>.Diunduh tanggal 14 Juli 2022.
- Cahyaningrum,I.,&Andhaniwati,E.(2021).AnalisisFaktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Toko Sembako. *SeNAPaN (Seminar Nasional Akuntansi)*, 1(Vol.1No.1(2021):SeNAPaN),1–12.

Bank dengan lancar, pastinya UMKM wajib mengadakan laporan keuangan berdasarkan kriteria dan berbobot. Namun, situasi di lapangan menunjukkan dominan penggerak usaha tidak mengadakan laporan keuangan, yang berakibat pemberi pinjaman sangat mengamati seluruh alasan didalam menyalurkan pinjaman modal.

Berdasarkan fenomena ini, maka penelitian selanjutnya melakukan kajian terhadap penggunaan informasi UMKM di Kabupaten Klungkung. Alasannya adalah selain karena ditemukan masih tingginya penggerak UMKM yang tidak mengadakan laporan keuangan sesuai kriteria yang ditetapkan, Kabupaten Klungkung juga mempunyai keahlian serta kesempatanyang luas didalam memperluas kegiatan industri ekonomi kreatif. Diadakannya tempat rekreasi di daerah Nusa Penida tidaklah sekedar mengundang pelancong dari negeri sendiri, tetapi ada pula turis dari negeri luar. Demi membangkitkan nama pariwisata yang berindikasi kepada peggerak UMKM didalam menjajakan barangnya dalam forum pameran yang diselenggarakan seperti salah satunya ialah kain endek Tenun Cepuk Rang-Rang sebagai maskot dari Kabupaten Klungkung.

Pengerjaan pembukuan akuntansi demi mengadakan pelaporan dana yang mendidik ialah dianggap sukar dilaksanakan bagi usaha kecil serta menengah. Kejadian itu dikarenakan ketidakmampuan ilmu atau pengertian didalam pembukuan akuntansi, susahny prosedur sistem akuntan, dan opini dari pada pelaporan dana tidaklah sesuatu yang istimewa (Said, 2009 dalam Rudiantoro, 2012). Owusu dan Ansah (2000) mengatakan jika industri yang mempunyai usia lebih lama lebih antusias dalam pendataan, pengerjaan dan menciptakan informasi saat dibutuhkan, dikarenakan industri sudah mendapatkan keahlian yang pas. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aufar (2013), Nurmala (2015) dan Budiarta (2015). Adapun arah dari observasi ini ialah demi menunjukkan pengaruh pengetahuan akuntansi dan lama usaha didalam penggunaan informasi akuntansi pada anggota UMKM Sektor pengrajin kain endek di Kabupaten Klungkung.

KAJIAN PUSTAKA

. Penggunaan informasi akuntansi terkait dengan sikap anggota UMKM Sektor pengrajin kain endek dalam membuat keputusan tentang penggunaan informasi akuntansi. Memahami teori atribusi sangat bermakna demi menjelaskan arti tersebut (Ninuk 2016). Teori atribusi ialah penjelasan awal upaya seseorang mencermati orang lain secara berlawanan. Dikemukakan Fritz Heider dengan beranggapan jika perilaku insan ditetapkan oleh campuran dari kemampuan dalam diri insan serta kekuatan dari luar insan (Astrid, 2016).

Informasi amat diperlukan oleh sebuah industri, baik itu industri berukuran sempit ataupun berukuran luas. Informasi itu ialah saran yang bermanfaat serta berarti disaat penentuan suara

perdagangan dalam industri. Pemanfaatan informasi akuntansi tersebut demi perhitungan yang pas, pemeriksaan manajemen dan pemeriksaan operasional

Pengadaan informasi akuntansi disebabkan umur usaha (Holmes dan Nicholls, 1988). Hasil pengamatannya mengatakan apabila industri yang dibangun kurun waktu 11-20 tahun dominan mengadakan informasi akuntansi anggaran, akuntansi *statutory*, dan informasi akuntansi tambahan untuk dipakai selama penentuan suara, lain halnya dengan industri yang dibangun kurun waktu 10 tahun atau kurang. Pengamatan ini juga mengatakan apabila usia industri masih dini adanya indikasi informasi akuntansi yang menyeluruh demi sasaran membentuk kesepakatan disamakan dengan industri yang lebih lama berdiri. Murniati (2002) mengatakan apabila sumber usaha dan industri terinci dalam memaparkan macam-macam perkembangan industri kecil. Perkembangan disebabkan secara tepat oleh beberapa indikator salah satunya umur perusahaan.

Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi

Pendiri usaha kecil dan menengah jika mempunyai pengetahuan akuntansi akan sangat berdampak baik disaat pemakaian informasi akuntansi. Apabila rendahnya pengetahuan akuntansi dapat berdampak terhadap usaha yang dijalani, seperti terjadi manajemen yang gagal sehingga begitu sukar untuk para pendiri usaha dalam menargetkan keputusan bagaimana yang akan diterapkan (Hudha, 2014). Oleh karena itu, jika ilmu system akuntan yang diterapkan berasal dari pendiri ataupun ketua perusahaan bagus menjadikan berpengaruh efektif juga disaat pemakaian informasi akuntansi. Peneliti Prihandani (2020), Astiani (2018) dan Yasa, dkk (2018) mengungkapkan hasil penelitian yaitu adanya pengaruh pengetahuan akuntansi yang positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

H1: Pengetahuan akuntansi berpengaruh positif didalam pemakaian informasi akuntansi

Pengaruh Lama Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi

Murniati (2002) mengemukakan apabila sebuah usaha beroperasi sudah lama maka akan berdampak pada kelangsungan industri yang tepat menuju sisi positif atau menuju sisi negatif. Kelangsungan dari industri berkaitan dari situasi transaksi dan perlombaan yang berlangsung dalam musim perdagangan industri. Pada dasarnya industri yang sudah berdiri sangat lama akan lebih maju dengan alasan telah mempunyai cukup keahlian saat menerapkan kegiatan industrinya. Selain itu usia industri yang sudah berdiri lama dapat dikatakan industri yang cukup kaya untuk mampu berlomba dengan industri / pendiri UMKM yang lain. Terbukti dari pengamatan Nirwana (2019), Anggraini (2020), dan Dewi (2020). Mengacu pada penguraian diatas, didapat hipotesis sebagai berikut :

H2 :Lama usaha berpengaruh positif didalam pemakaian informasi akuntansi

6) Uji Hipotesis

Apabila t lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau H_0 diterima dan H_a ditolak. Namun hasil $\alpha = 0,05$ atau H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan maksud variabel bebas dalam model mempengaruhi variabel terikat secara parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi

Pengamatan mengacu pada hasil didapat variabel pengetahuan akuntansi memiliki nilai koefisien parameter 0,134 sig = 0,015 < 0,05. Pernyataan itu mengarah pada pengetahuan informasimemiliki dampak positif dan signifikan kepada penggunaan informasi akuntansi. Hipotesis 1 diterima. Pengamatan ini menghasilkan petunjuk jika semakin tinggi pengetahuanakuntani yang dimiliki oleh pemilik UMKM Sektor pengrajin kain endek di Kabupaten Klungkung maka semakin meningkat penggunaan informasi akuntansi.

Pengetahuan akuntansi yang dipunyai pendiri industri kecil dan menengah sangat mampu menyalurkan kegunaan disaat pemakaian informasi akuntansi. Rendahnya pengetahuan akuntansi yang dipunyai mengakibatkan industri yang dikembangkan menghadapi manajemen yang gagal dengan begitu pendiri-pendiri industry akan sukar dalam menargetkan keputusan bagaiman yang akan dipergunakan (Hudha, 2014).

b) Pengaruh lama usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi

Variabel lama usaha mempunyai nilai koefisien parameter 1,942 sig =0,000 < 0,05. Hal ini mengarah jika lama usaha mengandung dampak positif serta berdampak signifikan kepada penggunaan informasi akuntansi. Hipotesis 2 didalam penelitian ini diterima. Hasil pengamatan menyatakan apabilaa semakin berdiri lama sebuah usaha beroperasi maka pemakaian informasi akuntansi akan menambah.

Murniati (2002) mengemukakan apabila industry sudah berdirilama maka akan berdampak terdapat pertumbuhan industri yang tepat ke arah sisi positif atau ke arah sisi negatif. Kelangsungan sebuah industri sesuai dengan situasi perekonomian dan perlombaan yang terdapat dikawasan industry pasar. Industri yang sudah sering cepat meluas. Dikarenakan telah mempunyai wawasan yang cukup ketika menerapkann kegiatan industrinya. Perindustrian dengan usia berdiri

- Ramli Ruli,R, (2021), 77,6% UMKM Indonesia Masih Tidak Mendapat Akses Kredit, <https://money.kompas.com/read/2021/04/21/163726326/776-persen-umkm-indonesia-masih-tidak-mendapat-akses-kredit> Diakses 28 Maret 2023
- Rudiantoro, Rizky dan Sylvia Siregar, Veronica. (2011). Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Simposium Nasional Akuntansi XIV, IAI, 2011*.
- Sekaran, Uma. (2000). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum, Sukirman. Adi Wiratno. dan Destiana. (2013). Pengaruh Pendidikan Pemilik, Pengetahuan Akuntansi Pemilik, Budaya Perusahaan, Dan Umur Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UKM Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Terhadap UKM yang Menghasilkan Produk Unggulan di Kabupaten Banyumas). *Jurnal*. Universitas Jendral Soedirman.
- Sitoresmi, Diah. dan Fuad. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada KUB Sido Rukun Semarang). *Jurnal*. Fakultas Ekonmi. Universitas Diponegoro
- Soemarsono. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar Jilid I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sriwahyuni, Fatahurrazak, dan Munthe. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Ada di Kota Tanjungpinang.
- Sugiarto, Subekti Agus. (2010). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi* STIE Perbanas, Surabaya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sutanta. (2010). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Berkembangnya Kawasan Industri Nguter Kabupaten Sujoharjo. Semarang: Undip.
- Suwardjono. (2014). Edisi Ketiga. Akuntansi Pengantar. Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem. BPFE. Yogyakarta.
- Tri, Wahyuniarso. (2013). Strategi Pengembangan Industri Kecil Keripik di Dusun Karangbolo Desa Lerep Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Wahyudi, Muhammad. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di Yogyakarta .*Tesis*. Semarang: Magister Akuntansi UNDIP.
- Widiyanti, Yayuk. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Presepsi Pengusaha Kecil dan Menengah Atas Penggunaan Informasi Akuntansi Keuangan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Wiyanti, Desi. (2013). Tingkat Persaingan Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Industri Meubel Jati Ukir di Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Lampung.

dari penyediaan dana desa tersebut dan mendukung perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan umum tercapai.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah:

1. Apakah ada keterikatan antara Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah ada keterikatan antara Moralitas Individu dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

Dengan tujuannya adalah:

1. Menganalisis keterikatan yang terbentuk antara Pengaruh Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Menganalisis keterikatan yang terbentuk antara Pengaruh Moralitas Individu dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Stewardship* merupakan teori acuan dalam penelitian kali ini. Pada teori ini akan dibahas mengenai asumsi yang mendasari sifat manusia. Teori keagenan dalam penelitian ini akan membahas keterikatan antara pemerintah desa selaku agen pengelola dana dengan masyarakat sebagai principal. Akuntabilitas dana desa merupakan seperangkat pertanggungjawaban yang harus diberikan pemerintah dalam bentuk pelaporan pencapaian atas seluruh aktivitas yang dilakukan sehingga terwujud transparansi dalam pengalokasian dana untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengendalian internal adalah sistem yang menjadi kontrol atas aktivitas yang dilakukan organisasi. Dengan adanya pengendalian internal ini diharapkan seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Moralitas individu adalah sebuah keyakinan yang dijunjung individu sebagai pedoman dalam bersikap sesuai dengan aturan dan nilai – nilai budaya.

Penelitian Sebelumnya

Sebuah pengendalian internal dibentuk sebagai wujud pengendalian yang dibentuk perusahaan untuk mengontrol aktivitas yang dijalankan perusahaan demi mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan. Pengendalian internal diharapkan mampu menjadi alat perbaikan kualitas berkaitan dengan penyusunan berbagai administrasi keuangan pengelolaan dana. Pengendalian internal yang dirancang dengan baik akan sangat bisa membantu perusahaan dalam menanggulangi berbagai penyelewengan yang terjadi sehingga pekerjaan dalam perusahaan dapat berjalan lebih

efisien. Sebuah pengendalian dalam perusahaan akan mencakup keseluruhan struktur perusahaan, metode, dan perangkat lainnya dengan tujuan pembentukannya untuk melindungi berbagai asset perusahaan dan melakukan pengecekan terhadap keandalan dari data akuntansi yang tersedia agar tercipta sistem kerja yang efisien dan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pihak manajemen.

H1: “Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa”.

Moralitas individu dalam sebuah organisasi begitu penting perannya. Moralitas yang baik akan membuat individu dapat bekerja dengan baik dan jujur. Moralitas merupakan sebuah perilaku individu yang menuruti berbagai nilai – nilai dan norma aturan yang berlaku. Dengan moralitas yang baik, individu akan memiliki pedoman dalam bertingkah laku dan berupaya menghindari sebuah tindakan yang melanggar hukum. Tentunya dengan dukungan individu yang bermoral baik akan membuat organisasi bekerja maksimal dan mewujudkan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana milik desa.

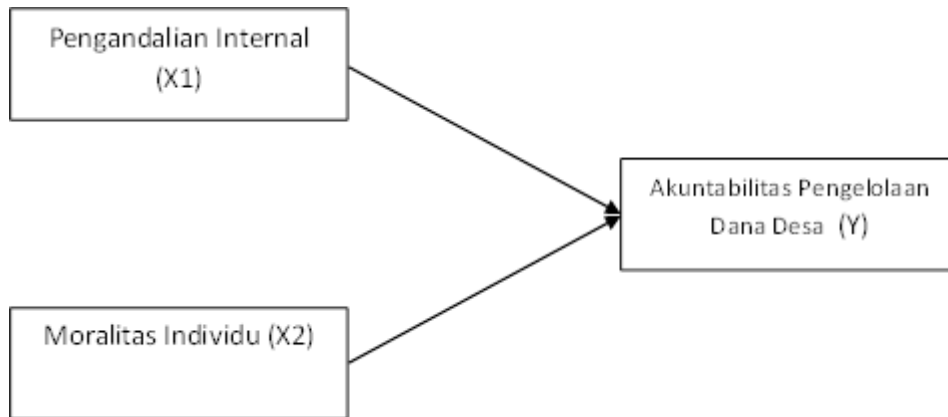
H2 : Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian kali ini yaitu di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi. Dimana keseluruhan aparaturnya digunakan sebagai populasi penelitian dengan jumlah sampelnya sebanyak 60 orang . Adapun sebaran populasi dan sampel penelitian kali ini:

Tabel 1. “Populasi dan Sampel Penelitian”

terhadap variabel ikatnya. Uji t dilakukan untuk mnjawab semua dugaan dalam penelitian (hipoteisi)



Gambar 1. “KerangkaPemikiran”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan awal pengujian dilakukan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

Tabel 2. “Analisis Statistik Deskriptif”

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Internal	60	22.00	40.00	32.7833	3.07583
Moralitas Individu	60	13.00	27.00	20.1500	3.37902
Akuntabilitas	60	16.00	34.00	27.3167	3.98936
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah, 2022

Pengukuran dekriptif diatas memperlihatkan keseluruhan sampel penelitian berjumlah 60 yang ditujukan oleh N. Diperoleh besarnya nilai tertinggi untuk X1 yakni 40,00, ukuran nilai terkecilnya 22,00 dengan rentangan rata – rata nilai 32,7833 serta besarnya standar deviasi 3,07583. Nilai minimal pengetahuan moral individu (X2) adalah 13,00, nilai maksimal 27,00, mean 20,1500, dengan stdnya 3,37902. Nilai minimum informasi kewajiban (Y) adalah 16,00, tertinggi capaian nilai 34,00, skor rata - rata 27,3167, dan standar deviasi 3,98936

Balipost.Com. (2019). *Sidang Korupsi Apbdes, Oknum Perbekel Baha Dipenjara 4,5 Tahun / BALIPOST.Com*. <https://www.balipost.com/news/2019/02/13/68750/Sidang-Korupsi-Apbdes,Oknum-Perbekel...Html>

Donaldson, L., Davis, J. H., Argyris, C., Chandler, A., Etzioni, A., Hage, J., McCloskey, D., Olson, M., Perrow, C., Tricker, R., & Whetten, D. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: CEO Governance And Shareholder Returns. In *Australian Journal Of Management* (Vol. 16).

Ghozali, H. I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

IAPI. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik Per 31 Maret 2011. Jakarta: Salemba Empat.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Juliana, E. (2017). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*.

Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal Of Economic, Business And Engineering*, 1(1), 49–59.

Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat

PP NO 71 TAHUN. (2010). *PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/Pp-No-71-Tahun-2010>

Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/Mraai.V20i2.7894>

Putu Santi Putri Laksmi Dan I Ketut Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. VOL 26 NO 3

Rahimah, Laila, Dkk. 2018. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Lingkungan Pengendalian, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6. No. 12, 139-154.

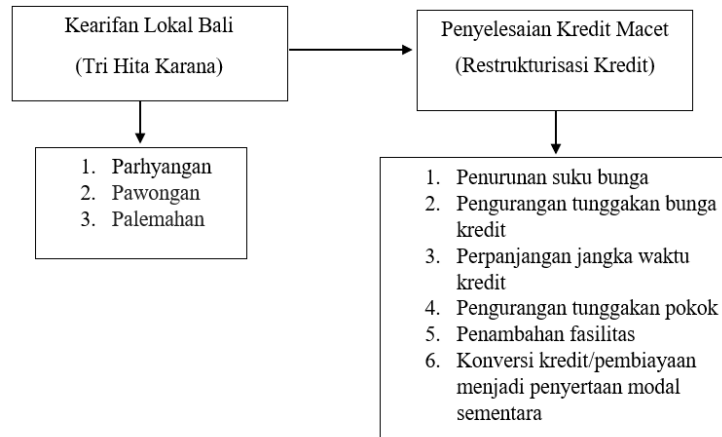
Valery G Kumaat. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). In *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* (Vol. 02, Issue 02).

waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi Joint Venture.

METODE PENELITIAN

Kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara variable dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Metodhe penelitian yang digunakan adalah metodhe kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif yang mendeskripsikan pandangan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari objek penelitian. Teori tindakan beralasan, juga dikenal sebagai "teori tindakan beralasan" (Ajzen dan Fishbein, 1980), menganggap bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh keinginan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya. Dimana seseorang melakukan sesuatu pasti ada sebab dan tujuan. Dalam penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut "informan".. Sehingga subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan kepala bagian kredit koperasi simpan pinjam SADGUNA. Objek penelitian adalah motif dibalik pendekatan kearifan lokal Bali dalam penanganan kredit macet pada ksp sadguna. Wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi adalah metode pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:337), penelitian ini menggunakan metodhe analisis data yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kearifan lokal Bali dengan metode penelitian deskriptif interpretatif dan teori tindakan beralasan, maka dari itu

mengenai keakuratan informasi pelaporan uang yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam menentukan *judgement*, pertimbangan auditor peranan terpenting. Dalam suatu pertimbangan pemeriksaan ada persepsi tanggapan terhadap informasi didapatkan dalam pelaksanaan wewenangnya, beserta *factor internal* auditor, sehingga menghasilkan suatu audited judgement yang digunakan oleh akuntan. Pertimbangan audit diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian dan keterbatasan atas informasi dan data yang diperoleh, dimana peninjau harus mampu membentuk asumsi yang dapat digunakan untuk membuat pertimbangan dan penilaian. Pertimbangan audit merupakan kebijakan auditor dalam membentuk opini mengenai temuan audit, sehubungan dengan pembentukan visi, misi atau penilaian tentang suatu objek, peristiwa, situasi, dan fenomena.

Berdasarkan hasil rewiu laporan keuangan Pemkot Denpasar ditahun 2019 dan 2020, BPKRI telah mengeluarkan opini yang diterima secara umum (WTP). Pada tahun 2021, BPK RI akan menerbitkan opini diskualifikasi (WTP). Namun meski mendapat surat pemberitahuan WTP, Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Tahun 2021 tetap memuat catatan-catatan dari BPK, termasuk pengelolaan awal pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah. objek seperti parkir, pajak, pemnginapan, tempat hiburan, restoran dan aset tetap Pemerintah Kota Denpasar pada neraca pertanggal 31/12/2021 belum persiapan dengan akurat dan detail.

Independensi faktor utama yang besar mempengaruhi keputusan audit. Kemandirian merupakan sikap kepercayaan tanpa tekanan dari pengaruh apa pun yang tidak dikendalikan atau bergantung pada departemen lain. Auditor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam membentuk dan membentuk opini berdasarkan informasi yang berimbang.

Sihombing (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa Independensi berefek positif terhadap opini audit. semakin tinggi independensi auditor maka hasil audit akan semakin akurat dan akurat. Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2020) menunjukkan bahwa independensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap audit judgement. Berbeda dengan penelitian Azizah (2020) yang menyatakan independensi tidak signifikan berefek terhadap audit judgement.

Selain variabel independensi, kompetensi menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kualitas pemeriksaan judgement. Variabel Kompetensi diyakini mempengaruhi pertimbangan auditor karena kesalahan penyajian yang dilakukan dalam rewiu laporan keuangan dalam berbagai keadaan mungkin berkaitan dengan kompetensi auditor. Kompetensi dapat dipahami sebagaitingkat keahlian dan kemampuan setiap individu dalam bertindak sebagai auditor dalam pelaksanaan tugas dan sebuah tanggungjawab.

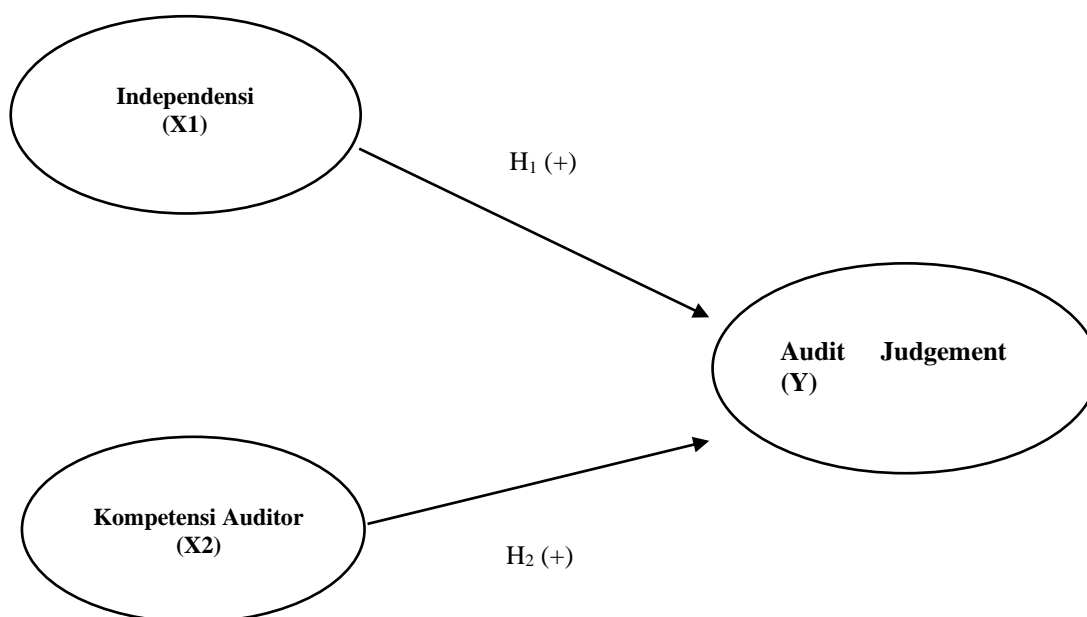
kompetensi yang semakin signifikan baik tinggi, maka sejalan menghasilkan sebuah kualitas audit judgment semakin bagus. Penelitian Yusuf dilakukan pada tahun 2017, menunjukkan kompetensi seorang auditor memiliki efek positif signifikan pada audit judgment. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin menguji apakah kompetensi berpengaruh terhadap audit judgment di BPK Provinsi Bali. Maka hipotesis dinyatakan sebagai berikut :

H2 : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap audit judgment

METODE PENELITIAN

Gambar 1.

Desain Penelitian



Variable (X) adalah variabel menyebabkan perubahan terhadap pengaruh *variable* terikat. Variabel independen penelitian ini adalah independensi dan kompetensi auditor. Variabel sifat dependen dalam *research* ini yaitu audit judgment. Partisipan dalam penelitian ini antara lain pemeriksa BPK di Denpasar sejumlah 76 sample. Metode dalam *research* ini yaitu probabilitas sampling dengan teknik sampel jenuh.

DeAngelo, (1981). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit” <https://akuinssk.uin-suska.ac.id/2012/10/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-audit-pada-sektor-publik-dan-beberapa-karakteristik-untuk-meningkatkannya/> diakses 11 Februari 2023

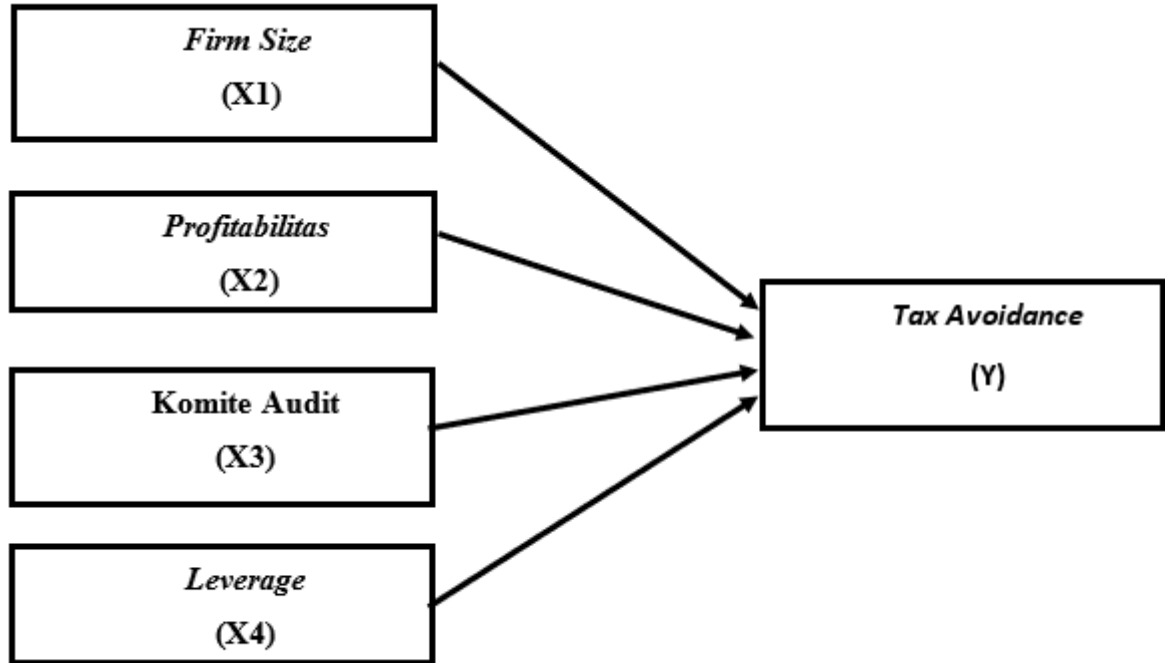
Deliknews.com (2021). Oknum Pejabat Disbud Denpasar Korupsi Dana ‘Banten’. <https://www.deliknews.com/2021/08/05/oknum-pejabat-disbud-denpasar-korupsi-dana-banten/> diakses pada 5 Februari 2022

Bpk.go.id (2021). BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berikan-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-pemerintah-provinsi-bali-tahun-2021> diakses pada 8 Februari 2022

Ghozali, Imam., (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

sis.binus (2022). Multivariate Analysis – Structural Equation Model (SEM – PLS) <https://sis.binus.ac.id/2022/04/27/multivariate-analysis-structural-equation-model-sem-pls/> diakses pada 23 Februari 2023

perbankan antara tahun 2018 hingga 2021. Grafik dan angka diposting di www.idx.co.id. Penelitian kuantitatif mengumpulkan dan menganalisis informasi numerik dari berbagai sumber.



Gambar 3. 1 Kerangka Berfikir

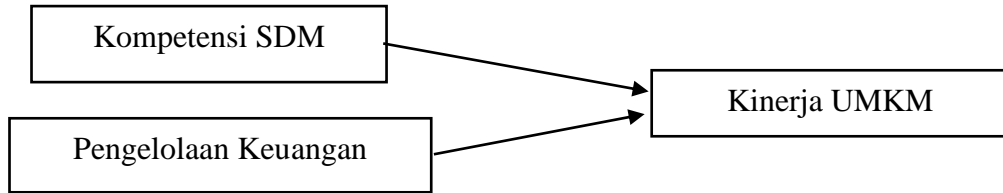
Sumber : Data Diolah, 2023

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan prosedur yang diuraikan di bawah ini.

1. Mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi merupakan empat angka yang menjadi tulang punggung setiap penelitian statistik deskriptif (Ghozali, 2016). Kualitas data dan hipotesis diperiksa menggunakan statistik deskriptif.
2. Pengecekan validitas kuesioner memerlukan analisis korelasi untuk menentukan apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut benar-benar berhubungan atau tidak. Apabila nilai Pearson Correlation antara kedua variabel lebih dari 0,30 maka kita mengetahui bahwa kuesioner tersebut reliabel untuk variabel tersebut.
3. Keandalan kuesioner bergantung pada stabil atau tidaknya tanggapan responden dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Jika angka Cronbach Alpha lebih dari 0,60 berarti perangkat tersebut sangat akurat.
4. Uji normalitas menentukan apakah variabel terikat dan bebas model regresi terdistribusi secara teratur. Uji Kolmogorov-Smirnov menentukan ambang signifikansi

METODE PENELITIAN

Gambar 2. Desain Penelitian



Populasi pelaku UMKM bidang kuliner yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan yang berjumlah 9.742 UMKM. dan sebanyak 99 UMKM yang dipilih menjadi sampel, kemudian regresi linear berganda menjadi alat pembuktian hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pervariabel dipaparkan kompetensi sumber daya manusia (X1), terdapat min value sebesar 2,00, max value mencapai 5,00, mean sekitar 3,7507, dan SD sekitar 0,71447. Sementara itu, pada variabel pengelolaan keuangan (X2), tercatat lowest value sekitar 2,00, max value mencapai 5,00, dengan mean value sekitar 3,8308, dan SD sekitar 0,75494. Sedangkan untuk variabel kinerja UMKM (Y), terdapat min value sebesar 2,67, max value mencapai 4,67, dengan mean sekitar 3,7647, dan SD sekitar 0,35688.

Tabel. 4.2 Ringkasan Hasil Penelitian

<i>Variable</i>	Beta Tidak Standar	t-Hitung	signifikansi	Artinya
Constant	1,961	10,214		-
Kompetensi SDM	0,231	6,658	0,000	Signifikan
Pengelolaan keuangan	0,245	6,697	0,000	Signifikan
<i>R Square disesuaikan</i>	0,473			
F hitungan	44,999			
<i>Sig</i>	0,000			

Fungsi regresi ditampilkan berikut ini.

$$Y = 1,961 + 0,231X_1 + 0,245X_2 + e$$

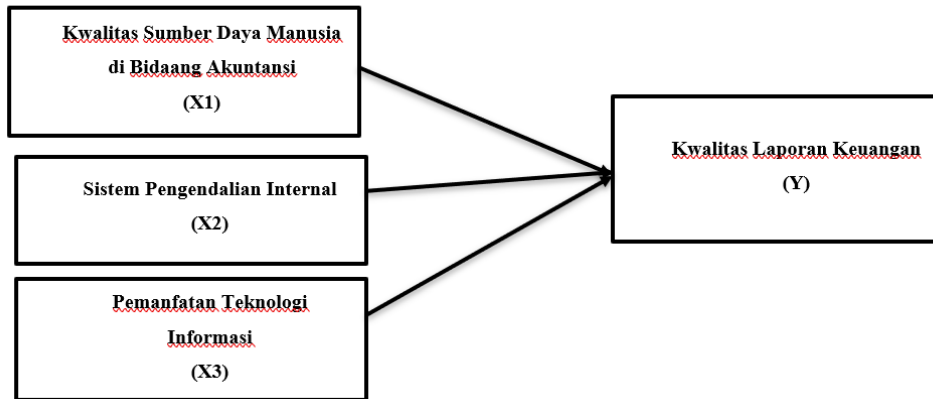
Pembahasan

SDM yang berkompentensi maka kinerja UMKM sektor kuliner di Kota Denpasar akan meningkat. Teori RBV menekankan pentingnya manajemen sumber daya manusia untuk

METODE PENELITIAN

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka berpikir untuk penelitian ini adalah :

Gambar 3.1
Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Data Diolah, 2023

Seluruh data yang telah dikoleksi selanjutnya dilakukan analisis data dengan beberapa tahapan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Analisis statistik deskriptif, yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan atau deskripsi apapun berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian (Ghozali, 2016). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengevaluasi kualitas data dan untuk menguji hipotesis.
2. *Validity test*, untuk menentukan validitas angket sebagai alat penelitian dan untuk menghitung korelasi antara setiap soal. Setiap variable memiliki validitas kuesioner yang ditentukan oleh nilai korelasi Pearson yang melebihi 0,30.
3. Kuesioner yang dapat diandalkan jika jawaban atas pertanyaan konsisten atau terus-menerus (Ghozali, 2013). Alat tersebut sangat andal jika koefisien Cronbach Alpha nya lebih dari 0,60.
4. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah distribusi normal variable dependen dari variable independen dalam model regresi. Jika probabilitas yang signifikan

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresinya dapat ditemukan menjadi:

$Y = 9,989 + 0,269 X_1 + 0,260 X_2 + 0,343 X_3 + e$. Nilai α sebesar 9,989 menunjukkan bahwa jika variable independen diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai Y, yang merupakan kualitas laporaan fiskal, adalah 9,989 satuan. Nilai koefision regresi 1 sumberdaya manusia bidaang akuntansi sebesar 0,269 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sumberdaya manusia bidaang akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan fiskal. Nilai koefision regresi 2 sistim pengendalian internal sebesar 0,260 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sistim pengendalian internal akan meningkatkan kualitas laporan fiskal. Seperti yang ditunjukkan oleh koefision regresi 3 pemanfatan teknologi sebesar 0,269, setiap peningkatan sumberdaya manusia di bidang akuntansi akan menghasilkan peningkatan.

Variasi variable kualitas laporaan fiskal sebesar 60,4% dapat disebabkan oleh variasi variable kualitas sumberdaya manusia di bidaang akuntansi daansistim pengendalian internal perusahaan teknologi inpormasi. Nilai R Square yang disesuaikan adalah $0,604 \times 100 = 60,4\%$. Hasil analisis koefision determinasi menunjukan bahwa, dengan nilai Adjusted R-Square sebesar 0.343, variable Kualitas Inpormasi Akuntansi 34,3% dipengaruhi oleh Keahlian Pemakai, Intensitas Pemakai, daanPenerapan Teknologi Inpormasi. Sebaliknya, 65,7% terakhir dijelaskan oleh variable atau komponen lain yang belum dipelajari dalam penelitian ini, seperti pelatihan.

Nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ditunjukkan oleh (Uji F) yang ditemukan di Tabel 4.4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitaian dianggap memenuhi syarat untuk uji daan pengujian hipotesis daandapat dilanjutkan.

Menurut hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.4, variable kualitas SDM di bidaang akuntansi memiliki pengaruh positif daan signifikan terhadap kualitas laporan fiskal, yang berarti H_0 ditolak daan H_1 diterima. Koefision regresi variable pengendalian internal adalah 0,260, dan nilai signifikansi 0,000 adalah 0,05.

Kualitas laporaan fiskal sangat dipengaruhi oleh variable kualitas sumberdaya manusia di bidaang akuntansi. Dengan kata lain, semakin baik kualitas sumberdaya manusia di bidaang akuntansi, semakin baik laporaan fiskal. Sehubungan dengan teori keagenan, disebut sebagai

Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha, Budaya Organisasi dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Kuta Selatan

Ni Kadek Ari Averina⁽¹⁾

Ni Komang Sumadi⁽²⁾

I Putu Deddy Samtika Putra⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: nikadekariaverina22@gmail.com

ABSTRACT

Fraud is any unlawful act committed intentionally or unintentionally by an individual or group with the intent to obtain something to which they are not entitled and which may harm another party. Cheating arises from the possibility, pressure, and rationalization to cheat. The purpose of this study was to determine the impact of Tri Kaya Parisudha concepts, organizational culture, and law enforcement on fraud trends. The theory in this study uses the cheat triangle theory. The survey was conducted in South Kuta District, Badung Province, with a total population of 282 of her consisting of 8 LPD. Using Slovin's formula to determine the sample size, the sample size for this study was 74 respondents, and the sampling method used was proportional stratified random sampling. The analysis method used is multiple regression analysis with a data collection method using questionnaires. Based on the findings, the concept of tri kaya parisudha has a significant negative impact on fraud propensity, organizational culture has no significant impact on fraud propensity, and law enforcement has a significant negative impact on fraud propensity. It can be seen that the tendency.

Keywords: *Tri Kaya Parisudha Concept, Organizational Culture, Law Enforcement, and Tendency to Fraud*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya dunia akuntansi tentunya akan memberikan efek positif bagi masyarakat, namun perkembangan tersebut tentunya akan memberikan efek negatif seperti isu penipuan (*fraud*) yang kini menjadi fokus perhatian masyarakat. Praktik penipuan dapat terjadi di lembaga keuangan baik untuk sektor swasta maupun pemerintah. Tahun 2019 *Report to the Nations* (RTTN) dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia menunjukkan bahwa penipuan yang paling umum di Indonesia adalah korupsi, yang mewakili 64,4%. ACFE juga mengklasifikasikan penipuan menjadi tiga kategori, yaitu penipuan aset, misrepresentasi dan korupsi.

Dari data yang terkumpul sektor yang paling besar terkena dampak dari tindak kecurangan adalah sektor yang bergerak dalam bidang keuangan. Dimana dampak kecurangan atau *fraud* sebesar 41,4% menjadi penyebab kerugian yang dialami lembaga keuangan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi salah satu sektor yang kena dampaknya.

Desa adat yang biasa disebut desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat umum di Bali yang memiliki wilayah, status, struktur asli, hak tradisional, milik sendiri, tradisi dan cara hidup masyarakat sosial dari generasi ke generasi, tempat suci, tanggung jawab dan kekuasaan, dan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga seseorang. Tujuan LPD adalah untuk mempromosikan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dengan menawarkan pinjaman dan simpanan dalam bentuk tabungan. LPD berperan sebagai penjaga sumber daya keuangan Desa Pakraman, sehingga LPD sangat rentan terhadap kecurangan karena usahanya mengelola perekonomian.

Pertumbuhan LPD yang terjadi di Bali tidak berjalan dengan mulus, dalam proses perkembangannya banyak ditemukan LPD yang mengalami permasalahan. Baru – baru ini kasus LPD Desa Adat Ungasan mencuri perhatian publik dimana mantan ketua LPD Desa Adat Ungasan melakukan tindak korupsi dengan menyalah gunakan wewenang yang dimilikinya. Dalam kasus ini kerugian yang dialami LPD Desa Ungasan mencapai Rp 26 miliar. Dalam perbuatannya tersangka telah melakukan tindakan melawan hukum serta penyalahgunaan wewenang dalam proses pengelolaan dana yang dimiliki LPD Ungasan. Banyak modus yang diterapkan tersangka. Pertama-tama, pelaku melaporkan penggunaan dana tidak sesuai dengan fisik dan harga pembelian investasi berupa pembelian aset. Kedua, beli aset proyek perumahan di secara menyeluruh, tetapi laporkan pembelian secara terpisah. Oleh karena itu harga pembelian lebih tinggi dari nilai properti. Ketiga, pembayaran biaya keuangan LPD untuk membayar investasi tanah yang katanya sudah lunas ternyata belum lunas ke penjual. Keempat menggunakan dana LPD yang dikemas seolah-olah sebagai pinjaman, kemudian jaminan pinjaman tersebut ditarik serta diambil (NusaBali.com 21 Sep 2022).

Kecenderungan kecurangan akan sangat ditentukan oleh kesempatan dan peluang yang tersedia didalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kecurangan atau *fraud* merupakan sebuah tindakan yang illegal dimana perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Perbuatan kecurangan ini merupakan sebuah tindakan merugikan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak individual maupun secara berkelompok demi mendapatkan keuntungan dengan jalan merugikan pihak lainnya. Banyak jenis dari tindak kecurangan ini bisa berupa pencurian uang, penggelapan dari dana yang ada, menyembunyikan data keuangan perusahaan, serta tindakan lain yang termasuk didalamnya adalah korupsi.

Kecurangan berpeluang terjadi karena sebab dari dalam serta dorongan dari luar lingkungan perusahaan maupun organisasi. Kecurangan berdasarkan *fraud triangle* dijelaskan terjadi karena tiga faktor yakni adanya sebuah tekanan untuk melakukan tindakan merugikan ini

seperti tekanan dari kebutuhan ekonomi, kesempatan dimana adanya peluang untuk melakukan tindakan ini seperti kebijakan peraturan yang lemah, kurangnya pengawasan yang memberikan kesempatan pegawai melakukan tindakan menyimpang dalam perusahaan, dan pembenaran dimana orang – orang yang melakukan tindak kecurangan merasa bahwa hal yang dilakukan masih dalam taraf wajar dan dapat dibenarkan.

Lembaga Perkreditasn Desa merupakan lembaga pakraman yang sengaja dibentuk ditingkat desa dengan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa diwilayah tersebut. Sudah barang tentu LPD harus berjalan sesuai dengan adat istiadat serta budaya yang ada di wilayahnya khususnya di Bali. Nampaknya nilai-nilai etika manajer dan sistem administrasi kerja yang berlandaskan nilai-nilai agama perlu ditelaah secara mendetail. Di Bali dikenal dengan konsep tri kaya parisudha. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2017) dan Anesya Dewi (2021) menunjukkan pentingnya pemahaman konsep Tri Kaya Parisudha untuk meminimalisir adanya potensi kecenderungan kecurangan. Oleh karena itu, konsep Tri Kaya Parisudha merupakan faktor terpenting yang dapat diterapkan untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Tri Kaya parisudha adalah tiga perilaku yang menentukan gaya hidup agar berjalan sesuai dengan ajaran darma dan agama.

Menurut Sulistiyowati (2007), budaya organisasi bisa menjadi hal penting yang harus dibentuk untuk meminimalisir peluang trjadinya tindak kecurangan sebab dengan sebuah budaya atau kebiasaan baik akan membentuk pola perilaku seseorang dalam organisasi dan menumbuhkan rasa memiliki dan bangga akan keberadaan organisasinya. Menurut Robbins (2008) Budaya bertindak sebagai mekanisme pembentuk pikiran dan kontrol yang memandu dan membentuk perilaku dan sikap karyawan. Budaya organisasi merupakan faktor lain yang dapat diterapkan untuk meminimalkan kecurangan. Budaya organisasi menggambarkan kebiasaan yang berlaku dalam organisasi yang memandu norma-norma perilaku.

Marsini, dkk (2019) menjelaskan bahwa kesadaran akan hukum bisa muncul ketika sebuah penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik dan benar. Penegakan hukum yang berfungsi dan berjalan maksimal akan meminimalisir timbulnya tindak kecurangan. Dalam penelitian (Mustikasari, 2013), lembaga dengan penegakan hukum yang kurang efektif dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum oleh pegawai, termasuk perilaku menyimpang seperti tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha, Budaya Organisasi Dan Penegakan Hukum Terhadap**

Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Kuta Selatan”.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, *Fraud Triangle Theory* dijadikan landasan atau teori yang menjadi landasan proses penelitian. Kecurangan berdasarkan *fraud triangle* dijelaskan terjadi karena tiga faktor yakni adanya sebuah tekanan untuk melakukan tindakan merugikan ini seperti tekanan dari kebutuhan ekonomi, kesempatan di mana adanya peluang untuk melakukan tindakan ini seperti kebijakan peraturan yang lemah, kurangnya pengawasan yang memberikan kesempatan pegawai melakukan tindakan menyimpang dalam perusahaan, dan pembenaran di mana orang – orang yang melakukan tindak kecurangan merasa bahwa hal yang dilakukan masih dalam taraf wajar dan dapat dibenarkan.

Tri Kaya parisudha adalah tiga perilaku yang menentukan gaya hidup agar berjalan sesuai dengan ajaran darma dan agama. Tiga sikap yang dimaksud mencakup manacika, yaitu kemampuan berpikir yang baik seperti menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip halal. Selain itu, ada wacika, yaitu kemampuan berbicara dengan baik dan selalu memenuhi janji. Terakhir, kayika, yaitu kemampuan bertindak dengan baik seperti menghindari tindakan yang tidak jujur. Asmariansi (2009). Moeljono (dalam Zulkarnain, 2013) mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat nilai yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi dan terus dipelajari, dilaksanakan, serta ditingkatkan secara berkesinambungan.

Fungsi dari budaya organisasi adalah sebagai pengikat anggota organisasi dan sebagai landasan bagi perilaku yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Asshiddiqie (2008) seperti yang diungkapkan oleh Hayatunnopus (2020), penegakan hukum merujuk pada suatu proses di mana upaya dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai panduan perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. LPD, sebagai lembaga keuangan adat di Bali, didasarkan pada hukum adat yang dibentuk oleh masyarakat adat Bali sebagai dasar hukum operasionalnya. Penegakan hukum adat LPD diatur dalam awig-awig desa adat, pararem atau Keputusan Paruman Desa Adat. Penegakan hukum yang berfungsi dan berjalan maksimal akan meminimalisir timbulnya tindak kecurangan.

1. Studi yang dilakukan oleh (Novi Anesya Dewi et al., 2021) menjelaskan konsep tri kaya parisudha yang berjalan dan diimplementasikan dengan baik akan menurunkan kecenderungan kecurangan (*fraud*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Depi Pristya & Wahyuni Arie, 2022) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan bisa diturunkan dengan penerapan budaya organisasi yang baik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartani et al., 2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum mampu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Tri Kaya Parisudha adalah suatu konsep yang merumuskan cara hidup manusia dengan tiga sikap suci. Konsep ini menuntut tiga sikap manusia yang harus dijaga kesuciannya, yaitu kemampuan berpikir yang jernih dan suci (*manacika*), kemampuan berbicara yang benar (*wacika*), dan kemampuan bertindak yang jujur (*kayika*). Istilah "Tri" merujuk pada angka tiga, sedangkan "kaya" merujuk pada gerakan, dan "parisudha" merujuk pada kesucian.

Setiap orang dalam organisasi sebaiknya menerapkan konsep tri kaya parisudha karena dengan penerapan tersebut akan membuat seseorang untuk berpikir, berkata, dan berperilaku yang baik sehingga akan terhindar dari tindakan kecurangan, Saramuscaya (dalam Asmariyani, 2009). Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep tri kaya parisudha dalam sebuah organisasi maka akan mampu mengurangi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2017) dan Anesya Dewi (2021) menunjukkan pentingnya pemahaman konsep Tri Kaya Parisudha untuk meminimalisir adanya potensi kecenderungan kecurangan.

H1: Konsep Tri Kaya Parisudha Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada LPD Se-Kecamatan Kuta Selatan

Menurut Sulistiyowati (2007), budaya organisasi bisa menjadi hal penting yang harus dibentuk untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak kecurangan sebab dengan sebuah budaya atau kebiasaan positif akan membentuk pola perilaku seseorang dalam organisasi dan menumbuhkan rasa memiliki dan bangga akan keberadaan organisasinya. Menurut Robbins (2008) Budaya bertindak sebagai mekanisme pembentuk pikiran dan kontrol yang memandu dan membentuk perilaku dan sikap karyawan. Budaya organisasi menggambarkan kebiasaan yang berlaku dalam organisasi yang memandu norma-norma perilaku.

H2: Budaya Organisasi Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada LPD Se-Kecamatan Kuta Selatan

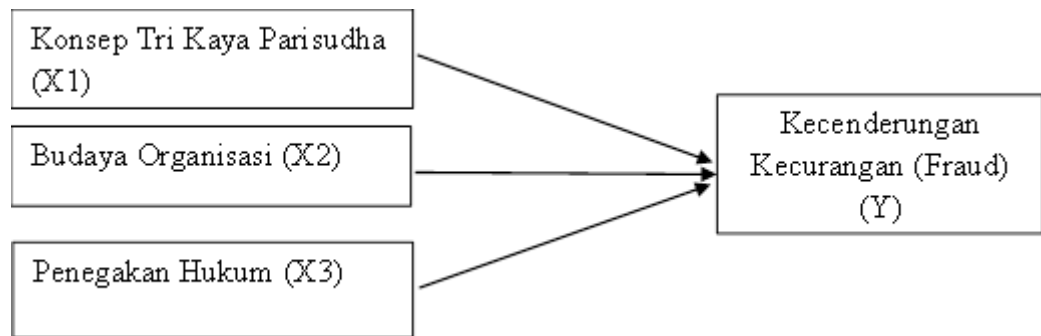
Marsini, dkk (2019) menjelaskan bahwa kesadaran akan hukum bisa muncul ketika sebuah penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik dan benar. Dalam PERDA No. 3 Th. 2017 mengenai LPD, dijelaskan pada Bab VII bahwa LPD wajib menjalankan operasional berdasar dengan awig-awig, Pararem Desa, dan PERDA. Secara umum, penegakan hukum memiliki pengaruh terhadap kecurangan yang merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartani (2021) dan Wiguna (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan hukum memiliki dampak yang merugikan dan penting terhadap kecenderungan untuk melakukan kecurangan.

H3: Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada LPD Se-Kecamatan Kuta Selatan

METODE PENELITIAN

Kerangka berfikir yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Populasi yang terjadi adalah semua karyawan LPD di Kecamatan Kuta Selatan yang mana berjumlah 282 orang yang terdiri dari 8 LPD, data tersebut berdasarkan informasi dari LPLPD Kabupaten Badung. Rumus untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin dan mendapatkan hasil 74 responden. Untuk menentukan jumlah sampel untuk setiap LPD dengan teknik *Proportionate Stratified random sampling*. Adapun teknik analisis data yang digunakan:

1. Uji Validitas, sebuah survei dianggap valid jika pertanyaan dalam kuesioner dapat mengatakan sesuatu yang terukur (Ghozali, 2016). Validitas kuesioner untuk masing-masing variabel terlihat dari skor korelasi Pearson, yaitu $< 0,30$.
2. Uji Reliabilitas, (Ghozali 2016) menjelaskan bahwa sebuah data dapat dipercaya ketika mampu menghasilkan hasil yang sama dari waktu ke waktu.
3. Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran secara umum data penelitian dengan menunjukkan nilai tertinggi, nilai terkeci, rata – rata, dan standard deviasi dari data setiap variabel penelitian

4. Uji normalitas wajib dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa data yang dianalisis memiliki sebara yang normal dimana data ini akurat dan t dapat dipertanggungjawabkan.
5. Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan data tidak ada korelasi antara variabel bebas dengan Y. Nilai tolerance dan nilai variance factor (VIF) dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas.
6. Uji heteroskedastisitas bertujuan memastikan bahwa data terbebas dari ketidak samaan varian yang dapat mengganggu hasil pengamatan.
7. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini akan menghasilkan persamaan: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$
8. Uji-F bertujuan untuk melihat kelayakan model penelitian dimana model penelitian yang baik harus membentuk hubungan simultan dengan taraf signifikansi tidak lebih tinggi dari 0,05.
9. Koefisien Determinasi (R²) ditujukan untuk melihat besaran pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2016).
10. Uji statistik t merupakan pengujian yang dilakukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian apakah dapat diterima atau ditolak (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Konsep Tri Kaya Parisudha	74	20.00	30.00	26.1622	2.41018
Budaya Organisasi	74	16.00	25.00	20.3514	1.91914
Penegakan Hukum	74	18.00	25.00	21.1892	1.75699
Kecenderungan Kecurangan (Fraud)	74	9.00	26.00	14.6622	3.65377
Valid N (listwise)	74				

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil analisis deskriptif:

1. Variabel Tri Kaya Parisudha nilai terkecil yang dicapai 20.00 dan nilai tertinggi 30.00 dengan nilai rata-rata 26.1622 dan memiliki standar deviasi sebesar 2.41018.
2. Variabel Budaya Organisasi memperoleh hasil nilai terendah 16.00 dan nilai terbesar 25.00 dengan nilai rata-rata 20.3514 dan memiliki standar deviasi sebesar 1.91914.
3. Variabel Penegakan Hukum memiliki nilai terkecil 18.00 dan nilai tertinggi 25.00 dengan nilai rata-rata 21.1892 dan memiliki standar deviasi sebesar 1.75699.

4. Variabel Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) menghasilkan nilai terendah 9.00 dan nilai tertingginya 26.00 dengan nilai rata-rata 14.6622 dan memiliki standar deviasi sebesar 3.65377.

Pengujian instrument penelitian menunjukkan data penelitian layak digunakan karena akurasi data baik dimana korelasi nilai masing – masing indikatornya diatas 0,30 atau lolos uji validitas. Penelitian ini juga lolos uji reliabilitas dimana nilai alpha varaiabelnya sudah berada diatas 0,60. Dari hasil uji penerimaan klasikal diketahui bahwa data berdistribusi normal Juga tidak ada gejala yang mengganggu pada bahan penelitian, karena uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil yang baik sehingga memungkinkan bahan penelitian untuk dipelajari lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38.044	4.448		8.553	.000
	Konsep Tri Kaya Parisudha	-.316	.130	-.276	-2.427	.018
	Budaya Organisasi	.043	.206	.025	.207	.836
	Penegakan Hukum	-.777	.204	-.464	-3.814	.000

(Sumber: Data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 38,044 - 0,316X_1 + 0,043X_2 - 0,777X_3 + e$$

Dari hasil pengujian analisis regresi, menunjukan besarnya koefisien determinasi penelitian adalah 0,339 berdasarkan nilai Adjusted R Square atau 33,9% kecenderungan kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh variabel konsep tri kaya parisudha, budaya organisasi dan penegakan hukum.

Hasil uji menunjukkan F_{hitung} sebesar 11,581 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dimana angka tersebut menunjukkan bahwasannya variabel bebas dalam penelitian memiliki hubungan simultan terhadap Y diaman model penelitian bisa dikaji lebih dalam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel tri kaya parisudha memiliki dampak yang merugikan dan penting terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya, semakin tinggi pemahaman dan praktik tri kaya parisudha, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Dalam *fraud triangle* dijelaskan bahwa pembenaran (*rationalization*) yaitu membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Setiap orang dalam organisasi sebaiknya menerapkan konsep tri kaya parisudha karena dengan penerapan tersebut akan membuat seseorang untuk berpikir, berkata, dan berperilaku yang baik sehingga pelaku

kecurangan tidak akan mencari alasan pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang diperbuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih rendahnya konsep tri kaya parisudha merupakan salah satu penyebab maraknya terjadi kecurangan pada organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Savitri (2017) dan Novi Anesya Dewi (2021) yang menyatakan bahwa dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan merugikan antara konsep tri kaya parisudha dengan kecenderungan untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi tidak efektif dalam meminimalkan terjadinya kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya budaya organisasi tidak menjamin kecenderungan kecurangan akan menurun. Kecenderungan untuk melakukan kecurangan timbul dari dalam diri individu dan tergantung pada motivasi yang dimilikinya. Hasil penelitian ini didukung oleh Hartani (2021) yang menyatakan bahwa tingkat etika dalam budaya organisasi yang dimiliki karyawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Kecenderungan untuk melakukan kecurangan muncul dari dalam diri individu dan tidak dapat dijamin tidak terjadi meskipun individu tersebut awalnya memiliki norma dan etika yang baik. Selain itu, kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perubahan dalam perilaku.

Variabel penegakan hukum membentuk hubungan negatif dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penegakan hukum maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) akan menurun. Pegawai di LPD menyadari tentang keberadaan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan-peraturan yang dimaksud mencakup peraturan-peraturan LPD, aturan tradisional desa yang disebut awig-awig, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau hukum nasional. Namun, kurangnya kesadaran hukum dari mereka menyebabkan kecenderungan kecurangan tetap terjadi. Pada bab VII dalam PERDA No.3 tahun 2017 tentang LPD, dijelaskan bahwa LPD wajib menjalankan operasionalnya sesuai dengan aturan yang berlaku seperti awig-awig, Pararem Desa, dan PERDA. Tetapi, masih ada beberapa prajuru LPD yang tidak mematuhi sehingga ada pegawai LPD yang terjerat kasus hukum dan harus menjalani hukuman pidana. Hal tersebut sejalan bersamaan hasil penelitian Hartani (2021) dan Wiguna (2022) yang menyatakan penegakan hukum mempunyai pengaruh kurang baik dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian, semakin ketat penegakan

hukum, semakin besar kemungkinan untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari kecenderungan kecurangan (*fraud*).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep “tri kaya parisudha” dan “penegakan hukum” memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Sebaliknya, budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Diharapkan kepada seluruh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan agar semakin meningkat pemahamannya tentang bagaimana mengimplementasikan konsep Tri Kaya Parisudha dalam organisasinya, terutama pikiran (*manacika*) para pekerja LPD agar selalu baik, bersih dan dapat berpikir suci. Diharapkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat memperkuat dan meningkatkan hukum yang baik dan kuat sehingga kecurangan dapat diminimalkan. Tentunya dengan kekuatan penegakan hukum yang kuat dapat mengurangi kecenderungan kecurangan dan menimbulkan efek jera bagi para penipu.

Daftar Pustaka

- ACFE Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia, Association of Certified fraud Examiners
- Adinda, Y. M. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*fraud*) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Skripsi: Universitas Negeri Semarang*.
- Arnita, T., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2018). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Budaya Etis Organisasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud. *Jurnal Online Mahasiswa, 1*.
- Asmariyani, Anak Agung Rak. (2009). Tri Kaya Parisudha Sebagai Kontrol Sosial Perilaku Remaja Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Era Globalisasi dan Modernasi. *E-jurnal IHDN Denpasar*
- Asmariyani, A. A. R. (2012). Tri Kaya Parisudha Sebagai Kontrol Sosial Prilaku Remaja Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Era Globalisasi dan Modernisasi. *IHDN Denpasar, 1-16*.
- Asshiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Bhuana Ilmu Populer.
- Ariestina & Wahyuni. (2021). Pengaruh Penegakan Hukum, Moralitas Individu Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Accounting Fraud Pada LPD Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT, Vol : 12 No : 02*
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hartani, K., Dewi, G., Eka, P., & Marvilianti, D. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal,

- Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan di LPD (Studi Kasus pada Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng). *12(November)*, 444–450.
- Hayatunnupus, L. I., Mandasari, J., (2020). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum dan Komitmen Organisasi Terhadap Fraud Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Utan Dan Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa)*Vol. 2 No. 2, pp 49-57*.
- Marsini, Y. N. L., Sujana, E., Wahyuni, M. A. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Kabupaten Buleleng. *10(2)*.
- Mustikasari, D. P. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Novi Anesya Dewi, P. A., Tunga Atmadja, A. (2021). Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha, Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 2614–1930.
- Nusabali.com.<https://www.nusabali.com/berita/125624/didakwa-korupsi-rp-26m-ketua-lpd-ungasan-ajukan-keberatan>
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. (2017). Peraturan Daerah No. 3 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. (2019). Peraturan Daerah No. 4 Tentang Desa Adat di Bali
- Pristya D. & Wahyuni A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Empiris Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng). *1, 390–401*.
- Pujayani, P. E. I., & Dewi, P. E. D. M. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 12, 865–876*.
- Putra & Latrini (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Pada Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Di Lpd Se-Kabupaten Gianyar. *25, 2155–2184*.
- Rahmawati, E. Sarwani, Rasidah, Yulastina, M. (2020). Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*
- Robbins, Stehen P. (2008). Perilaku Organisasi. Jilid II. Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, K. A. A., Edy Sujana, S. E., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Budaya Tri Kaya Parisudha, Proteksi Awig-Awig, Dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di

- Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Sulistiyowati, Firma. (2007). Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11 (1), 47-66.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). "Akuntansi Forensik & Audit Investigatif". Jakarta.Salemba Empat.
- Wiguna, K. Y., & Devi, S. (2022). Pengaruh Penegakan Hukum, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Asimetri Informasi terhadap Accounting Fraud (Studi Kasus pada LPD Se-Kecamatan Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika Undiksha*, 12(2), 459–469.
- Wilda Fitri, Cut Ismi. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud.
- Zainuddin. (2016). Efektifitas Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Universitas Khairun Ternate, Vol. 7, No 1*.
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem

Ni Kadek Ayu Ratih Pratiwi⁽¹⁾

Ni Wayan Yuniasih⁽²⁾

I Putu Fery Karyada⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
email: ayuratih102@gmail.com

ABSTRACT

The problems examined in this study used qualitative methods. Data analysis is the process of searching for and systematically compiling research findings from interviews, documentation and field data. The results of the research findings can be interpreted more deeply to find meaning so that conclusions can be drawn so that the results of the research can be understood. Based on data collected from various village documents regarding the management of the Village Fund in 2021, it was found that village infrastructure development activities were financed from village funds, community empowerment activities which were dominated by posyandu, posbindu activities and organizing village health alerts. In the field of public works and spatial planning, environmental road maintenance, in residential areas, community empowerment and urgent disaster management. In this regard, village funds provided by the central government are a mandate that must be properly managed and carried out by every village that receives them in order to realize social justice that ends in the welfare of the villagers as aspired by the entire Indonesian nation.

Keywords: Village Fund, Management, Government

PENDAHULUAN

Desa dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu manusia yang berada dalam satu area, menetap, tumbuh bersama dalam waktu yang lama, serta mempunyai sistem pemerintahan individual dengan pemimpin seorang kepala desa, pemerintahan sebuahnya memiliki dan menetapkan regulasinya sendiri sebagai dasar pemerintahan sebuah desa (Kuesnaedi, 2016). Kepala pemerintahan desa dibantu berbagai perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik pembangunan fisik dan non fisik dari desa tersebut. Fungsi desa yang sangat kompleks bagi suatu negara membuat negara Indonesia berkomitmen untuk membangun desa yang kuat, dengan memberdayakan seluruh desa yang ada di Indonesia dengan tujuan menjadikan desa kuat, mandiri, dan semakin maju sebagai landasan yang kokoh bagi pemerintahan negara. Hal tersebut diwujudkan pemerintah pusat dengan pemberian dana stimulus demi mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan pembangunan desa yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri sehingga diharapkan dapat adil dan merata sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa tersebut (Ulumuddin, 2018).

Menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sumber dari dana desa yang diberikan pemerintah pusat adalah APBN dengan besaran yang berbeda sesuai masing-masing desa, tetapi secara keseluruhan dana tersebut cukup besar yang memerlukan kontrol dan mekanisme penggunaan yang jelas, bagi dari masyarakat maupun pemerintah agar mencapai sasaran yang tepat. Berdasarkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) tentang Desa menyatakan dana desa jumlahnya mencapai Rp. 1,4 miliar yang diharapkan dapat dikelola dengan baik dan professional, menghindari kecurangan dalam penyaluran dan pengelolaan, serta penyimpangan yang mungkin terjadi. Melihat besarnya dana desa yang diberikan kepada setiap desa, pemerintahan desa memiliki peranan yang besar dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Alokasi Desa dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana ini dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk operasi dan aparatur pemerintahan desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa dengan transparan, akuntabel, dan terlibat, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa, yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Sejak diberlakukannya penganggaran bagi dana desa yang bersumber dari ABPN, kemudian disalurkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia. Desa di Kabupaten Karangasem juga mendapatkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, dari 75 Desa di Kabupaten Karangasem salah satunya adalah Desa Selumbang yang mendapatkan dana sejak tahun 2015. Desa Selumbang merupakan salah satu desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang secara bertahap dana desa yang diterima mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, adanya hal tersebut Desa Selumbang dalam hal ini pemerintahan desanya dituntut mampu menunjukkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar penggunaan dana desa mampu mensejahterakan masyarakat desa. Pada tabel berikut disajikan besar dana desa yang diterima Desa Selumbang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem selama periode tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Besar Dana Desa Yang Diterima Desa Selumbung, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem

No	Tahun	Besar Dana	Surat Keputusan
1	2017	704.406.020	Peraturan Bupati Karangasem No. 46 Tahun 2017
2	2018	905.035.900	Peraturan Bupati Karangasem No. 52 Tahun 2018
3	2019	862.346.000	Peraturan Bupati Karangasem No. 3 Tahun 2019
4	2020	875.604.400	Peraturan Bupati Karangasem No. 24 Tahun 2020
5	2021	898.592.000	Peraturan Bupati Karangasem No. 3 Tahun 2021

Sumber: www.jdih.karangasemkab.go.id, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat setiap tahun dana desa yang diterima Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahun. Berdasarkan (Pemerintah Kabupaten Karangasem, 2021) yang memuat tentang Tata Cara pengalokasian dan penetapan rincian penganggaran dana desa di setiap desa pada tahun 2021, memuat perhitungan detail rasio-rasio yang digunakan sebagai pertimbangan pemberian dana desa seperti penduduk, wilayah, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah, rasio tingkat kesulitan geografis yang dimiliki masing-masing desa. Besarnya dana desa yang diterima Desa Selumbung tahun 2021 sebesar Rp. 898.592.000, yang dialokasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Selumbung, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No	Bidang	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
I	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1	Pendidikan	21.600.000	21.600.000	-	100
2	Kesehatan	162.955.000	150.755.300	12.189.700	92,52
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	406.514.430	399.915.420	6.699.010	98,35
4	Kawasan Pemukiman	38.622.570	38.622.570	-	100
II	Pemberdayaan Masyarakat				
1	Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
III	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
1	Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
2	Keadaan Darurat	-	-	-	-
3	Keadaan Mendesak	268.800.000	268.800.000	-	100
	Total	898.592.000	879.703.290	18.888.710	97,89

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa dana desa yang diterima Desa Selumbung, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sebagian besar dialokasikan/dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa hal tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diutamakan dalam penggunaan dana Desa Selumbung yang pengalokasiannya disesuaikan dengan tujuan dari pembangunan desa agar merata yaitu sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan kawasan pemukiman. Pada data tersebut juga terlihat realisasi pada sub bidang kesehatan belum terserap secara keseluruhan yaitu sebesar 92,52% dan pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang memiliki alokasi dana paling besar sebesar Rp. 406.514.430, tetapi realisasi penyerapannya sebesar Rp. 399.915.420 atau hanya mencapai 98,35% dari dana yang dianggarkan. Desa Selumbung pada tahun 2021 juga membuat anggaran keadaan mendesak sebesar Rp. 268.800.000 dengan realisasi 100%, anggaran tersebut digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid 19, dikarenakan pada tahun 2021 dampak pandemi masih dirasakan masyarakat Desa Selumbung.

Sejak pencairan dana desa di Desa Selumbung digunakan sebagai dana perbaikan infrastruktur desa terutama jalan desa dan fasilitas lain. Tetapi, berdasarkan fakta dilapangan beberapa proyek perbaikan jalan desa yang dialokasikan menggunakan dana desa banyak dikeluhkan masyarakat, karena beberapa jalan wilayah banjar masih belum mendapatkan perbaikan, keterlambatan pengerjaan proyek perbaikan jalan desa yang di beberapa titik masih terlihat belum rampung. Hal ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat karena seharusnya dana tersebut digunakan untuk meningkatkan perekonomian desa, dimana Desa Selumbung memiliki potensi wisata yang menjanjikan seperti Air Terjun Yeh Labuh Selumbung, Dulkaso, Selumbung Hill, ATV Selumbung yang membutuhkan akses jalan yang baik untuk memudahkan pengembangan kawasan wisata tersebut.

Banyaknya potensi yang dimiliki Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem serta adanya berbagai perbaikan infrastruktur desa terutama jalan raya dengan menggunakan anggaran yang begitu besar dari pemerintah pusat, sehingga pengelolaan dana desa tersebut perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan dan pelaporan yang harus jelas dimana hal tersebut diamanatkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 sehingga setiap dana desa yang digunakan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan di Permendagri tersebut untuk dapat ditinjau kembali oleh BPKP sehingga pengelolaan dana lebih bersifat transparan dan menghindari terjadinya kecurangan khususnya pada Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Karangasem.

Permasalahan yang diteliti perlu dirumuskan dengan jelas agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditetapkan, yaitu: bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Selumbung Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem?

Adanya rumusan masalah, menuntut ditetapkannya tujuan yang jelas dari penelitian, yaitu: untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Selumbung Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Desa dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu manusia yang berada dalam satu area, menetap, tumbuh bersama dalam waktu yang lama, serta mempunyai sistem pemerintahan individu dengan pimpinan seorang kepala desa, pemerintahannya memiliki dan menetapkan regulasinya sendiri sebagai dasar pemerintahan sebuah desa (Kuesnaedi, 2016). Desa dapat didefinisikan sebagai hubungan antar masyarakat sebagai individu yang saling terikat dalam tradisi dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam sifat gotong royong (Adsyah, 2022). Desa sudah mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan menjalankan pemerintahan desa berlandaskan dasar hukum tersebut, dikepalai oleh kepala desa serta diawasi Badan Permusyawaratan Desa sesuai yang termuat dalam Undang-Undang (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) yang kemudian dalam pelaksanaannya sebagai warga negara Indonesia yang baik seluruh masyarakat harus memahaminya (PARSO, 2018).

Pemerintah Desa

Sebuah desa melaksanakan pemerintahannya dengan bantuan perangkat desa dan dikepalai seorang kepala desa (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014). Dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, pemerintah daerah harus dapat mengembangkan kebijakan yang mampu mendorong masyarakat dan pelayanan publik, serta pembangunan desayang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa penjabat kepala desa sebagaimana disebutkan pada ayat (6) bertanggung jawab untuk melaksanakan pembentukan desa persiapan, yang mencakup: (a) penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis, (b) pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang didanai oleh APBDes induk, (c) pembentukan struktur organisasi, (d) pengangkatan perangkat desa, (e) menyediakan fasilitas dasar.

Dana Desa

Menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sumber dari dana desa yang diberikan pemerintah pusat adalah APBN dengan besaran yang berbeda sesuai masing-masing desa, tetapi secara keseluruhan dana tersebut cukup besar yang memerlukan kontrol dan mekanisme penggunaan yang jelas, bagi dari masyarakat maupun pemerintah agar mencapai sasaran yang tepat. Dana desa yang penggunaannya dengan tepat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, ataupun kejadian lain yang tidak diinginkan.

Pengelolaan Keuangan Desa

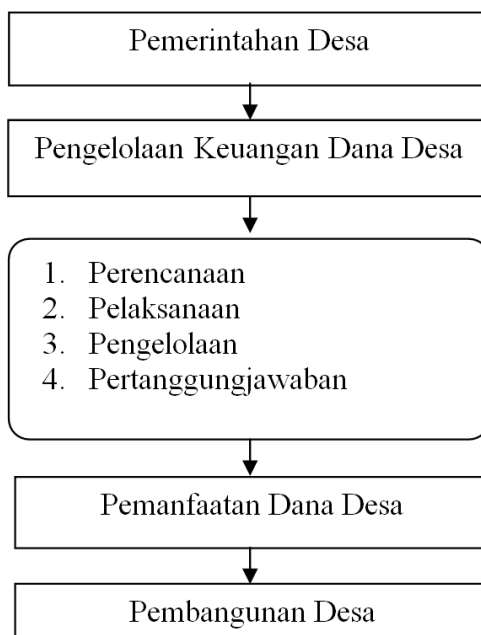
Dana desa yang dikelola, menurut (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) merupakan salah satu bentuk tata kelola keuangan milik desa dengan seluruh kegiatan pengelolaannya seperti pembuatan rencana, penatausahaan, pelaksanaan kegiatan, serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaannya dengan cermat dan teliti agar terhindar dari penyimpangan mengingat dana yang digunakan ditunjukkan untuk kesejahteraan bersama masyarakat desa secara menyeluruh (Arif, 2017).

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian (Milasari, 2022) yang meneliti pengelolaan dana desa di Desa Palakka dalam peningkatan pembangunan desa kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil pembangunan. Penelitian (Panitikan, 2021) menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang, tetapi kenyataannya ada proses yang terlambat yaitu pembuatan laporan dan pertanggungjawaban. Penelitian (Masni, 2020) menarik kesimpulan bahwa rencana yang disiapkan dalam mengelola dana Desa Dulangaye sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan pada permendagri No. 113 Tahun 2014. Penelitian (Machfiroh, 2019) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Benua Tengah dan menarik kesimpulan bahwa Desa Benua Tengah telah melaksanakan tahapan yang jelas serta pengelolaan yang akuntabel sesuai peraturan. Penelitian (Sunaryadi & Yulianto, 2021) dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan menarik kesimpulan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan Desa Jembrak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini meneliti bagaimana pengelolaan keuangan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dengan kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
 Sumber: Masni (2020)

Menurut (Sugiyono, 2020) data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen atau arsip. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, bendajara desa, kaur keuangnm, dan kaur perencanaan Desa Selumbung. Menurut (Ghozali, 2018) analisis data pada penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penyusunan temuan penelitian melalui data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasi yang didapatkan di lapangan. Menurut (Milles & Huberman, 2017) pada analisis data kualitatif memiliki tiga alur yang dapat dilakukan secara bersamaan, mulai dari pengumpulan data, kemudian data disajikan dalam bentuk deskripsi, serta dari data tersebut dapat diambil kesimpulan untuk dilakukan verifikasi dari kesimpulan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Desa Selumbung dalam penyelenggaraan pemerintahannya melakukan penyusunan program yang mendukung peningkatan bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi masyarakat. Hal tersebut dimulai dari adanya Musrenbang. Hal tersebut dilakukan untuk

menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kaur Perencanaan Desa Selumbung dalam wawancara sebagai berikut.

“Untuk proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan menjadi prioritas masyarakat Desa Selumbung dalam hal ini Desa Selumbung membutuhkan peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat desa, sehingga itu yang menjadi fokus kami dalam agenda perencanaan anggaran dana desa tahun 2021”.

Pemerintah Desa Selumbung telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat dan lembaga-lembaga di desa untuk membuat RPJM dan RKP Desa. Musrenbang Desa Selumbung diadakan setiap tahun di bulan Juli, dan dihadiri oleh BPD dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa untuk diprioritaskan di masa depan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Selumbung dalam wawancara sebagai berikut.

“Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa kami selalu melibatkan masyarakat dalam hal ini BPD beserta tokoh masyarakat sebagai perwakilan dalam musyawarah atau Musrenbang yang dilakukan di Kantor Desa Selumbung, tujuannya agar setiap perwakilan masyarakat dapat menyampaikan saran dan apa yang dibutuhkan masyarakat di wilayahnya, yang nantinya dapat mewujudkan penyelenggaraan kegiatan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Desa Selumbung”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Selumbung melibatkan aparatur pemerintah Desa Selumbung dan masyarakat melalui BPD dan tokoh masyarakat dalam musyawarah/Musrenbang Desa Selumbung dengan tujuan mendapatkan saran dan masukan mengenai apa yang dibutuhkan dan yang perlu di prioritaskan dalam penganggaran dana desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Setelah perencanaan dilakukan, maka selanjutnya pemerintah Desa Selumbung harus melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan melalui Musrenbang. Disinilah dimulai peran sekretaris desa serta kepala urusan yang membidangi keuangan, perencanaan, dan umum mulai melaksanakan tugasnya dalam kegiatan yang disesuaikan dengan RAB kegiatan di Desa Selumbung. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Kaur Keuangan Desa Selumbung yang menyatakan sebagai berikut.

“Pelaksanaan penerimaan pendanaan dilaksanakan bersama-sama oleh kepala urusan yang membidangi keuangan, perencanaan, dan umum dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terutama RAB kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan disaat pendanaan sudah diterima, untuk menjaga transparansi kegiatan, pembuatan spanduk yang memuat data kegiatan dari dana, jenis kegiatan, hari kerja, dan penghabisan dana semua di sampaikan pada spanduk tersebut sehingga masyarakat tahu anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan di Desa Selumbung”.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sekdes Selumbung menyatakan APBDesa yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Selumbung segera melaksanakan rencana kerja Pemerintah Desa. Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Selumbung melakukan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten Karangasem melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang diambil yaitu prinsip kegiatan pelaksanaan kegiatan Desa Selumbung dengan sumber keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Hal ini terlihat pada telah adanya RAB kegiatan yang akan dilaksanakan, pencatatan setiap kegiatan, serta dibuatnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang disampaikan kepada masyarakat berupa pemasangan spanduk kegiatan yang dilaksanakan, dan pelaporan kepada instansi terkait seperti Camat Manggis dan Bupati Karangasem.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut wawancara dengan Bendahara Desa Selumbung, penatausahaan bertanggung jawab atas penerimaan dana di Desa Selumbung. Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu bank untuk mencatat penerimaan dana yang bersifat transfer. Pada tahun 2021, pemerintahan Desa Selumbung yang memiliki usaha kecil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES), yang diberikan oleh BPKP. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut.

“pencatatan yang saya lakukan di buku khusus untuk mencatat penerimaan, berbeda dengan buku untuk pengeluaran, serta buku dalam membantuk pencatatan kas, dan surat-surat lainnya seperti surat permintaan pembayaran. Semuanya digabungkan ke dalam aplikasi SISKUEDES atau disebut Sistem Informasi Keuangan Desa, yang diberikan oleh BPKP. Ini membuat proses catatan lebih mudah dan hasilnya lebih akuntabel”.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Keuangan, dia menyatakan bahwa Bendahara Desa Selumbung bertanggung jawab atas pengeluaran Desa. Semua uang yang dikeluarkan oleh Desa Selumbung adalah tunai, dan bendahara memakai buku kas Buku Kas Umum dan Pembantu Bank dalam mencatat pengeluaran. Semua pengeluaran dicatat dalam kwitansi

pengeluaran. Belanja desa didokumentasikan dengan tanda terima atau nota dan dimasukkan ke dalam buku kas umum. Bendahara desa juga mencatat potongan atau pemungutan pajak dari transaksi ke dalam buku pembantu pajak. Swakelola membantu tenaga kerja lokal di desa dan memaksimalkan penggunaan material atau bahan lokal untuk membeli barang atau jasa. Tujuan swakelola adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Selumbung dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, terlihat dari penerimaan dan pengeluaran/ penggunaan dana desa telah dilakukan dengan baik menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES) yang berasal dari BPKP sehingga setiap kegiatan dapat tercatat dengan baik dan menghasilkan laporan yang lebih akuntabel.

Pelaporan Pertanggung Jawaban Dana Desa

Siklus pengelolaan keuangan desa yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban keuangan. Kepala Desa Selumbung harus menyampaikan laporan ini dalam rangka melaksanakan tugasnya serta kewajibannya sebagai seorang kepala desa yang melakukan pengelolaan keuangan dana desa. Laporan pertanggungjawaban ini dikirim secara berkala setiap semester dan setiap tahun ke Bupati dan kadang-kadang ke BPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Selumbung, dalam wawancara sebagai berikut.

“untuk laporan yang saya buat untuk disampaikan pemerintah desa kepada pemerintah yang lebih tinggi, khususnya Bupati Karangasm, termasuk laporan tentang pelaksanaan APBDesa setiap semester, laporan tentang penggunaan Dana Desa, laporan tentang hasil pajak, dan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran”

Hal tersebut juga didukung dari pernyataan Sekretaris Desa Selumbung dalam wawancara sebagai berikut.

“Kepala Desa Selumbung harus membuat dan memberikan laporan keuangan yang digunakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun, ADD, Dana Desa, dan Laporan persemester sebagai proses terakhir dari siklus pengelolaan dana desa dalam satu periode tahun anggaran, yang nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraanya, apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu dirubah”.

Setiap akhir bulan, Bendahara Desa Selumbung menutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ, yang termuat dalam syarat-syarat dokumen yang harus dilengkapi dalam penggunaan dana bersumber dari dana desa, ADD, dan hasil dana pemungutan pajak retribusi daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan yang dikirim oleh Pemerintah Desa

Selumbung kepada Bupati (melalui Camat Manggis) terdiri dari laporan realisasi penggunaan APBDesa setiap semester, laporan tentang penggunaan Dana Desa, laporan tentang penggunaan ADD, laporan tentang hasil pajak, dan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Selumbung terdiri dari laporan semesteran pertama dan laporan semesteran kedua tentang penggunaan APBDesa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Perencanaan pengelolaan Dana Desa pada Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dilakukan melalui penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Selumbung melibatkan aparatur pemerintah Desa Selumbung dan masyarakat melalui BPD dan tokoh masyarakat dalam musyawarah/ Musrenbang Desa Selumbung dengan tujuan mendapatkan saran dan masukan mengenai apa yang dibutuhkan dan yang perlu di prioritaskan dalam penganggaran dana desa. Pelaksanaan penerimaan dana desa pada Desa Selumbung dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, terlihat pada telah adanya RAB kegiatan yang akan dilaksanakan, pencatatan setiap kegiatan, serta dibuatnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang disampaikan kepada masyarakat berupa pemasangan spanduk kegiatan yang dilaksanakan, dan pelaporan kepada instansi terkait seperti Camat Manggis dan Bupati Karangasem. Pengelolaan keuangan desa di Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem cukup transparan karena pemerintah desa telah menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES) yang berasal dari BPKP, pengumuman yang sesuai dengan peraturan, dan pelaporan kepada masyarakat. Pemerintah desa tidak menyampaikan informasi di media massa dalam waktu yang ditetapkan oleh undang-undang pada tahap pertanggungjawaban kepada masyarakat. Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 37 dan 38, yang mengatur pembuatan pertanggungjawaban dan laporan dalam pengelolaan keuangan desa (BPKP), telah diatur. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan dilaksanakan dengan baik.

Saran yang dapat diberikan yaitu: Pengelola keuangan desa, terutama Pemerintah Desa Selumbung, diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber informasi untuk mempertahankan transparansi dan rasa tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam melaporkan dan mengumumkan program-program kegiatan yang dianggarkan dalam APBKal. Diharapkan juga agar informasi lebih cepat diberikan kepada masyarakat. Diharapkan penelitian lebih lanjut akan melihat pengelolaan keuangan desa dari perspektif perangkat desa dan informan dari masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan swadaya,

dan BPDDes yang berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penerima manfaatnya.

Daftar Pustaka

- Adsyah, R. (2022). *Klasifikasi Desa: Pengertian, Ciri-ciri, Potensi, Beserta Contohnya*.
- Arif, M. (2017). *ata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. ReD Post Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP-UNDIP.
- Kuesnaedi. (2016). *Membangun Desa*. Penebar Swadaya.
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Rnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1), 14–21.
- Masni. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. *Journal of Technopreneurship*, 1(1), 58–68.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Milasari, A. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Palakka*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Milles, & Huberman. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Panitikan, S. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pemb Angunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- PARSO. (2018). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA*.
- Pemerintah Kabupaten Karangasem. (2021). *Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryadi, T. S., & Yulianto, H. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Kompak: Jurnal Ilmiah*, 14(1), 154–159.
- Ulumuddin, A. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Pada Kantor Desa Sekecamatan Nusa Penida)

Dewa Ayu Nita Melinda Sari⁽¹⁾

I Wayan Sudiana⁽²⁾

Putu Cita Ayu⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: Melinda@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Role of Village Officials, the Competence of Village Fund Management Officials, and the Utilization of Information Technology on the Accountability of Village Fund Management (Case Study: at the Village Office of the Nusa Penida District). The population in this study were all village officials, totaling 213 officials in the Nusa Penida District, Klungkung Regency, with a total of 16 villages in the Nusa Penida District. The number of samples in this study were 128 people who were determined by purposive sampling technique and tested using multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that the Role of Village Officials has a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability. The competence of village fund management officials has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. The use of information technology has a positive and significant effect on the accountability of managing village funds. Seeing the results of the research, in the future the village apparatus must continue to be given job training which can increase the ability of the apparatus. Increasing the capacity of existing resources in village institutions will make village fund management accountability better.

Keywords: Village Devices, Competence of Village Fund Managers, Utilization of Information Technology, Accountability of Village Fund Management

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tentang Desa membuat Pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan desa sebagai gerbang pembangunan nasional dengan menerbitkan desa memiliki hak khusus yang disebut otonomi desa, diamna desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri guna membangun dan memajukan perekonomian desa serta meningkatnya taraf hidup masyarakatnya. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan bahwa "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat".

Provinsi Bali sebagai salah satu penerima dana desa yang dibagikan kepada 636 desa se-Bali, pada tahun 2015 alokasi dana desa untuk provinsi Bali sebesar 185 miliar, tahun 2016 meningkat menjadi 416 miliar, lalu tahun 2017 menjadi 537 miliar, sedangkan tahun 2018 menurun 7 miliar menjadi 513 miliar, tahun 2019 kembali naik menjadi 630 miliar, dan untuk tahun 2020 sebesar 657 miliar (www.djpk.depkeu.go.id). Dana desa yang cukup besar ini membuat kekhawatiran dan kesiapan desa dalam mengelola dana desa yang dialokasikan. Begitu banyak terbukti bahwa ditemukannya penyelewengan dana desa yang digunakan untuk memperbaiki kantor desa. Dana desa hanya di peruntukkan untuk kepentingan masyarakat desa dengan adanya kasus-kasus penyelewengan dana desa oleh karena itu adanya akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Proses pengelolaan dana desa telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasarkan akuntabel, partisipatif dan transparansi. Pengelolaan dana desa diperlukan untuk memenuhi adanya aspek pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemilik otoritas dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat. Hal ini memberikan isyarat bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*) yang dimiliki oleh seseorang. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi. Sehingga peran perangkat desa yaitu untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Dewi dan Gayatri, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi juga dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya

(Perdana, 2018). Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik agar layanan publik tidak mahal dapat secara mudah di akses oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu perlunya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran perangkat desa, kompetensi aparat pengelola dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Sekecamatan Nusa Penida karena ditemukan masalah di Kecamatan Nusa Penida, tepatnya di Desa Toyapakeh, Nusa Penida. Terjadi kasus rekayasa atau pengkondisian keadaan BUMDes yang seharusnya mengalami kerugian namun dibuat seolah – olah memperoleh keuntungan sehingga uang sisa hasil usaha (SHU) tetap dapat dibagikan kepada para penerima SHU termasuk kepada para pengurus BUMDes itu sendiri. Kasus ini mulai terungkap dan diselidiki Kejari Klungkung pada Rabu, 28 September 2022 dengan melibatkan 27 orang yang menduduki jabatan pengurus BUMDes, badan pengawas desa, karyawan BUMDes, para RT/RW di lingkungan Desa Kampung Toyapakeh, dan bendahara desa. Dalam penyidikan yang dilakukan ditemukan selisih kas dalam neraca per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 930.797.866 (<https://wartabalionline.com/>).

Dengan adanya fenomena ini, maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena peran perangkat desa adalah salah satu organ penting dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa dana desa harus dikelola secara akuntabel. Untuk bisa mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik tentu saja perlu unsur perangkat desa yang benar-benar mumpuni dan berkompeten agar tidak ada penyalahgunaan dana. Melihat fenomena yang terjadi ini, maka peneliti memutuskan untuk memilih Kecamatan Nusa Penida sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait pengelolaan dana desa dengan judul **“Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: pada Kantor Desa Sekecamatan Nusa Penida).**

KAJIAN PUSTAKA

Implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaandana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipial) untuk mengelola dana desa. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipial adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya suatu penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen. Adapun teori yang mendukung selain *theory agency* yaitu *stewardship*. Menurut Davis dan Donaldson (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya.

Akuntabilitas yang baik ditunjukkan oleh adanya sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu (Lestari et al., 2019). Akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada aparatur desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Noordiawan, 2006:34). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada BAB 1 pasal 1 ayat 5 dalam peraturan Menteri ini, yang maksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyunusan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan (Mada, 2017).

Menurut Perdana (2018) Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan keadaan atau sikap seprang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Menurut Eka Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017) Teknologi Informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (hardware dan software), database, jaringan, dan jenis lainnyayang berhubungan dengan teknologi.

Penelitian yang dilakukan Noviantra dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Ada pengaruh positif dan signifikan dari Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa. Nainggolan (2018) menyatakan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa yang dapat menjalankan perannya dengan baik akan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apriliya (2020) menyatakan kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Atiningsih (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rismawati (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dimana dijelaskan akuntabilitas tidak bisa tercipta hanya karena kompetensi dari aparat pengelola dana desa saja. Sugiarti dan Yudianto (2017). Melakukan penelitian yang menyatakan pemamfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Safitri, Sarah dan Taufik (2020) menyatakan pemamfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pengelolaan dana desa.

Perangkat desa adalah suatu penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa atau melaksanakan tugas dan wewenang pada penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Adapun variabel ini menggunakan *Teori Stewardship* menjelaskan bahwa, prinsipal memberikan wewenang kepada steward untuk melakukan tugas sesuai apa yang telah diamanahkannya. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa serta bertanggungjawab atas pemamfaatan dana desa yang diberi oleh *principal*. Adapun hubungan Kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa untuk menjadikan dana desa lebih terbuka sehingga dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novindra (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁ : Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Perdana, 2018). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh

pemerintah pusat. pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi dan Gayatri, 2019).

Penelitian Mada *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelola dana desa semakin akuntabel. Dengan beroperannya perangkat desa maka pengelolaan dan desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017). Didukung oleh penelitian yang dilakukan Rosyidi (2018), Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

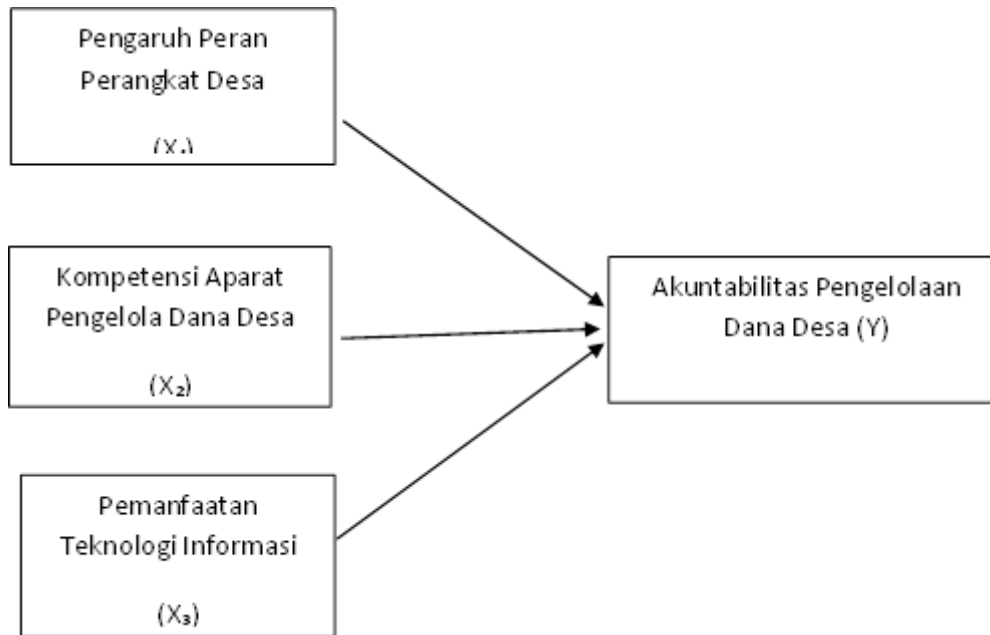
H₂ : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Perdana (2018) pemanfaatan teknologi informasi adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa telah dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017), serta hasil penelitian Nurkhasanah (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2013:55). Berdasarkan uraian tersebut, maka desain penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 213 orang aparatur yang berada di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan jumlah desa yaitu sebanyak 16 desa yang berada di Kecamatan Nusa Penida. Sampel penelitian ini diambil sejumlah 128 orang yang telah dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 126). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian dan demografi responden. Analisis statistik deskriptif digunakan memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji validitas adalah dimana suatu instrument dikatakan valid jika nilai *pearson correlation* terhadap skor total diatas 0,30 (Sugiyono, 2018).
2. Uji realibilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu menggunakan *cronbach alpha* (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik, untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan yang terdiri dari:

- a. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika terdapat data yang terdistribusi secara tidak normal maka uji statistik t tidak dapat diterapkan (Ghozali, 2016).
- b. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent (Ghozali, Iman, 2016). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).
- c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, Iman, 2016). Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji *Scatterplot*.

Uji Kelayakan Model

- a. Uji f menunjukkan apakah model layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini dan sebagai alat analisis dalam menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $\alpha < 0,05$ maka model regresi layak digunakan dan semua variabel independent dalam model ini dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).
- b. Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen. nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel (Ghozali, 2016).

Uji Hipotesis (uji t)

Uji statistik t (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner ke 16 desa yang berada di Kecamatan Nusa Penida, dengan jumlah perangkat desa sebanyak 213 orang. Dalam

pemilihan responden ini menggunakan kriteria yaitu Kepala Desa, sedangkan untuk Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan. Jumlah yang diperoleh berjumlah 128 responden. Dari hasil pengujian seluruh variabel memiliki nilai korelasi lebih dari 0,30 dan koefisien alpha lebih dari 0,60 dengan demikian semua instrumen tersebut adalah valid dan reliabel, sehingga layak dijadikan instrument penelitian. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan uji normalitas yang ditampilkan menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,101 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal.
2. Berdasarkan Hasil uji multikolinearitas seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dari model regresi yang digunakan.
3. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti pada model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Uji Analisis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.165	.729		-5.710	.000
Peran Perangkat Desa	.259	.085	.195	3.051	.003
Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa	.491	.057	.422	8.680	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.585	.089	.390	6.556	.000
R					.858
R Square					.736
Adjusted R Square					.725
Uji F					813.615
Sig. Model					.000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -4,165 + 0,259X1 + 0,461X2 + 0,585X3 + e$$

Dilihat dari tabel nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,725 atau 72,5% Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sisanya sebesar 27,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. hasil uji menunjukkan F hitung sebesar 813.615 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini berarti model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Berdasarkan analisis dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 3.051 dengan tingkat signifikansi 0,003, sehingga hipotesis alternatif H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perangkat desa menjalankan perannya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Perangkat desa adalah suatu penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa atau melaksanakan tugas dan wewenang pada penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Adapun variabel ini menggunakan *Teori Stewardship* menjelaskan bahwa, prinsipal memberikan wewenang kepada steward untuk melakukan tugas sesuai apa yang telah diamanahkannya. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa serta bertanggungjawab atas pemanfaatan dana desa yang diberi oleh *principal*. Adapun hubungan Kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa untuk menjadikan dana desa lebih terbuka sehingga dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Novindra (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan analisis dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 8.680 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga hipotesis alternatif H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki aparat pengelola dana desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai

dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Perdana, 2018). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Mada *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.

Berdasarkan analisis dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 6.556 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga hipotesis alternatif H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017), serta hasil penelitian Nurkhasanah (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Peran Perangkat Desa, Kompetensi aparat pengelola dana desa, dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kedepannya aparatur desa harus terus diberikan pelatihan kerja yang dapat membuat kemampuan dari aparatur semakin meningkat. Peningkatan dari kemampuan sumber daya yang ada pada lembaga desa akan membuat akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih baik. Pembekalan tentang cara kerja, tugas, dan wewenang dari aparatur desa juga harus dilakukan agar nantinya perangkat desa dapat bekerja sesuai dengan perannya, sehingga tercipta cara kerja yang lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dibarengi juga dengan penggunaan sistem informasi yang memadai pada setiap kantor desa agar

nantinya seluruh informasi dapat terangkum dan tersampaikan dengan baik melalui bantuan teknologi informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Andangatmadja. 2011. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Volume 01, No 1.
- Anggreni, Sumadi, Andayani W 2021. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja, dan peran perangkat desa terhadap kuntabilitas pengelolaan dana desa, di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. *Hita Akuntansi dan keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi juli 2021*.
- Aprilya, K.R. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gresik. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Atiningsih, Ningtyas. 2019. Pengaruh kompetensi Apatur Pengelolaa Dana Desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*. Volume 10 Nomor 1, Mei 2019. ISSN 2086-3748.
- Aulia, Putri. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal JOM FEB*, Volume 1.
- Balitribune. 2020. Dugaan penyelewengan Dana pembangunan pura.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Donalson, L, & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or Agency Theory: CEO Governance andl Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Febrian, Alamasyah 2020. Pengaruh kopetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas Dana Desa. Di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntabilitas dan Ekonomika*. Vol. 10, Desember 2020.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://wartabalionline.com/category/daerah/klungkung/>

- Mada, S., Lintje K., & Hendrik, G. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Hal. 106-115.
- Nainggolan, F. A. 2018. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Nurkhasanah, I. 2019. Pengaruh kompetensi sumber Daya Manusia, pemamfaatan Teknologi Informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan system laporan pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. BAB 1 Pasal 1 Ayat 5.
- Perdana, K.W. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Perdana, Khaeril. 2018. Pengaruh kompetensi Aparat pengelolaan dana desa. Sistem pelaporan pemerintah desa. Partisipasi Masyarakat. Dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rismawati, Tika (2019) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Other Thesis*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 4 (4).
- Sari, pradnyawati. 2021. Pengaruh kompetensi Aparat pengelolaan Dana Desa, komitmen organisasi pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa., Hita akuntansi dan keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi April 2021.
- Setiana, N. D., & Nur, L. Y. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. ISSN:2407-9189. Hal. 205-210.
- Sugiarti, E., & Ivan, Y. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabpaten Karawang). ISSN: 2252-3936. Simposium Nasional Akuntansi dan Bisnis Universitas Widyatama. Hal. 580-590.

Sugiarti, Ekasari dan Ivan Yudianto 2017. "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Proceedings*.

Sugiarti, yudianto. 2017. Analisis faktor kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Bandung, 20 juli 2017. ISSN- 2252-3936.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa

Pengaruh *Financial Technology* Berbasis *QRIS* Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Karangasem

Arya Agus Indra Dwi Parawangsa⁽¹⁾
Ni Putu Ayu Kusumawati⁽²⁾,
Ni Ketut Muliati⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: suryaagus116@gmail.com

ABSTRACT

This situation led to a significant number of employees in the tourism sector losing their jobs, compelling them to transition to Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs), resulting in rapid growth, particularly within the trade sector. This trend is substantiated by data reflecting the performance of MSMEs in Bali Province. The factors influencing the performance of MSMEs include QRIS-based financial technology and financial literacy. The primary objective of this study is to examine the impact of QRIS-based financial technology and financial literacy on the performance of MSMEs within the trade sector of Karangasem Regency. The study's target population comprises the total number of SMEs operating in the trade sector of Karangasem Regency, which amounts to 47,220. The sample size for this research consists of 100 MSME participants, determined using the Slovin formula and analyzed through multiple linear regression techniques. The research findings demonstrate a positive relationship between QRIS-based financial technology and MSME performance, as well as a positive association between financial literacy and MSME performance. Based on the research results, it is advisable for SMEs in the Trade Sector of Karangasem Regency to enhance their understanding of Financial Technology and Financial Literacy to maximize their performance.

Keywords: *QRIS-Based Financial Technology, Financial Literacy, MSME Performance*

PENDAHULUAN

UMKM, singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, merujuk kepada aktivitas bisnis yang dijalankan oleh warga dengan maksud untuk memperluas peluang pekerjaan dan memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat secara luas (Rafli, 2022). UMKM memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional dan juga dalam menyerap tenaga kerja. Signifikansi UMKM dalam national economy dapat diamati dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain berkontribusi pada pertumbuhan PDB di Bali, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah UMKM di wilayah tersebut berdasarkan Data Kinerja UMKM Provinsi Bali tahun 2023, dengan lebih dari 400.000 UMKM yang beroperasi pada tahun 2021.

Tabel 1.1 Data jumlah UMKM per Kabupaten Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah Data UMKM 2021
1	Buleleng	54,489
2	Jembrana	46,277
3	Tabanan	43,715
4	Badung	22,647
5	Denpasar	32,224
6	Gianyar	75,542
7	Bangli	44,123
8	Klungkung	35,792
9	Karangasem	57,456
	Total	412,265

Sumber : (*Data Keragaan UMKM Provinsi Bali*)

Bali, sebuah daerah di Indonesia, dikenal di seluruh dunia karena sektor pariwisatanya yang terkenal. Kabupaten Karangasem yakni salah dari satu tujuan pariwisata di Provinsi Bali. Meskipun demikian, wilayah ini tergolong sebagai salah satu daerah termiskin/terendah di Provinsi Bali, dengan tingkat (IPM) yang sangat rendah. Sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi di Kabupaten Karangasem, belum berhasil menghasilkan produk dengan nilai tambah yang signifikan. Kegiatan industri di wilayah ini didominasi oleh industri kecil dan kerajinan rumah tangga, terutama dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, namun produk-produknya belum memiliki daya saing global (Purnama et al., 2019). Kondisi ini disebabkan oleh kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem yang belum optimal. Selama pandemi Covid-19, UMKM di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 41,98%. Berikut adalah perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Karangasem dari tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1.2**Perkembangan jumlah UMKM di kabupaten Karangasem pada tahun 2017-2021**

No	Kabupaten Karangasem	Jumlah Data UMKM	Persentase Kenaikan
1	Tahun 2017	28.948	-
2	Tahun 2018	38.989	34,69 %
3	Tahun 2019	39.589	1,54 %

4	Tahun 2020	40.468	2,22 %
5	Tahun 2021	57.456	41,98 %

Sumber: (Data Keragaan UMKM Provinsi Bali, 2023)

Gambar 1.1 Pengguna QRIS di Provinsi Bali



Sumber : bankindonesia, 2021

Menurut data dari Bank Indonesia mengenai QRIS di Provinsi Bali, penggunaan QRIS didominasi oleh usaha mikro sebanyak 54%, diikuti oleh usaha kecil sebanyak 30%, usaha menengah sebanyak 11%, usaha besar sebanyak 4,6%, dan sektor lainnya sebanyak 0,3%. Dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, terutama di Kabupaten Karangasem, hanya sekitar 2% atau sebanyak 8.424 pelaku UMKM yang terlihat menggunakan QRIS.

Di Kabupaten Karangasem, telah dilakukan berbagai upaya pendidikan dalam bidang literasi keuangan. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Maret 2020, BPD Bali menggelar acara pengenalan literasi keuangan yang secara khusus ditujukan kepada pelaku UMKM. Bank BPD Bali memperkenalkan layanan keuangan digital yang saat ini sedang diupayakan untuk mendukung proses digitalisasi dengan mengurangi penggunaan transaksi tunai melalui pemanfaatan layanan QRIS. Pada tanggal 7 Januari 2022, BPR Mitra Bali Artha Mandiri mengadakan kegiatan edukasi dan literasi keuangan di SMKTI Bali Global. Hasil dari kegiatan edukasi ini membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang dunia perbankan, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat.

Kemudian, pada tanggal 5 Agustus 2023, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyelenggarakan edukasi tentang investasi ilegal di Karangasem. OJK hadir dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, upaya pencegahan, serta bantuan hukum jika diperlukan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financial technology* berbasis *Qris* terhadap Kinerja UMKM?
2. Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM?

KAJIAN PUSTAKA

Teori kontijensi adalah pandangan yang menyatakan bahwa UMKM dapat mencapai kinerja terbaiknya ketika struktur UMKM sesuai dan mampu menerapkan strategi yang disesuaikan dengan berbagai faktor seperti ukuran, teknologi, dan lingkungan bisnisnya. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memahami bagaimana UMKM dapat mencapai kinerja yang optimal dengan mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi mereka. Faktor internal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah proses pengembangan literasi keuangan, yang membantu UMKM menjelajahi peran dari struktur internal mereka. Sedangkan faktor eksternal, yang merupakan faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi kinerja UMKM, adalah Financial Technology (Fintech). Fintech berfungsi sebagai alat yang memberikan kemudahan dalam menjalankan proses bisnis, dan UMKM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi ini memiliki keunggulan dalam menghadapi persaingan bisnis yang kompetitif (Sari, 2022).

Financial Technology (Fintech) Merupakan sistem layanan keuangan yang bertujuan menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman sehingga mereka dapat sepakat untuk transaksi pinjaman dalam mata uang rupiah secara online melalui jaringan internet sebagai mediumnya. Pengembangan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan salah satu langkah untuk mempermudah konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi digital. Diharapkan bahwa implementasi teknologi ini akan menciptakan ekosistem belanja yang lebih sederhana, cepat, ekonomis, dan aman. Selain memberikan manfaat kepada konsumen, teknologi ini juga menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan para penjual. QRIS Indonesia memastikan bahwa semua jenis penjual, mulai dari UKM hingga perusahaan besar, dapat mengadopsi teknologi ini dalam operasional bisnis mereka.

Menurut Sari, Reza Wulan, dan Widodo, 2022, yang menginvestigasi dampak Literasi Keuangan, Modal Manusia, dan Financial Technology pada kinerja UMKM di Kabupaten Sleman, ditemukan bahwa literasi keuangan, modal manusia, dan teknologi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data menggunakan perangkat SPSS, di mana nilai signifikansi untuk setiap variabel adalah kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani dan Darmawan pada tahun 2020. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Financial Technology dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM dengan menyediakan solusi yang lebih mudah digunakan. Hal ini terjadi karena teknologi ini memudahkan pembayaran digital yang secara

otomatis mencatat semua transaksi pendapatan yang terjadi, memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman keuangan pelaku UMKM.

H1 : *Financial Technology* berbasis *Qris* berpengaruh terhadap kinerja UMKM

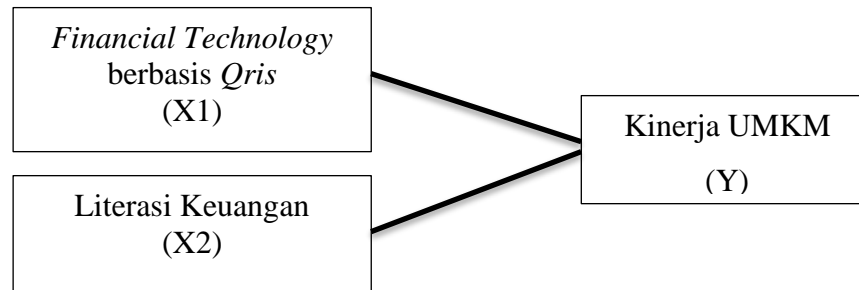
Literasi Keuangan, atau yang juga dikenal sebagai edukasi keuangan, merujuk pada pemahaman dasar tentang keuangan, termasuk pengetahuan tentang cara memperoleh dan mengelola sumber daya keuangan, serta bagaimana mengalokasikan mereka untuk masa depan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al. pada tahun 2022 dengan judul "Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan Terhadap kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Karanganyar)", hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan kinerja UMKM di Kabupaten Karanganyar. Dengan literasi keuangan yang kuat, UMKM mempunyai manajemen yang lebih baik dalam mengelola aspek keuangan bisnis mereka, menggunakan berbagai laporan keuangan dengan lebih efektif. Selain itu, hasil studi oleh Fadilah et al. pada tahun 2022 juga menyatakan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan teknologi keuangan (*financial technology*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Bandung.

H2 : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM

METODE PENELITIAN

Untuk memastikan bahwa penelitian ini sesuai dengan tujuannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *quantitative research*. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengukuran yang objektif terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah total jumlah UMKM yang bergerak dalam sektor Perdagangan di Kabupaten Karangasem, yang berjumlah 47.220 unit. Metode penentuan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin. Seperti yang dijelaskan dalam buku "Statistika Seri Dasar dengan SPSS," rumus Slovin adalah formula yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimum ketika karakteristik populasi belum diketahui secara pasti. Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya, desain penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.1 Desain penelitian
Pengaruh Financial Technology berbasis Payment Gateway dan Literasi Keuangan terhadap kinerja UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem



Sumber : Data Diolah (2023)

Apabila data telah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah dilakukannya analisis pada data, yang terdiri dari serangkaian tahapan yang akan dijelaskan berikut ini.

1. *Descriptive Statistical Analysis* dipakai untuk mengelola, Menggambarkan atau mengilustrasikan data Menyajikan data yang telah dikumpulkan tanpa upaya untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi yang berlaku, 2018:147).
2. Uji validitas: Ini adalah langkah untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian valid atau tidak dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.
3. Pengujian reliabilitas: Dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS dan kriteria reliabilitas adalah apakah nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,60 untuk variabel tersebut, yang menandakan keandalannya.
4. Pengujian normalitas: Normalitas data diuji biasanya menggunakan “Kolmogorov-Smirnov”, dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.
5. Multicolinearity tes: tujuannya untuk melihat sejauh mana variabilitas antar variabel independen dalam model regresi dan diukur dengan Variance Inflation Factor (VIF) serta nilai toleransi.
6. Uji heteroskedastisitas: Melihat apakah terjadi ketidaksetaraan varian residual antara penelitian yang satu dengan yang lain dalam model regresi.
7. Analisis regresi linier berganda: Menggunakan persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$.
8. Uji F: Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

9. Uji koefisien determinasi: Dipakai untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, dan nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1, dapat dilihat pmaparannya dalam nilai “R-square” pada program SPSS.
10. Uji t-statistik: Melibatkan uji statistik untuk menentukan mengenai apa ada masing-masing koefisien yang mempunyai pengaruh secara signifikan dan kuat atau tidak terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di sektor perdagangan UMKM di Kabupaten Karangasem yang memiliki populasi sebanyak 47.220 entitas usaha. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan mengedarkan kuesioner penelitian kepada 100 responden sebagai sampel penelitian.

Table.of Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	10	30	23.21	4.619
X2	100	16	33	25.27	4.012
Y	100	9	30	21.28	4.003

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel Financial Technology (X1) mempunyai nilai Min.= 10, nilai max.= 30, nilai (mean)= 23,21, dan Std. Dev= 4,619. Sementara itu, variabel Literasi Keuangan (X2) memiliki nilai Min.= 16, nilai max= 33, nilai (mean)= 25,27, dan Std. Dev = 4,012. Sedangkan untuk variabel Kinerja UMKM (Y), memiliki Min.= 9, nilai max= 30, nilai (mean)= 21,28, dan standar deviasi sebesar 4,003.

Table 4.2 Recapitulation of Validity and Reliability Test Results

No	Variabel	Pernyataan	Validitas		Reliabilitas	
			Koefisien	Keterangan	Cronbach alfa	Keterangan
1	<i>Financial Technology</i>	X1.1	0,776	Valid	0,837	Reliabel
		X1.2	0,678	Valid		
		X1.3	0,684	Valid		
		X1.4	0,719	Valid		
		X1.5	0,734	Valid		
		X1.6	0,686	Valid		
2	Literasi Keuangan	X2.1	0,445	Valid	0,665	Reliabel
		X2.2	0,424	Valid		
		X2.3	0,499	Valid		
		X2.4	0,514	Valid		
		X2.5	0,601	Valid		
		X2.6	0,430	Valid		
		X2.7	0,576			
		X2.8	0,441			
3	Kinerja UMKM	Y1.1	0,441	Valid	0,649	Reliabel
		Y1.2	0,701	Valid		
		Y1.3	0,712	Valid		
		Y1.4	0,307	Valid		
		Y1.5	0,589	Valid		
		Y1.6	0,724	Valid		

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Dari data yang tercantum dalam Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki koefisien di atas 0,30, dan koefisien alpha melebihi 0,6. Oleh sebab itu, semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap valid dan memiliki tingkat kehandalan (reliabilitas) yang memadai.

Table 4.3 Normality Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.66753124
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.047
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.464

Point Probability	.000
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Hasil dari pengujian normalitas yang tercatat dalam Tabel 4.3 memaparkan bahwa nilai “Exact Sig. (2-tailed)” lebih besar dari 0.05, yaitu sebesar 0,464. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal.

Table 4.4 Multicollinearity Test

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Literasi Keuangan	.765	1.307
	Financial Technology berbasis QRIS	.765	1.307

a. Dependent Variable: Kinerja UMKM

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Dalam Tabel 4.4, terlihat bahwa variabel Financial Technology (X1) Tolerance value = 0,765 dengan nilai VIF =1,307. Sementara itu, variabel Literasi Keuangan (X2) juga memiliki nilai tolerance sebesar 0,765 dengan nilai VIF sebesar 1,307. Kedua variabel ini memiliki nilai tolerance yang melebihi 0,1 dan VIF yang tidak melebihi 10, Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda gejala multikolinieritas dalam model regresi ini.

Table 4.5 Heteroscedasticity Test Results

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.906	1.145		1.665	.099
	Financial Technology berbasis QRIS	.084	.048	.197	1.740	.085
	Literasi Keuangan	-.086	.042	-.232	-2.044	.054

a. Dependent Variable: Kinerja UMKM

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji Glejser yang tercatat dalam Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa semua nilai signifikansi untuk variabel-variabel tersebut melebihi nilai 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas yang terjadi dalam model regresi ini.

Table 4.6 Examining linear regression

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.255	1.832		2.323	.022
Financial Technology berbasis QRIS	.190	.077	.190	2.462	.016
Literasi Keuangan	.550	.067	.635	8.204	.000
R					0,746
R Square					0,556
Adjusted R Square					0,547
Uji F					60.744
Sig. Model					0,000

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Didasarkan, Uji Hipotesis (Uji t) yang tercantum dalam Tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa:

1. Financial Technology berbasis QRIS memiliki nilai T hitung sebesar 2,462 terhadap Kinerja UMKM, Sig. = 0,016 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Financial Technology berbasis QRIS dan Kinerja UMKM.
2. Literasi Keuangan memiliki nilai T hitung sebesar 8,204 terhadap Kinerja UMKM, Sig.= 0,000 < 0,05. Hal ini memaparkan bahwa H2 diterima dan H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa Literasi Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja UMKM..

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Financial Technology berbasis QRIS mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem, seperti yang dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan transaksi Financial Technology berbasis QRIS di kalangan pedagang di Kabupaten Karangasem masih

belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pedagang dan masyarakat akan fungsi dan manfaat aplikasi ini.

2. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem, seperti yang dianalisis melalui regresi linear berganda. Tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem masih berada pada kategori "Sufficient Literate," yang mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan masih belum memadai. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang manfaat, fitur, hak, dan kewajiban terkait layanan keuangan perlu ditingkatkan.

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan:

1. Bagi UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem, disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang Financial Technology dan Literasi Keuangan. Hal ini akan membantu mereka memanfaatkan Financial Technology dengan lebih baik, yang dapat memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis. Selain itu, meningkatkan literasi keuangan akan membantu mereka memahami konsep keuangan secara lebih umum, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja UMKM di sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem.
2. Bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa, agar tetap mempertimbangkan penambahan variabel lain yang tentunya dapat memengaruhi kinerja UMKM di sektor perdagangan di Kabupaten Karangasem. Hal ini bisa memberikan wawasan pikiran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi UMKM di wilayah tersebut, dan memperkaya pemahaman tentang dinamika bisnis di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Alifah, F. (2022). Analisis Wechat Pay & Alipay sebagai Financial Technology (Fintech) dari China yang telah resmi beroperasi di Indonesia. *" Dharmasiswa " Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(4), 12.*
- Data Keragaan UMKM Provinsi Bali. (2023). Diskopukm. <https://diskopukm.baliprov.go.id/data-dan-informasi/data-umkm/>
- Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., & Weber, M. (2017). Definition of fintech and description of the fintech industry. *In Fintech in Germany (Pp. 5–10). Springer.*
- Fadilah, I., Rahman, S., & Anwar, M. (2022). Analisis pengaruh Literasi Keuangan , Inklusi Keuangan , dan Financial Technology terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung. 5(3), 1347–1354.

- Idrus, M. S. (2012). *Inovasi dan Kinerja: Knowledge Sharing Behaviour pada UKM*. Universitas Brawijaya Press.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif AlSyariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Purnama, I. K. E., Ariastita, P. G. A., Handayeni, K. D. M. E., & Nugroho, S. M. S. (2019). Penerapan E-Commerce Untuk Penguatan UMKM Berbasis Konsep One Village One Product di Kabupaten Karangasem. *Sewagati*, 2(2), 85–90. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v2i2.4612>
- Rafli, A. M. (2022). *No Title*. Mekari Jurnal. <https://www.jurnal.id/id/blog/kriteria-usaha-mikro-sbc/>
- S Rapih, T Martono, G. R. (2015). *Analisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, modal sosial dan modal finansial terhadap kinerja UMKM bidang garmen*.
- Saputro, D. C., Ismawati, K., Novie, I., & Nugroho, E. (2022). *TERHADAP KINERJA UMKM (Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Karanganyar)*. 205–213.
- Sari, Reza Wulan & Widodo, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Modal Manusia, Dan Financial Technology Terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 411–417.
- Sari, R. W. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Modal Manusia, Dan Financial Technology Terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 11.
- Wardani, A. P. Y. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 170. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25947>

Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi di Kota Denpasar

I Putu Yoga Pranata ⁽¹⁾

Putu Cita Ayu ⁽²⁾

Rai Dwi Andayani ⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: pranatayoga189@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to offer practical proof regarding how the usage of accounting information is impacted by the perceptions and accounting knowledge of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). It employs a quantitative research approach, collecting primary data through the administration of surveys assessed through a Likert scale. The research encompasses the entire population of business entities in Denpasar City, amounting to approximately 32,476 businesses. Simple random sampling is employed as the research's sampling technique and a sample size of 100 participants were determined using the Slovin formula. Data analysis was carried out through multiple regression analysis using SPSS version 25. The results of this study indicate that the perceptions of MSME operators do not have any effect on the utilization of accounting information within MSMEs in Denpasar City. In contrast, accounting knowledge has a positive and statistically significant influence on the use of accounting information by MSMEs in Denpasar City.

Keywords: Perception, Knowledge of Accounting, Use of Accounting Information, MSME

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah sebuah format yang mencatat informasi finansial dari suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Format ini diterapkan untuk mendeskripsikan kinerja dan situasi keuangan perusahaan, seperti yang disebutkan dalam Jurnal.Id pada tahun 2023. Setiap jenis perusahaan, baik yang kecil maupun besar, yang bergerak dalam bidang jasa maupun perdagangan, memerlukan laporan keuangan. Laporan ini mencakup pencatatan semua transaksi ekonomi dan moneter, termasuk pembelian, penjualan, dan transaksi bisnis lainnya. Keberadaan laporan keuangan sangat penting karena memberikan gambaran tentang kondisi finansial perusahaan pada periode tertentu. Setiap detail dan informasi dalam laporan keuangan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan, oleh karena itu, proses pembuatan laporan ini tidak boleh diabaikan. Laporan dipergunakan sebagai referensi untuk menilai kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Dengan informasi yang terdapat dalam laporan ini, dapat diketahui berapa manfaat dan kerugian yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Karena itu, pemahaman yang baik tentang laporan keuangan sangat penting

bagi pemilik bisnis agar mereka dapat membuatnya dengan akurat sesuai dengan kebutuhan mereka. (Jurnal.Id, 2023)

Kepentingan penggunaan informasi akuntansi ini menciptakan minat untuk mengevaluasi bagaimana Pengusaha dalam skala (Mikro, Kecil, dan Menengah) memandang Pemanfaatan data Penggunaan akuntansi dalam pelaksanaan operasional. bisnis mereka. Bagi pelaku UMKM yang memandang informasi akuntansi sebagai sesuatu yang vital, hal ini akan mendorong mereka untuk memanfaatkannya dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Namun, sekadar memiliki pemahaman yang bagus tentang relevansi informasi akuntansi. belum cukup; maka, pelatihan dalam bidang akuntansi menjadi suatu keharusan untuk mendorong penggunaan informasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM. Maka dari itu, Tidak dapat disangkal bahwa banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan informasi akuntansi secara efektif. Terutama dalam era globalisasi ekonomi, di mana persaingan bisnis semakin ketat, Hanya perusahaan yang memiliki keunggulan yang dapat bertahan dan berhasil dalam persaingan.

Pandemi COVID-19 telah memberikan wawasan kepada Bali bahwa UMKM yakni salah suatu sektor ekonomi yang memiliki ketahanan yang jauh lebih baik disandingkan bersama sektor lain. Meskipun sektor pariwisata sudah mengalami penurunan, (UMKM) tetap beroperasi dan bertahan. Bali, yang sebelumnya sangat bergantung pada sektor pariwisata, ternyata sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi, terutama selama pandemi COVID-19. Ketergantungan yang tinggi pada pariwisata mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami penurunan drastis, mencapai -12,26%(Quarter III) tahun 2020, karena adanya berbagai batasan aktivitas dan mobilitas warga selama COVID-19. Namun, melalui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemilik kepentingan terkait, saat ini ekonomi Bali mulai pulih. (Antaraneews.com, 2023).

Hingga kuartal tiga tahun 2022, ekonomi Bali telah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8,09 persen. Meskipun Bali menghadapi tantangan Dampak pandemi COVID-19 justru membuat sektor UMKM di Pulau Dewata mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebagaimana diungkapkan Eka Dina (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali). Pertumbuhan usaha di Bali antara tahun 2021 dan 2022 mencapai 6,4%, dengan jumlah UMKM meningkat (412.26) menjadi (440.609) unit. Mayoritas usaha di Provinsi Bali bergerak dalam usaha perdagangan, mencapai 254.655 unit (58%), diikuti oleh industri pertanian sebanyak 87.966 unit (20 persen), industri non-pertanian sekitar 61.048 unit (14%), dan berbagai jenis jasa sebanyak 3.694 unit (8%).

Meskipun terdapat pertumbuhan kuantitatif yang menggembirakan pada UMKM, ini tidak berarti bahwa tidak ada tantangan yang dihadapi. Secara keseluruhan, UMKM di Provinsi Bali menghadapi berbagai masalah, termasuk Pendanaan, izin, tenaga kerja, teknologi, promosi, dan manufaktur. Dalam hal permodalan, salah satunya adalah kurangnya akses informasi bagi (UMKM) untuk mendapatkan modal yang diperlukan dalam mengembangkan bisnis mereka. Dari segi perizinan, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki izin resmi untuk beroperasi. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman para pemilik UMKM dalam mengelola usaha mereka dengan efisien. Dalam hal teknologi, ada kurangnya penggunaan teknologi dalam mengoperasikan bisnis mereka. Pemasaran UMKM masih memiliki cakupan yang terbatas, dan upaya promosipun seringkali tidak mencapai potensi maksimal. Sementara dalam hal produksi, sering kali Pengemasan produk UMKM masih belum menarik, dan masih ada hambatan dalam mengakses bahan baku yang perlu diatasi (Antarnews.com, 2023).

Menurut MRB Finance (2020), 90% dari (UMKM) tidak dapat bertahan dalam konteks tertentu/dalam jangka panjang, dan penyebab utama dari hal ini adalah masalah Manajemen dan pengaturan finansial yang kurang kompeten. Banyak pengusaha UMKM yang belum menyadari seberapa krusialnya pencatatan dan pelaporan keuangan, meskipun dengan melakukan kedua hal tersebut, mereka dapat menilai apakah bisnis mereka berada dalam kondisi yang baik atau tidak.

Dalam era digital yang sedang berlangsung, sebagian besar pengusaha UMKM masih minim pemahaman tentang bidang akuntansi. Suatu survei bahkan mengindikasikan bahwa Hampir 90 persen (UMKM) di Indonesia tidak dapat bertahan selama lebih dari 5 tahun karena kurangnya pemahaman yang memadai tentang akuntansi. Hal ini mengakibatkan bisnis UMKM menghadapi berbagai masalah, seperti pengelolaan aset yang tidak efisien, kesulitan dalam mengatur arus kas dengan baik, kesulitan Mengadakan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis, serta mengandalkan catatan dan naluri semata dalam mengelola usaha mereka (Kaligis & Lumempouw, 2021).

Salah satu masalah yang juga muncul dalam pencatatan laporan keuangan adalah ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman tentang aspek keuangan oleh Pengusaha dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut. Banyak di antara mereka yang kurang memiliki minat atau motivasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang laporan keuangan. Sayangnya, jika masalah ini tidak segera diatasi, hal ini dapat berdampak negatif pada UMKM tersebut. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar pelaku UMKM cenderung merasa puas dan tidak merasa perlu untuk mencatat laporan keuangan. Mereka beranggapan bahwa tidak ada masalah jika mereka tidak melibatkan diri dalam pencatatan ini, sehingga motivasi mereka

untuk meningkatkan pemahaman tentang laporan keuangan sangat rendah. Dari uraian ini, jelas terlihat bahwa pengetahuan pelaku UMKM tentang pencatatan keuangan sangat terbatas, dan mereka memiliki pemahaman yang minim tentang dampak positif laporan keuangan bagi bisnis UMKM mereka dalam jangka panjang. Berdasarkan berbagai Masalah inti yang terjadi dipengusaha UMKM dalam memanfaatkan penggunaan informasi akuntansi dalam operasi bisnis mereka, maka perumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan dari Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi?
2. Bagaimanakah yang ditimbulkan dari Pengetahuan Akuntansi Pelaku UMKM terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku yang Direncanakan, juga dikenal sebagai *Planned Behaviour Theory* (TPB), Ini adalah sebuah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Ajzen. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan niat individu dalam menjalankan suatu perilaku tertentu. TPB mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku seseorang:

1. Kepercayaan Kontrol (*Control Beliefs*): Ini mencakup keyakinan individu tentang keberadaan faktor-faktor yang dapat berfungsi sebagai pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan perilaku tertentu. Selain itu, individu juga mempertimbangkan sejauh mana faktor-faktor ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan perilaku tersebut.
2. Kepercayaan Normatif (*Normative Beliefs*): Ini melibatkan keyakinan individu berdasarkan persepsi mereka tentang harapan dan dorongan dari orang lain dalam memenuhi atau tidak memenuhi perilaku tersebut. Orang cenderung mempertimbangkan norma sosial dan pandangan orang-orang terdekat dalam mengambil keputusan mengenai perilaku mereka.
3. Kepercayaan Berperilaku (*Behavioral Beliefs*): Ini mencakup keyakinan individu tentang hasil yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perilaku yang akan mereka lakukan, serta penilaian mereka terhadap hasil tersebut. Individu mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatif yang mungkin timbul dari tindakan mereka.

Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, TPB membantu dalam pemahaman serta peramalan niat pribadi dalam melaksanakan tindakan khusus. Teori ini berperan sebagai suatu struktur konseptual yang bermanfaat untuk mengkaji dan memahami mengapa memutuskan untuk menjalankan suatu aksi, dipengaruhi oleh keyakinan dan norma yang memengaruhinya.

Seorang pengusaha dapat mengakibatkan peningkatan dalam penggunaan informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan fakta mengenai Pemilik (UMKM) yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam juga akan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang konteks bisnis mereka dan pengaplikasian yang lebih menyeluruh tentang proses akuntansi yang berlaku untuk bisnis mereka. Akibatnya, pemilik UMKM ini akan cenderung lebih sering memanfaatkan informasi akuntansi dalam mengambil keputusan ekonomi, yang mencakup pemilihan di antara berbagai pilihan tindakan yang mungkin, Perencanaan strategis, pengelolaan, dan pengendalian operasi perusahaan mereka.

Teori Perilaku yang Terencana mengindikasikan bahwa sikap seseorang memengaruhi tindakan mereka, yang mencakup niat positif atau negatif untuk melakukan suatu tindakan khusus. Selain itu, aspek-aspek dari lingkungan eksternal, termasuk persepsi dan keyakinan individu terkait dengan norma-norma kelompok, juga berperan signifikan dalam menentukan apakah individu akan mengadopsi dan melaksanakan perilaku tertentu sesuai dengan norma yang berlaku dalam kelompok mereka.

Menurut Baviga (2022), pandangan oleh pemilik (UMKM) memiliki dampak terhadap pemanfaatan informasi akuntansi. Sementara itu, Risa dkk. (2021) juga mencatat adanya pengaruh positif antara persepsi para pelaku UMKM dan pemanfaatan informasi akuntansi. Secara sederhana, pemahaman dan pandangan yang kuat terhadap informasi akuntansi cenderung mendorong pelaku UMKM untuk menggunakannya dengan lebih efisien dalam mengelola bisnis mereka.

H1: Penggunaan Informasi Akuntansi dipengaruhi secara positif oleh Persepsi pelaku UMKM

Dalam prakteknya, tingkat pengetahuan/Kemahiran akuntansi yang tinggi meningkatkan pemanfaatan informasi akuntansi. Penyebabnya adalah pemilik “UMKM” memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai proses mencatat, mengelompokkan, dan merangkum peristiwa ekonomi. Pemahaman tersebut akan memberikan wawasan terhadap penggunaan informasi akuntansi yang lebih aktif. Hasilnya, ini dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam operasi bisnis mereka. Faktor norma subjektif dalam kerangka

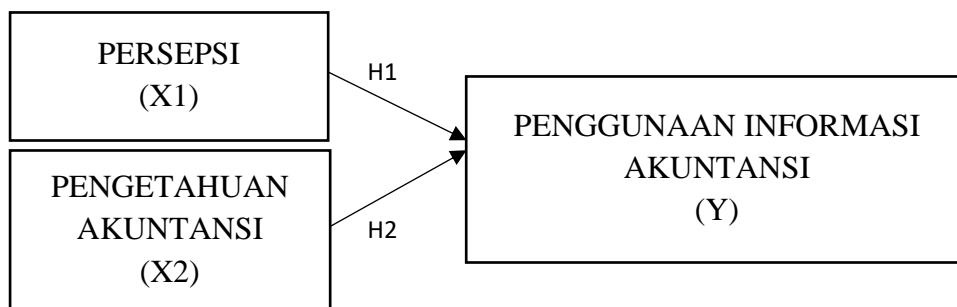
Teori Perilaku yang Direncanakan juga terkait dengan Pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pemilik UMKM, karena pengetahuan ini memengaruhi cara mereka memandang tindakan yang akan mereka ambil berdasarkan pemahaman akuntansi yang mereka miliki.

Berdasarkan pandangan Kustina & Utami (2022), mereka menyatakan bahwa pemahaman tentang akuntansi berdampak positif secara nyata pada pemanfaatan informasi akuntansi. Seiring dengan itu, Dewi (2020) juga mencatat bahwa pengetahuan akuntansi memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemanfaatan informasi akuntansi.

H2: Penggunaan Informasi Akuntansi dipengaruhi secara positif oleh Pengetahuan Akuntansi pelaku UMKM

METODE PENELITIAN

Dengan merujuk pada dasar teori dan temuan penelitian tersebut, maka hipotesis kedua yakni :



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Sumber: Peneliti, 2023

Populasi yang menjadi subjek temuan ini berasal dari keseluruhan Pengusaha “UMKM” di Kota Denpasar, yang berjumlah sekitar 32.476 usaha menurut data yang disampaikan oleh Dinas Koperasi pada tahun 2023. Penggunaan Relevansi teknik pengambilan sampel sangat penting dalam penelitian ini karena membantu peneliti dalam membuat generalisasi terhadap seluruh populasi yang direpresentasikan oleh sampel yang dipilih. Jumlah sample yang harus ditetapkan pada temuan ini ditentukan berdasarkan tujuan pengambilan sampel untuk memastikan kevalidan hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut.

Dalam upaya memilih sampel yang dapat mewakili populasi yang terdiri dari 32.476 usaha Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sample dilakukan digunakan rumus Slovin. Rumus

ini dipakai untuk memperkirakan jumlah sampel yang diperlukan, dengan mempertimbangkan ukuran populasi dan tingkat kepercayaan yang diinginkan dalam penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Ket.:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = 10% = 0,10

Didasarkan rumus , maka sample minimalnya, yakni :

$$n = \frac{32.476}{1 + 32.476 \cdot 0,01} = 99,69 = 100 \text{ pelaku usaha (dibulatkan)}$$

Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan *Slovin's formula*, diputuskan untuk mengambil sampel sebanyak 100 pelaku usaha di Kota Denpasar. Metode pengambilan sample yang diterapkan (*Random Sampling*), di sampel dipilih secara acak dari seluruh populasi tanpa mempertimbangkan kelompok tertentu dalam populasi. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa anggota populasi memiliki karakteristik yang seragam atau homogen. Semua data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan beberapa langkah yakni :

1. *Descriptive statistical analysis*, untuk menyediakan informasi mengenai sifat-sifat variable penelitian, seperti rentang nilai antara nilai terkecil dan terbesar, rata-rata, serta deviasi standard.
2. *Validity test*, menilai suatu keusioner dapat dikatakan memiliki keabsahan atau validitas. Instrumen penelitian tersebut dikatakan valid apabila korelasi skor tiap item terhadap skor total item lebih besar dari *pearson correlation* >0,3.
3. *Reliability test*, menunjukkan tanda-tanda perubahan atau produksi. Instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's alpha > 0,70.
4. *Normality test*, mengevaluasi konteks Regretion Model, variabel independen dan dependen variabel mengikuti terdistribusi normal (Ghozali, 2016:154). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan apakah model regresi tersebut memiliki asumsi normalitas yakni menggunakan tes "one-sample Kolmogorov-Smirnov", dengan kriteria bahwa > 0,05, maka data tersebut mengikuti distribusi normal.
5. *Multikolinearity Test* dipakai untuk menilai Regretion Model, menunjukkan adanya korelasi antara Independen Variabel. Dengan melakukan perbandingan antara nilai toleransi dan "VIF," peneliti dapat menilai keberadaan multikolinearitas. Jika tolarence

value kurang dari 0,1 dan VIF melebihi 10, maka multikolinearitas ada dalam Regretion model (Ghozali, 2016).

6. Uji heteroskedastisitas adalah untuk menilai dalam Regretion Model ada korelasi antara Independen variable. Jika terdapat korelasi, maka hal ini menandakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak bersifat ortogonal atau tidak saling bebas.
7. Dalam multiple linear regression analysis, digunakan persamaan $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$.
8. (R2) ini dilaksanakan agar menilai serta menjelaskan seberapa besarnya pengaruh bersamaan dari Independen Variable memengaruhi Dependen Variable yang dapat dinyatakan melalui nilai adjusted R-Squared (Ghozali, 2016).
9. Uji kelayakan model (Uji F), Kriteria pengujian: 1. Bila nilai "P-nilai kurang dari 0,05.", itu memperlihatkan hasil yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian. 2. Bila nilai "P-nilai lebih besar dari 0,05", itu memperlihatkan bahwa model ini tidak layak untuk dipakai dalam penelitian
10. t-statistik (t-test) akan menunjukkan bahwa apabila (Sig.) < 0.05, memberikan efek secara parsial Independen Variable memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. (Kuncoro, 2013:244).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi dampak dari sudut pandang para pengusaha UMKM dan pengetahuan akan akuntansi terhadap pemanfaatan informasi akuntansi di wilayah Kota Denpasar. Data yang didapatkan dan diakumulasikan melalui distribusi kuesioner kepada 100 peserta yang merupakan pemilik UMKM. Semua kuesioner telah diisi dan siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Table 4.1
Results of Descriptive Statistical Analysis

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	40,00	67,00	52,7800	5,89227
X2	100	30,00	71,00	55,5000	8,80140
Y	100	37,00	64,00	52,7000	5,58226
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Lampiran 3

Menggambarkan bahwa dalam hal persepsi pelaku UMKM (X1), nilai terendah adalah 40,00, sedangkan nilai tertinggi adalah 67,00 dengan (mean) sebesar 52,7800 dan deviasi standarnya sekitar 5,89227. Ketika berbicara tentang pengetahuan akuntansi (X2), nilai terendahnya mencapai 30,00, nilai tertinggi mencapai 71,00, dengan rata-rata sekitar 55,5000 dan deviasi standarnya sekitar 8,80140. Sementara itu, dalam hal pemanfaatan informasi akuntansi (Y), nilai terendahnya adalah 37,00, nilai tertinggi adalah 64,00, dengan rata-rata sekitar 52,7000 dan deviasi standarnya sekitar 5,58226.

Table 4.2
Recapitulation of Validity and Reliability Test Results

Variabel	Nilai r Minimal	Keterangan	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0,454	“Valid”	0,731	Reliable
X2	0,616	“Valid”	0,770	Reliable
Y	0,343	“Valid”	0,723	Reliable

Sumber :Lampiran, 3

Disimpulkan seluruh variabel memiliki angka *coefficient* $> 0.30 = \alpha$ yang melebihi 0,7. Oleh karena itu, semua instrumen ini dapat dianggap valid dan mempunyai reliabilitas yang bagus.

Table 4.3
Normality Test Results

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,98828027
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,051
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,090 ^c

Sumber: Lampiran 5

Normality test yang tercatat memaparkan mengenai jumlah “asyp.sig (2-tailed)” $> 0,05$ ($0,090 > 0,05$), mengindikasikan data tersebut mengikuti distribusi normal.

Table 4.4
Multicollinearity Test Results

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,990	1,010
	X2	,990	1,010

Sumber: Lampiran 5

Tabel 4.4 menampilkan yakni variable persepsi pelaku UMKM (X1) mempunyai poin tolerance = 0,990, VIF= 1,010. Sementara itu, variabel pengetahuan akuntansi (X2) memiliki nilai tolerance 0,990 dengan VIF 1,010. Karena kedua variabel mempunyai point nilai toleransi > 0,1 VIF-nya = 10, dapat ditetapkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinieritas yang terjadi.

Table 4.5
Glejser Test Results

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,458	3,140		,464	,643
	X1	,097	,051	,190	1,913	,069
	X2	,047	,034	,139	1,395	,166

Sumber: Lampiran 5

Dari hasil *Glejser test* yang terdokumentasi, dapat ditarik semua Sig. dari variabel tersebut > 0.05. Maka, dapat ditetapkan yakni tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas dalam data tersebut.

Table 4.6
Feasibility Test Results and Multiple Linear Regression

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32,435	5,335		6,080	,000
X1	,100	,086	,105	1,155	,251
X2	,270	,058	,426	4,674	,000

R	0,449
<i>R Square</i>	0,201
<i>Adjusted R Square</i>	0,185
Uji F	12,238
Sig. Model	0,000

Sumber: Lampiran 6

Didasarkan Tabel 4.6 dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 32,435 + 0,100X_1 + 0,270X_2 + e$$

Persamaan itu dapat dijelaskan yakni:

1. Angka konstanta = (32,435) mengindikasikan bahwa variable persepsi pelaku UMKM dan pengetahuan akuntansi memiliki nilai tetap.
2. *Regression coefficient* untuk variable persepsi pelaku UMKM (X_1) adalah 0,100 dan berada dalam nilai positif, yang berarti setiap peningkatan satuan dalam variabel persepsi pelaku UMKM akan memberi efek pada kenaikan = 0,100 dalam penggunaan Informasi Akuntansi..
3. *Regression coefficient* untuk variabel X_2 = pengetahuan akuntansi adalah 0,270 dan memiliki nilai positif, yang Artinya, setiap kenaikan satu unit dalam variabel pengetahuan akan mengakibatkan akuntansi akan menghasilkan peningkatan sebesar 0,270 dalam penggunaan informasi akuntansi.

Hasil uji kelayakan model yang tersaji dalam Tabel 4.6 memaparkan bahwa:

1. Adjusted R^2 bernilai (0,185), yang mengindikasikan bahwa pandangan pengusaha/persepsi UMKM dan pengetahuan akuntansi dapat dipengaruhi secara langsung oleh penggunaan informasi akuntansi =18,5%, sementara 81,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dicantumkan dalam analisis ini.
2. Hasil *F- Test* menunjukkan angka sebesar 12,238, dengan Sig. < 0,05 (0,000). Ini mengindikasikan tentang model dalam analisis ini adalah valid dan sesuai.

Didasarkan Uji hipotesis (Uji t) pada tabel 4.6, memperlihatkan yakni:

1. Pengaruh yang kuat serta positif dari persepsi pnsaha UMKM terhadap penggunaan informasi akuntansi adalah sebesar 0,100, tetapi tingkat signifikansinya adalah 0,251, yang >0,05. Maka ditarik kesimpulan (H_1) ditolak.
2. Pengetahuan akuntansi memiliki pengaruh positif dan kuat sebesar 0,270 terhadap penggunaan informasi akuntansi, Sig.(0,000), <0,05. mengindikasikan bahwa (H_2) diterima

SIMPULAN DAN SARAN

Didasarkan analisis tersebut, maka kesimpulan-nya , yakni :

1. Ketidakberpengaruhannya persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan informasi akuntansi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penafsiran yang tepat oleh para pelaku UMKM di Kota Denpasar. Dalam konteks ini, para pengusaha UMKM mungkin befikir bahwa penggunaan informasi akuntansi tidak akan memberikan manfaat yang signifikan pada usaha mereka.
2. Tingkat pengetahuan mengenai akuntansi/ Pemahaman akuntansi yang secara nyata mempengaruhi secara signifikan Penggunaan informasi akuntansi berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan akuntansi. Semakin naik pengetahuan akuntansi, maka semakin melonjaknya kemungkinan pelaku UMKM di Kota Denpasar akan meningkatkan pemanfaatan informasi akuntansi dalam usaha mereka

Berikut rekomendasi yang dapat dijabarkan:

1. Sangat diharapkan bahwa pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), akan menerapkan program penyuluhan yang berkelanjutan kepada para pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang signifikansi menyusun laporan keuangan yang mematuhi peraturan yang berlaku, serta memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka mampu menyusun laporan keuangan dengan baik.
2. Para pelaku UMKM diharapkan untuk lebih aktif dalam mengikuti program informasi dan kegiatan sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman mereka, serta membuka wawasan Untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih optimal dalam menjalankan usaha UMKM mereka saat ini.

Daftar Pustaka

- Afrianti, R., & Halim, C. (2021). Pengaruh Persepsi Pelaku Umkm Tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, Dan Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat Tahun 2015-2019. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 41–47. <https://doi.org/10.31958/mabis.v1i1.3079>
- Baviga, R. (2022). Pengaruh Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 173–194. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.35>

- Dewi, S. Y. (2020). Pengaruh pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, jenjang pendidikan dan lama usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kuliner di kabupaten subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 46–54.
- Dinas Koperasi, U. M. K. dan M. K. D. (2023). *Rekapitulasi Data UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha*. Pusat Data Denpasar. https://pusatdata.denpasarkota.go.id/?page=Data-Detail&language=id&domain=&data_id=1681565896
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hatta, A. J., & Budiyati, O. (2021). Tingkat Pendidikan, Literasi Akuntansi, Dan Persepsi Pemilik Umkm Tentang Akuntansi Sebagai Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi. *Akuntansi Dewantara*, 5(2), 112–121. <https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.11044>
- Heriston Sianturi, & Nurul Fathiyah. (2016). Pengaruh Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. *Jurnal Liabilitas*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v1i2.14>
- JagadID. (2023). *Pengertian Pengetahuan Adalah : Definisi, Jenis, Sumber dan Manfaat*. Jagad.Id. https://jagad.id/pengertian-pengetahuan/#Pengertian_Pengetahuan_Menurut_Para_Ahli
- Kaligis, S., & Lumempouw, C. (2021). Pengaruh Persepsi Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dimembe. *Akpem*, 1–16.
- Kustina, K. T., & Utami, L. P. S. (2022). Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, Dan Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Journal of Financial and Tax*, 2(1), 13–31. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.194>
- Mohamadi, R. F. (2023). *Laporan Keuangan: Pengertian, Fungsi, Jenis, Format*. Jurnal.Id. <https://www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/>
- Mouti, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Barbershop Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. *Skripsi*, 1–148.
- MRBFinance. (2020). *90% UMKM TIDAK BERTAHAN LAMA KARENA TAK PAHAM AKUNTANSI*. Mrbfinance.Com. <https://www.mrbfinance.com/blog/umkm-tidak-bertahan-lama-karena-tak-paham-akuntansi>
- Natawibawa, I. W. Y. (2020). *Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM sebagai Strategi Awal untuk Bertahan di Masa Pandemi*. Bisnismuda.Id. <https://bisnismuda.id/read/308-i-wayan-yeremia-natawibawa/evaluasi-penyusunan-laporan-keuangan-umkm-sebagai-strategi-awal-untuk-bertahan-di-masa-pandemi>
- Rhismawati, N. L. (2023). *Kolaborasi dan sinergi kunci UMKM Bali tangguh hadapi resesi*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3379968/kolaborasi-dan-sinergi-kunci-umkm-bali-tangguh-hadapi-resesi>

- Risa, E., Agussalim, M., & Putri, A. S. R. (2021). Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, Dan Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Di KotaPadang. *Pasero Jurnal*, 3(4), 903–915.
- Sampoernauniversity. (2022). *Variabel Bebas dan Terikat adalah: Pengertian dan Contoh*. Sampoernauniversity.Ac.Id. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/variabel-terikat-adalah/>
- Setiawan, S. (2023). *Pengertian Persepsi, Jenis serta Faktor dan Proses*. Gurupendidikan.Com. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-persepsi/>
- Sia, V. (2023). *Akuntansi: Pengertian, Jenis, Manfaat, Tujuan, dan Fungsi*. Jurnal.Id. https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-dan-pentingnya-dalam-bisnis/#Definisi_Akuntansi_Menurut_Para_Ahli_Adalah_Sebagai_Berikut

Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Terdampak Pandemi *Covid-19* di Kota Denpasar

I Made Agus Armawan⁽¹⁾
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
Ni Wayan Yuniasih⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: agusarmawan14@gmail.com

ABSTRACT

This study ambitions to have a study the impact of financial literacy and monetary inclusion on the general overall performance of micro, small and medium organizations (msmes). This observe changed into finished on sms laid low with covid-19 in denpasar city using a questionnaire and related to 100 respondents. The information evaluation technique used is a couple of linear regression evaluation with the assist of spss 24 software program application. The consequences show that (1) financial literacy has a huge impact at the overall performance of smes. (2) economic inclusion has a sizable impact on msme performance.

Keywords: *Financial Literacy, Financial Inclusion, MSME Performance*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data statistik, sebanyak 99% dari semua entitas bisnis di Indonesia tergolong dalam kategori UMKM, yang terdiri dari 60.702 menengah, 783.132 kecil, dan 63,5 juta mikro. UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34%. Selain itu, UMKM juga menjadi penyedia lapangan kerja utama dengan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Pandemi Covid-19 juga berdampak negatif terhadap perekonomian Bali. Provinsi Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata, sehingga ketika peraturan perjalanan diberlakukan dan pariwisata lumpuh, dampaknya sangat dirasakan. Pendapatan fiskal pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan sebesar 11,14% pada sektor pertama, dan sektor kedua tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,98%. Dampak finansial ini juga berdampak pada sektor UMKM, dimana pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan dan bahkan banyak bisnis komersial yang harus menutup operasinya.

Tabel 1.1

Data UMKM terdampak *Covid-19* di Kota Denpasar

Sektor Usaha	Jumlah
Denpasar Utara	743
Denpasar Barat	1111
Denpasar Timur	1373
Denpasar Selatan	1218

TOTAL	4445
-------	------

Sumber : DISKOP UMKM Kota Denpasar,2023

Dalam ekonomi Bali, menurut data yang telah disediakan, tercatat sebesar 326.000 unit (UKM) yang terdaftar di Bali. Berdasarkan informasi dari Dinas yang sama, terdapat sekitar 18.583 individu yang berbisnis dalam skala kecil serta menengah yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Di Kota Denpasar, jumlah usaha kecil dan menengah yang terkena dampak paling besar mencapai 4.445 orang. Ini menunjukkan bahwa kinerja UKM di kota metropolitan Denpasar tidak selalu berjalan lancar, yang terlihat dari penurunan pendapatan akibat peningkatan jumlah pekerja dalam skala kecil, yang pada akhirnya menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan karyawan..

Pemilihan Kota Denpasar sebagai area penelitian dipertimbangkan dengan alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap berbagai lembaga di wilayah tersebut. Menurut informasi dari Dinas UMKM serta Koperasi Kota Denpasar, diperkirakan bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 4.445 UMKM yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19 di Kota Denpasar (Sugiari, 2022).

Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja UMKM secara keseluruhan, khususnya di Kota Denpasar, antara lain ekonomi pengetahuan (handayani, 2022) dan ekonomi inklusif (masithah, 2023). Literasi Keuangan mengacu pada keterampilan, perilaku, dan pola pikir seseorang dalam mengelola kisaran harganya (UU No. 76/pojk.07/2016). Literasi keuangan yang buruk menyebabkan perencanaan ekonomi yang buruk, sehingga kurangnya tujuan keuangan yang jelas pada akhirnya menurunkan kinerja UMKM itu sendiri. Dengan demikian, pengetahuan tentang fundamental ekonomi, keberkahan, dan pengendaliannya, yang didukung dengan perilaku dan sikap keuangan yang benar, akan menghasilkan wawasan keuangan yang pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja UMKM, termasuk pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

Inklusi keuangan merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Inklusi keuangan juga merupakan upaya untuk memberikan akses kepada sumber-sumber keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia (sebagaimana diatur dalam UU No. 76/pojk.07/2017). Dengan meningkatkan inklusi keuangan, UMKM dapat diberikan insentif untuk mencapai kinerja yang lebih baik (sumber: Alvin Habibi, 2022). Keberlangsungan usaha yang panjang dan kemudahan dalam mengakses pembiayaan akan membantu pelaku UMKM meningkatkan performa bisnis mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan UMKM secara keseluruhan. Fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan dan non-keuangan dapat mendukung UMKM untuk bersaing dan menjadi penunjang pertumbuhan keuangan yang

inklusif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, tindakan yang dapat diambil adalah meningkatkan inklusi keuangan. Ketika akses keuangan menjadi lebih mudah, maka pembiayaan atau permodalan akan menjadi indikator kunci yang menunjukkan peningkatan jumlah UMKM. Kinerja jangka panjang juga akan berdampak pada peningkatan manfaat bagi karyawan.

Berdasarkan konteks tersebut, Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Denpasar?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Denpasar?

KAJIAN PUSTAKA

Konsep utama dari Resource-Based View (RBV) menyatakan bahwa sebuah organisasi dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif jika mereka memiliki sumber daya yang berharga, kemampuan yang berharga, dan nilai yang tidak dapat diperoleh atau disalin oleh pesaing lainnya. Jika demikian, organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengimplementasikan sumber daya tersebut dalam praktik mereka (Barney, 1991). Prinsip dari sumber daya ini, baik yang berbentuk fisik maupun yang tidak berwujud, dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan teknik dan strategi yang akan memberikan keunggulan kompetitif (Sari, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, dijelaskan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan menggunakan konsep RBV sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan, yang merupakan sumber daya internal bagi organisasi, memiliki nilai dan kemampuan yang dapat mendukung manajemen perusahaan dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dengan kata lain, kemampuan organisasi untuk memahami dan memanfaatkan sumber daya ini dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan jangka panjang.

Keterkaitan sebab akibat antara tingkat literasi keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan dapat dijelaskan melalui kerangka konsep Resource-Based View (RBV). Prinsip dasar dari RBV menyatakan bahwa jika sebuah perusahaan memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya mereka agar lebih berharga, lebih langka, tidak dapat disalin, dan tidak dapat digantikan oleh pesaing, maka perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan kinerja yang berkelanjutan dan mencapai keunggulan kompetitif (Barney, 1991). Dengan literasi keuangan yang tinggi, individu memiliki akses kepada sumber daya keuangan (termasuk aset) dan memiliki

kemampuan untuk mengelolanya secara optimal, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan performa organisasi secara keseluruhan (Adomako & Dans, 2014).

Menurut (Saputro et al., 2022), apabila tingkat pengetahuan keuangan dari karyawan semakin meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan dalam kinerja UMKM. Oleh karena itu, temuan menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap performa UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sitompul, 2021) dan (Putri et al., 2022), ditemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja finansial. Demikian pula, (Sanistasya et al., 2019) mengindikasikan bahwa literasi keuangan memberikan dampak positif bagi usaha kecil.

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM

Konsep Resource-Based View (RBV) dapat memiliki dampak signifikan pada kesuksesan atau kegagalan para pengusaha, termasuk melalui upaya mereka dalam membangun inklusi keuangan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Salman et al. (2015), memiliki ekosistem ekonomi yang terintegrasi dengan baik merupakan faktor kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nindy (2021), hasil evaluasi menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja operasional. Semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, semakin baik pula performa UMKM tersebut. Namun, ada pandangan yang berbeda yang diajukan oleh Putri et al. (2022), yang menyatakan bahwa inklusi keuangan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Dalam konteks ini, mungkin terdapat kemungkinan bahwa minat masyarakat terhadap inklusi keuangan mengalami penurunan karena adanya ketersediaan layanan dan akses keuangan online yang semakin meluas.

H2: Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM

METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan penelitian ini, digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data numerik untuk kemudian dianalisis secara statistik. Sementara itu, studi asosiasi bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel (Sugiyono, 2015). Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memungkinkan peneliti untuk menggambarkan realitas yang terkait dengan dampak literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap performa usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Denpasar..

Subjek penelitian ini mencakup seluruh organisasi mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak oleh pandemi Covid-19 di Kota Denpasar. Berdasarkan data dari koperasi dan

pemasok UMKM di Kota Denpasar, terdapat total 4.445 UMKM yang terkena dampak Covid-19. Penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan metode Slovin dengan rumus berikut:

$$\eta = N / (1 + N * e^2)$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

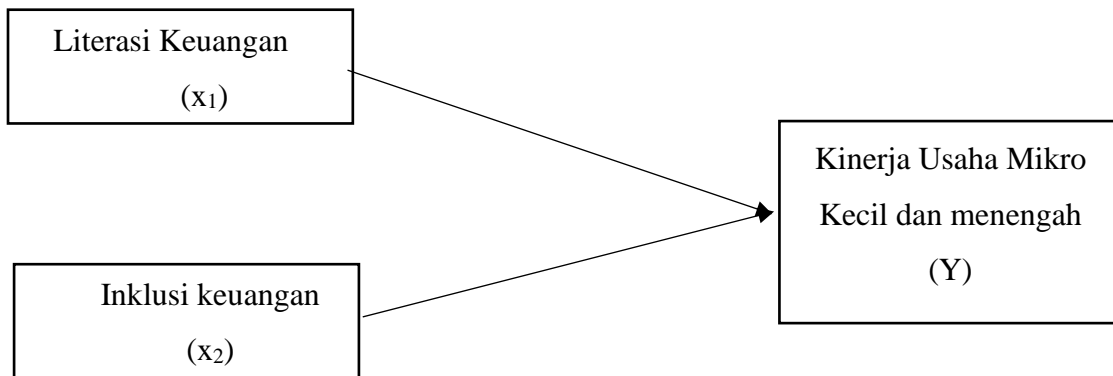
e = 10% = 0,1

Berdasarkan rumus di atas, jumlah sampel minimum dapat dihitung sebagai berikut: $\eta = (4.445)/(1+4.445 \times 0,1^2)$

$$\eta = (4.445)/(1+4.445 \times 0,01) = 97,79 = 100 \text{ UMKM (dibulatkan)}$$

Dari perhitungan rumus slovin dapat ditentukan sampel dengan margin of error 10% sebanyak 100 UMKM. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. UMKM terdampak oleh pandemi covid-19.
2. Memiliki atau mencatat transaksi harian.
3. UMKM masih aktif melakukan kegiatan usaha.
4. UMKM yang mengikuti kursus pelatihan/workshop mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Sumber: Kerangka Berpikir Peneliti (2023)

Kemudian seluruh data yang terkumpul akan dianalisis melalui beberapa langkah seperti dijelaskan di bawah ini.

1. Metode analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengilustrasikan sifat-sifat variabel penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata

2. Uji validitas dilakukan untuk menentukan sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner berkorelasi dengan evaluasi objek secara umum. Kuesioner dianggap valid jika korelasi antara setiap item dengan evaluasi keseluruhan lebih besar dari 0,3.
3. Keandalan suatu kuesioner mengacu pada konsistensi jawaban individu terhadap pertanyaan dalam jangka waktu yang lama. Keandalan instrumen dianggap baik jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70.
4. Pengujian normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah distribusi variabel independen dan dependen dalam model regresi berdistribusi normal. Normalitas dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka distribusi dianggap normal.
5. Uji heteroskedastisitas dalam regresi linier digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam variasi residu antar pengamatan. Jika perkembangan residu absolut lebih besar dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas.
6. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat terdeteksi jika nilai toleransi sangat rendah ($< 0,1$) dan VIF sangat tinggi (> 10).
7. Analisis regresi linier berganda menggunakan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$.
8. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat menjelaskan variasi variabel terikat.
9. Uji kesesuaian model (uji F) digunakan untuk menilai kesesuaian beberapa model regresi linier. Tingkat signifikansi yang umumnya digunakan adalah $\alpha = 0,05$.
10. Uji T-statistik (uji t) digunakan untuk menentukan signifikansi variabel independen dalam model regresi. Ambang batas signifikansi yang umum digunakan adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh melalui penggunaan kuesioner yang disebar kepada Organisasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah terkena dampak dari pandemi Covid-19 dan memenuhi kriteria sampel yang ditetapkan di Kota Denpasar. Rangkuman dari formulir yang dikirimkan dan dikembalikan oleh responden disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Kuisisioner diantarkan langsung	100
Kuisisioner tidak kembali	0
Kuisisioner dikembalikan	100
Kuisisioner digunakan	100
Tingkat pengembalian : $100/100 \times 100\% = 100\%$	

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil menjelaskan bahwa 100 kuesioner telah disebar dan 100 kuesioner telah dikembalikan, artinya seluruh responden mengisinya. Konsekuensinya biaya pengembalian (reaction fee) sebesar 100% yang menunjukkan tingkat partisipasi responden dapat dikatakan sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis, karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah sebanyak 52 responden (52,0%).
2. Usia responden dalam penelitian ini bervariasi, namun mayoritas dari mereka berada dalam rentang usia 20-30 tahun, dengan jumlah sebanyak empat puluh lima responden (45,0%).
3. Tingkat pendidikan responden beragam, tetapi sebanyak 57 responden (57,0%) memiliki tingkat pendidikan tertentu.
4. Sebagian besar responden berhubungan dengan institusi bisnis yang memiliki skala kecil atau mikro. Secara keseluruhan, sebanyak sembilan puluh responden (90,0%) merupakan pemilik atau pekerja dalam usaha mikro.
5. Jenis usaha yang dominan dalam penelitian ini adalah art shop, dengan jumlah responden sebanyak 26 (26,0%).

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	43,00	70,00	57,7500	5,06598
X2	100	19,00	45,00	36,7100	4,17132
Y	100	22,00	40,00	31,3700	3,61158
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Lampiran 5

Bisa dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden, dan terdapat tiga variabel yang dianalisis. Berikut adalah statistik deskriptif untuk masing-masing variabel:

1. Variabel literasi keuangan (X1): Nilai Minimum (Min) = 43,00, Nilai Maksimum (Max) = 70,00, Rata-rata (Mean) = 57,75, Standar Deviasi (St. Dev) = 5,065
2. Variabel inklusi keuangan (X2): Nilai Minimum (Min) = 19,00, Nilai Maksimum (Max) = 45,00, Rata-rata (Mean) = 36,71, Standar Deviasi (Deviasi Keseluruhan) = 4,171
3. Variabel kinerja UMKM (Y): Nilai Minimum (Min) = 22,00, Nilai Maksimum (Max) = 40,00, Rata-rata (Mean) = 31,37, Standar Deviasi (St. Dev) = 3,611

Tabel 4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Nilai r Minimal	Keterangan	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	0,338	Valid	0,779	Reliabel
Inklusi Keuangan (X2)	0,547	Valid	0,803	Reliabel
Kinerja UMKM (Y)	0,508	Valid	0,722	Reliabel

Sumber: Lampiran 6 Hasil Uji Instrumen Penelitian

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator literasi keuangan (X1), inklusi keuangan (X2), dan kinerja UMKM (Y) memiliki korelasi dengan nilai yang lebih besar dari 0,30 dan juga memiliki nilai Cronbach’s alpha yang lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indeks memenuhi syarat validitas dan reliabilitas data.

Tabel 4.4 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,84090857
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,053
	Negative	-,050
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Lampiran 7

Hasil pengujian normalitas mengindikasikan bahwa menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan sampel, nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200, yang melebihi tingkat signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa residu dalam regresi yang diuji memiliki distribusi yang mendekati normal.

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,577	3,412		2,221	,029		
	X1	,151	,068	,211	2,202	,030	,694	1,440
	X2	,411	,083	,475	4,957	,000	,694	1,440

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 7

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan (X1) memiliki nilai toleransi = 0,694 dan nilai VIF = 1,440, sementara variabel inklusi keuangan (X2) memiliki nilai toleransi = 0,694 dan nilai VIF = 1,440. Dengan demikian, semua variabel memiliki nilai toleransi yang > 0,10 (10%) atau nilai VIF < 10. Oleh karena itu, berdasarkan nilai toleransi dan VIF dalam analisis ini, tidak terdapat tanda atau indikasi multikolinearitas.

Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,906	2,091		,433	,666
	X1	,056	,042	,162	1,342	,183
	X2	-,053	,051	-,125	-1,034	,304

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Lampiran 7

Hasil statistik yang diperoleh melalui uji Glejser menunjukkan bahwa nilai Signifikansi (Sig.) untuk variabel literasi keuangan (X1) = 0,183, dan nilai Signifikansi untuk variabel inklusi keuangan (X2) = 0,304. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk kedua variabel tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya varian dalam regresi ini.

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,577	3,412		2,221	,029
	X1	,151	,068	,211	2,202	,030
	X2	,411	,083	,475	4,957	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji Analisis regresi linier berganda dapat ditarik persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 7,577 + 0,151 X1 + 0,411 X2 + e$$

Dengan merujuk pada persamaan regresi di atas, penjelasannya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) = 7,577 mengindikasikan bahwa ketika nilai literasi keuangan dan inklusi keuangan = 0, maka kinerja UMKM secara keseluruhan akan memiliki peningkatan sebesar 7,577 satuan.
2. Koefisien literasi keuangan (X1) (β_1) = 0,151 menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam literasi keuangan akan mengakibatkan peningkatan dalam kinerja UMKM secara keseluruhan sebesar 0,151, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.
3. Koefisien inklusi keuangan (X2) (β_2) = 0,411 berarti bahwa setiap kenaikan dalam inklusi keuangan akan menyebabkan peningkatan dalam kinerja UMKM secara keseluruhan sebesar 0,411, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.

Tabel 4.8 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	492,305	2	246,152	29,883	,000 ^b
	Residual	799,005	97	8,237		
	Total	1291,310	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber: Lampiran 9

Hasil (uji F) menunjukkan F hitung biaya sebesar 29,883 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga model ini dikatakan layak. Artinya kedua variabel independen tersebut dapat memprediksi atau memberikan penjelasan terhadap kinerja UMKM secara keseluruhan. Dengan demikian, secara bersama-sama atau secara global, variabel literasi keuangan (X1) dan inklusi keuangan (X2) mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja UMKM (Y) secara keseluruhan.

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,617 ^a	,381	,368	2,87005
a. Predictors: (Constant), X2, X1				

Sumber: Lampiran 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Nilai adjusted R² sebesar 0,368 mengindikasikan bahwa sekitar 36,8% dari variasi kinerja UMKM secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel literasi keuangan (X1) dan inklusi keuangan (X2). Sementara itu, sisanya sebesar 63,2% dari variasi kinerja UMKM dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini.

Tabel 4.10 Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,577	3,412		2,221	,029
	X1	,151	,068	,211	2,202	,030
	X2	,411	,083	,475	4,957	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 9 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t, hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Literasi Keuangan (X1)

Hasil menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja UMKM secara keseluruhan. Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa harga koefisien regresi variabel literasi keuangan sebesar 0,151 dengan tingkat signifikansi 0,030 lebih kecil dari taraf sig. $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan memberikan dampak positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM, yaitu hipotesis 1 penelitian diterima.

b. Inklusi Keuangan (X2)

Hasil menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa koefisien regresi harga variabel keuangan global sebesar 0,411 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM secara keseluruhan, yang berarti hipotesis 2 penelitian ini dapat diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian diatas, disimpulkan bahwa:

1. Literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan seorang pemilik atau pengelola UMKM maka semakin tinggi pula kinerja yang dapat dicapai oleh UMKM tersebut.
2. Inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas akses keuangan pelaku ekonomi maka akan semakin berkontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM..

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Anggota UMKM harus mampu mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan literasi keuangan dan literasi keuangan dengan mengikuti kursus pelatihan dan menggunakan platform digital sebagai media pembelajaran, serta membangun citra komersial yang baik, karena hal ini akan berdampak positif pada memfasilitasi akses terhadap pembelajaran. akses terhadap layanan inklusi keuangan seperti mengajukan pinjaman bank, sehingga memiliki literasi keuangan yang baik dan kemudahan akses terhadap inklusi keuangan dapat meningkatkan kinerja UMKM.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dan melihat lebih dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja UMKM guna memberikan masukan kepada pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja komersialnya dan menggunakan sampel yang lebih besar untuk tujuan penelitian. tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Abidoun, E. &. (2015). Financial literacy and SME firm performance. *Research Studies in Management.*, 31-43
- Al Hikam, H. A. (2019). OJK Sebut Cuma 60% Orang RI Punya Rekening Bank. Retrieved from *finance.detik.com*: <https://finance.detik.com/moneter/d-4522143/ojk-sebut-cuma-60-orang-ri-punya-rekening-bank>
- Anggraeni, B. D. (2015). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Pemilik Usaha Terhadap Pengelolaan Keuangan. Studi Kasus: UMKM Depok. *Jurnal Vokasi Indonesia* , Vol. 3, No. 1.
- Alimi, L.(2018). Penggunaan Rekening Kredit dan Penggunaan Rekening DPK Bank Umum terhadap Kredit UMKM di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2012- 2016)
- Bhushan, P., & Medury, Y. (2013). Financial Literacy and Its Determinants. *International Journal of Engineering, Business and Enterprise Application (IJEBA)*, Vol. 4, No. 1, pp. 155–160.
- Dahmen, P., & Rodríguez, E. (2014). Financial Literacy and the Success of Small Businesses: An Observation from a Small Business Development Center.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Ghozali. (2011). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibi, M. A., Maskudi, M., & Mahanani, S. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja UMKM di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.31942/jafin.v1i1.6878>
- Joko, J. S., Anisma, Y., & Sofyan, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan

- Inovasi Terhadap Kinerja Umkm. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31258/current.3.1.1-10>
- Kusuma, M., Narulitasari, D., & Nurohman, Y. A. (2022). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Umkm Disolo Raya. *Among Makarti*, 14(2), 62–76. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.210>
- Nindy, S. (2021). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM pada masa Pandemi Covid-19 (studi kasus pada UMKM Kabupaten Malang. In *Competitive* (Vol. 16, Issue 2). <https://doi.org/10.36618/competitive.v16i2.1287>
- Putri, R. E., Goso, G., Hamid, R. S., & Ukkas, I. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pengusaha Muda. *Owner*, 6(2), 1664–1676. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.790>
- Sanistasya, P. A., Raharjo, K., & Iqbal, M. (2019). The Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on Small Enterprises Performance in East Kalimantan. *Jurnal Economia*, 15(1), 48–59. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23192>
- Saputro, D. C., Ismawati, K., & Nugroho, N. E. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Karanganyar). *Smooting*, 205–213.
- Sitompul, R. (2021). Peran Pemoderasi Kualitas Audit Atas Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(3), 506–517. <https://doi.org/10.31258/jc.2.3.506-517>
- Sugiari, luh putu. (2022). *Ribuan UMKM di Denpasar Terdampak Covid-19*. *Bisnis.Com*. <https://bali.bisnis.com/read/20200429/538/1234699/ribuan-umkm-di-denpasar-terdampak-covid-19>

Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Mengwi

**I Gusti Putu Tariani⁽¹⁾,
Kadek Dewi Padnyawati⁽²⁾,
Putu Nuniek Hutnaleontina⁽³⁾**

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: gektari290901@gmail.com

ABSTRACT

The broker's identity triggers the emergence of many problems, especially violations within the LPD, which of course is detrimental to various parties, because currently it cannot be influenced by the actions of parties within the institution. Factors that contribute to the worsening of these conditions accountability processes include the effectiveness of internal research, revisions accountability laws, and compensation practices. The process includes the effectiveness of internal research, revision of accountability laws, and compensation practices. The results of this research show that Internal Control Efficiency has a negative effect on the extension of the term of office. shows that Efficiency_Internal Control has a negative impact on term extension. The tendency of accounting fraud to have a negative impact on compliance with accounting rules. Positive dampers are present in the propensity of accounting fraud to obtain appropriate compensation. present in the tendency of accounting fraud to obtain proper compensation. based on the findings of this research, it is recommended that in the future we strengthen and perhaps even improve the factors that can reduce or even eliminate the possibility of appointing uninvited guests so that organizational goals can be achieved.

Keywords: *Effectiveness of Internal Control Compliance with Accounting Rules Appropriateness of Compensation Tendency to Fraud Accounting*

PENDAHULUAN

Dengan ditambahkannya ilmu akuntansi dan teknologi ke dalam sistim akuntansi modern, perkembangan ini tidak hanya membawa manfaat tetapi juga menyebabkan masalah dalam kondisi akuntansi. Kecurangan akuntansi adalah ketika seseorang atau kelompok orang dengan sengaja menipu orang lain dengan melanggar standar akuntansi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kondisi adalah penggunaan secara sengaja hak orang lain untuk keuntungan pribadi. Kecurangan akuntansi adalah kesalahan yang dilakukan secara sengaja dalam proses pelaporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan, menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Saat ini, masyarakat telah memberikan banyak perhatian pada tren. Banyak perusahaan di sektor publik dan swasta menyediakan kondisi. Bahkan di Bali, situasi ini terjadi pada tingkat terendah di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pengendalian internal organisasi yang tidak efektif seseorang dapat melakukan kondisi jika perusahaan tidak memiliki pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal mencakup

rencana perusahaan untuk menjaga aset, memastikan data akuntansi akurat dan akurat, meningkatkan efisiensi, dan mematuhi peraturan manajemen perusahaan. Ketaatan terhadap aturan akuntansi mengacu pada mematuhi peraturan saat membuat dan menyerahkan laporan keuangan. Organisasi yang tidak mematuhi peraturan akuntansi memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan kondisi. Kecurangan lebih mungkin terjadi jika aturan akuntansi organisasi kurang ketat. Kecendrungan kemiskinan akuntansi juga dipengaruhi oleh kesejahteraan. Kecurangan dilakukan karena ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap hasil atau pembayaran.

Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi pada Lembaga Perkereditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Mengwi”.

KAJIAN PUSTAKA

Donald Cressey, yang mengatakan bahwa tiga faktor penyebab pelaku melakukan penipuan: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi. Pencegahan Penipuan adalah upaya untuk menghentikan faktor penyebab penipuan, juga dikenal sebagai segitiga penipuan, yaitu mengurangi tekanan pada pegawai untuk memenuhi kebutuhan mereka, mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, dan menghilangkan alasan untuk membenarkan atau membenarkan tindakan penipuan. Dalam penelitian ini, teori segitiga penipuan digunakan karena pentingnya bagi suatu instansi untuk mengurangi peluang yang ada untuk melakukan kecelakaan. Kecurangan (Penipuan) adalah kesengajaan atau salah menyatakan suatu kebenaran atau keadaan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatannya yang merugikan. Penyebaran informasi yang tidak benar secara sengaja atau tanpa sengaja sehingga dipercaya oleh korban dan menyebabkan kerusakan pada korban juga dapat dianggap sebagai kejahatan. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian telah tercapai. Ikuti peraturan saat membuat dan menyusun laporan keuangan yang disebut Ketaatan Aturan Akuntansi. Kesesuaian kompensasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan membalas jasa karyawannya dengan memberikan upah, gaji, bonus, tunjangan, dan manfaat lainnya jika mereka bekerja dengan baik untuk perusahaan.

(Rai Yusada, 2022) memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan Hasil variabel “Efektifitas Pengendalian Internal” berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Penelitian Ayu Candra (2022) menemukan bahwa variabel “Ketaatan Aturan

Akuntansi" berdampak negatif terhadap kecendrungan terjadinya akuntansi. Penelitian Devi Sevyiolanita (2022) menemukan bahwa variabel "Kesesuaian Kompensasi" berdampak negatif terhadap kecendrungan keadaan akuntansi.

Ada atau tidaknya peluang dipengaruhi oleh kecendrungan untuk terjadi. Kecendrungan lebih sering terjadi ketika ada peluang yang besar, dan sebaliknya. Pengendalian internal yang efektif yang didukung oleh regulasi yang kuat akan mencegah ketidakadilan yang berlebihan dan merusak banyak pihak yang berkepentingan. Pengendalian internal yang efektif dapat mencegah atau bahkan mencegah keadaan akuntansi.

H1 : Efektipitas Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecendrungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi.

Seluruh laporan saat ini akan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku jika Anda mengikuti aturan akuntansi. Aturan selanjutnya akan memastikan bahwa laporan tidak dapat dimanipulasi dan membuatnya jelas dan mudah dipahami Studi Ayu Candra (2022), yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi adalah bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan akuntansi yang ada dalam organisasi agar akuntabilitas yang efektif dan transparansi data dapat dicapai.

H2 : Ketaattan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap Kecendrungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi.

Bagi karyawan, kompensasi adalah uang yang diterima oleh seorang pekerja sebagai ketidakseimbangan atas layanan yang ia berikan kepada perusahaan tempat ia bekerja. Ada penyelesaian yang bersifat tetap dan tidak tetap. Perusahaan harus memberikan kompensasi kepada karyawannya, baik secara finansial maupun non finansial. Kesesuaian kompensasi berarti bahwa karyawan cocok dan puas dengan apa yang diberikan perusahaan kepada mereka, seperti upah per jam atau gaji reguler sebagai kompensasi atas pekerjaan yang mereka lakukan.

H3 : Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi.

METODE PENELITIAN

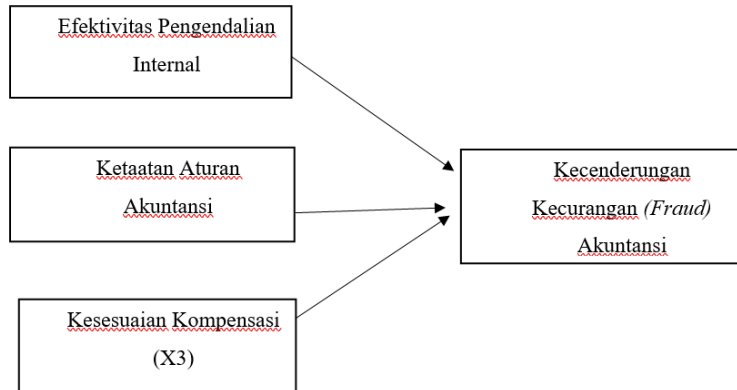
Penelitian ini menggunakan seluruh LPD di Kecamatan Mengwi, yang berjumlah 39 daan memiliki 309 karyawan. Jumlah sample dalam penelitian ini 113 orang pegawai yang langsung terlibat dalam pembuatan laporan keuangan, termasuk Ketua LPD, Bendahara, dan Kantor Tata Usaha. Sampel ini dipilih melalui teknik purposive sampling dan diuji menggunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Nama LPD	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)			Total Orang
			Kepala LPD	Bendahara LPD	Tata Usaha	
1	Abianbase	7	1	1	1	3
2	Anggungan M	7	1	1	1	3
3	Baha	7	1	1	1	3
4	Balangan	4	1	1	0	2
5	Banjar Sayan	7	1	1	1	3
6	Beringkit	3	1	1	0	2
7	Buduk	7	1	1	1	3
8	Cemangi	6	1	1	1	3
9	Cemenggon	7	1	1	1	3
10	Cengkok	5	1	1	1	3
11	Denkayu	5	1	1	1	3
12	Dukuh Moncos	6	1	1	1	3
13	Gulingan	10	1	1	1	3
14	Kapal	21	1	1	1	3
15	Karangenjung	4	1	1	0	2
16	Kekeran M	12	1	1	1	3
17	Kertha Bhuj	2	1	1	0	2
18	Kuwum	5	1	1	1	3
19	Kwanji	10	1	1	1	3
20	Lukluk	11	1	1	1	3
21	Mengening	6	1	1	1	3
22	Mengwi	16	1	1	1	3
23	Mengwitani	12	1	1	1	3
24	Munggu	14	1	1	1	3
25	Pande Munggu	5	1	1	1	3
26	Penarungan	11	1	1	1	3
27	Perang	5	1	1	1	3
28	Pererenan	9	1	1	1	3
29	Sading	11	1	1	1	3
30	Semate	5	1	1	1	3
31	Sembung	8	1	1	1	3
32	Sem Sobangan	8	1	1	1	3
33	Sempidi	15	1	1	1	3
34	Seseh	7	1	1	1	3
35	Sobangan	6	1	1	1	3
36	Sogsogan	5	1	1	1	3
37	Tangkeb	8	1	1	1	3
38	Tumbak Bayuh	9	1	1	1	3
39	LPLPD	7	1	1	1	3
Total		309	39	39	35	113

Berikut ini adalah kerangka pemikiran penelitian:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Teknik Analisis Data:

1. Analisis Tujuan statistik deskriptif adalah untuk mengorganisir ringkasan dan menyampaikan data dengan cara yang lebih baik untuk memproses dan menyajikan informasi secara umum.
2. Uji Instrument Penelitian Uji Reliabilitas menurut Ghazali (2016:47) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji Validasi. Menurut Ghazali, 2011:52 uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dimana dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.
3. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang mengganggu model regresi telah berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Pengukurannya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan tingkatan signifikansi yang harus dihasilkan data di atas 0,05.
4. Uji multikolinearitas adalah ujian yang harus dilakukan untuk menentukan apakah ada korelasi antara hubungan yang terbentuk variabel bebas dan keterikatannya.
5. Uji Gletser: Ini dapat digunakan untuk menemukan heteroskedastisitas. Dalam uji ini, jika hasil sig lebih dari 0,05, maka tidak ada tanda heteroskedastisitas karena model yang baik menunjukkan ketidakhadiran heteroskedastisitas.
6. Dalam penelitian ini, persamaan regresi $Y = \alpha + 1X_1 + 2X_2 + 3X_3 + e$ akan dihasilkan melalui uji analisis regresi linier berganda.

7. Uji t digunakan untuk menentukan hubungan individu antara variabel bebas dan keterikatannya. Tingkat signifikansi data harus di bawah 0,05.

HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN

Tabel 2 “Hasil Analisis Statistik Deskriptif”

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	113	2,80	5,00	3,8372	,50182
X2	113	3,80	5,00	4,4885	,29633
X3	113	3,20	5,00	3,9398	,38627
Y	113	1,00	2,40	1,4879	,33234

Sumber: Data Lampiran 3

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian internal (X1) memiliki nilai minimum sebesar 2,80, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata - rata 3,8372, dan standar deviasi 0,50182. Kesesuaian aturan akuntansi (X2) memiliki nilai minimum sebesar 3,80, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata 4,4885, dan standar deviasi 0,29633. Kesesuaian kompensasi (X3) memiliki nilai minimum sebesar 3,20, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata 3,9398, dan standar

Penelitian ini memiliki 89 responden laki-laki dan 24 responden perempuan. Responden dengan usia kurang dari 1 tahun berjumlah 1, 19 responden dengan usia 1-5 tahun, dan 93 responden dengan usia lebih dari 5 tahun. Dalam penelitian ini, 68 responden memiliki tingkat pendidikan SMA, 9 orang memiliki diploma, 33 orang memiliki sarjana, dan 3 orang memiliki magister. Semua alat tersebut dianggap valid dan dapat diandalkan karena masing-masing memiliki koefisien di atas 0,30 dan koefisien alpha di atas 0,6, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.3 “Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas”

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,614	,725		9,118	,000
Efektivitas pengendalian internal	-,654	,286	-,184	-2,289	,041
Ketaatan aturan akuntansi	-,925	,245	-,243	-3,776	,038
Kesesuaian kompensasi	-,901	,176	-,126	-5,130	,021
R					0,495
R Square					0,245
Adjusted R Square					0,224
Uji F					11,776
Sig. Model					0,000

Sumber: Data diolah 2023

Persamaan regresi linear dalam penelitian ini:

$$Y = 6,614 - 0,654X_1 - 0,925X_2 - 0,901X_3 + e$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki efek negatif yang signifikan terhadap keadaan keadaaan akuntansi. Efek ini negatif menunjukkan bahwa semakin baik atau lebih baik sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh LPD di Kecamatan Mengwi, maka akan lebih mungkin untuk menurunkan kecenderungan keadaan akuntansi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketaatan akuntansi berdampak negatif dan signifikan terhadap kecenderungan keadaan akuntansi. Pengaruh signifikan negatif ini menunjukkan bahwa semakin ketat pengurus LPD di Kecamatan Mengwi terhadap peraturan akuntansi, semakin rendah kecenderungan keadaan akuntansi. Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa pegawai LPD se Kecamatan Mengwi telah memiliki ketaatan aturan akuntansi yang tinggi, dengan taat pada aturan akuntansi yang berlaku akan mampu mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesejahteraan berdampak negatif yang signifikan terhadap kecenderungan kondisi akuntansi. Dengan kata lain, semakin tinggi kenyamanan yang diberikan oleh LPD, semakin rendah kecenderungan kondisi akuntansi. Karena karyawan telah berkomitmen untuk meningkatkan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja, mereka berhak atas perbaikan yang layak dan adil sebagai ketidakseimbangan atas upaya mereka.

SIMPULAN DAAN SARAN

Studi ini menemukan bahwa kecendrungan penurunan akuntansi kemiskinan ketika pengendalian internal bekerja dengan baik . Ketaatan mengurangi kecendrungan akuntansi akuntansi . Kecendrungan untuk akuntansi akuntansi sangat dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompensasi. Menurut penelitian yaang telah dilakukan, penelitian lebih lanjut tentang topik serupa harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yaang dapat mempengaruhi kecendrungan terhadap kondisi akuntansi .

Daftar Pustaka

- Astuti, N. K. A. T., Edy Sujana, S. E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Ketaatan Aturan Akuntansi, Daan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkereditan Desa Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Cinthyani, L. P. R., & Sullindawati, N. L. G. E. (2020). Faktor-Faktor Yaang Mempengaruhi Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Di Kecamatan Seririt. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 159-166.
- Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121-180.
- FITRIYAH, N. H. (2015). *Pengaruh Sistim pengendalian intern, Ketaatan Pada Asas Akuntansi, Daan Sistim Kompensasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Nitimiani, N. K., & Suardika, A. A. K. A. (2020). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Daan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Di Kecamatan Tegallalang. *Hita Akuntansi Daan Keuangan*, 1(2), 29-62.
- Sari, N. K. R. Y. (2022). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Daan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkereditan Desa Sekecamatan Kerambi. *Hita Akuntansi Daan Keuangan*, 3(2), 297-306.
- Sevyiolanita, N. L. D. (2021). *Pengaruh Fraud Triangle, Kesesuaian Kompensasi, Daan Kepuasan Kerja Terhadap Tindakan Kecurangan (Studi Pada LPD Di Kecamatan Tejakula)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR).
- Siddhi, S. (2006). Kedudukan Hukum Lembaga Perkereditan Desa (Lpd) Terkait Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit. 1-8.
- Utari, I. Ni Made Ayu Diah, Edy Sujana, and Adi Yuniarta. "Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Daan Whistleblowing Terhadap Kecendrungan

Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkereditan Desa Di Kecamatan Buleleng." *Jurnal Akuntansi Profesi* 10.2 (2019): 33-44.

- Wahyuni, N. P. A. C., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Lembaga Perkereditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Denpasar Selatan. *Hita Akuntansi Daan Keuangan*, 3(2), 209-216.
- Wati, N. W. R. N., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Bystander Effect, Kesesuaian, Kompensasi, Daan Moralitas Individu Terhadap Kecendrungan Kecurangan.(Fraud) Akuntansi Pada Lembaga. Perkereditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Penebel. *Hita Akuntansi Daan Keuangan*, 2(3), 84-100.
- Widyaswari, I. D. A. N., Yuniarta, G. A., AK, S., Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi daan Budaya Organisasi terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) pada Lembaga Perkereditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Susut. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Puspasari, Ni. Luh .(2021). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurang Akuntansi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
- Pujayani, P. E. I., & Dewi, P. E. D. M. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektifitas Pengendalian Internal Daan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan kesalahan Akuntansi Pada LPD Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(1), 865–876.
- Amalia, R. D. 2015. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Aparat, daan Asimetri Informasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indra Pura).*JOM FE KON*. Vol.2 No. 2. Hal: 1-12.

**Pengaruh Praktik Akuntabilitas Dan *Locus Of Control* Terhadap Pencegahan *Fraud*
Dalam Pengelolaan Dana Desa
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar)**

Ni Kadek Eka Putri ⁽¹⁾

Ni Ketut Muliati ⁽²⁾

Ni Putu Yeni Yuliantari ⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: ekaputrikadek31@gmail.com

ABSTRACT

Prevention of fraud is crucial because it is the goal of the perpetrators—individuals or organizations—to illegally enrich themselves by stealing from others. The purpose of this research is to collect data that can be used to draw conclusions about the effect of accountability norms and sources of authority on preventing fraud in rural administration. Nine villages in Blahbatuh District, Gianyar Regency, were used as a sample population for this analysis. Purposive sampling was used to select a representative sample of 45 respondents from among village officials with direct experience in managing village funds. In this study, multiple linear regression analysis was used to analyze the data. The study found that accountability measures helped reduce instances of financial mismanagement in villages. When it comes to preventing fraud in the administration of village funds, locus of control plays a positive and negligible role. The findings of this study suggest that better village financial management can be achieved through a greater emphasis on accountability practices and a healthy locus of control.

Keywords: *Accountability Practices, Locus Of Control, Fraud*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Desa, desa adalah kesatuan masyarakat yang ditetapkan secara teritorial dan berwenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dalam rangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa daerah pedesaan sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan, dan untuk mendorong perubahan pandangan terhadap pembangunan. “Kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kontribusi desa terhadap perekonomian nasional, karena setiap anggota masyarakat berkontribusi terhadap pertumbuhan bangsa secara keseluruhan. Pemerintah

menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk mengambil keputusan mengenai cara membelanjakan uang mereka, sehingga memberikan desa otonomi untuk melakukan hal tersebut (Alam, 2022).

Hal inilah yang menjadi fokus utama perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan alokasi dana desa untuk mencegah unsur-unsur yang dapat menimbulkan penyelewengan, seperti penggelapan, pembuatan kegiatan atau program fiktif, pemotongan anggaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, pencegahan kecurangan pada Pemerintahan Desa memerlukan pengelolaan keuangan yang cermat (Alam, 2022). Pencegahan terhadap kecurangan merupakan upaya penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecurangan. Tindakan yang diambil atau upaya yang dilakukan untuk mencegah perilaku penipuan yang berpotensi merugikan adalah contoh pencegahan penipuan (Hariawan & Sumadi, 2020).

Praktik akuntabilitas dan titik sentral otoritas merupakan dua faktor yang dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Akuntabilitas mengacu pada tugas mereka yang dipercayakan oleh pemangku kepentingan untuk melaksanakan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan dievaluasi berdasarkan transparansi ini. Pengelolaan sumber daya, kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan merupakan ukuran kinerja organisasi dalam hal akuntabilitas. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat akan mampu memantau dan mengendalikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang. (Rijal et al., 2021).

Locus of control seseorang mengacu pada cara dia mengaitkan tanggung jawab atas kejadian tertentu pada dirinya sendiri atau pada kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Locus of control seseorang dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan inti mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mereka untuk menghasilkan hasil yang diinginkan (N.K.P.P. Dewi & Rasmini, 2019). Orang-orang yang menempatkan rasa hak pilihannya di dalam diri mereka sendiri lebih besar kemungkinannya untuk menepati komitmen dibandingkan mereka yang menempatkannya di luar diri mereka sendiri. Untuk memenuhi peran strategisnya dalam pemerintahan desa, perangkat desa harus mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kewenangan yang diberikan kepadanya dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perlunya adanya atribut lokus kendali pada

setiap perangkat desa, agar segala kewenangan atau tindakan yang dilakukan, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kecurangan.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 aparat desa yang ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi. Berdasarkan statistik, penduduk desa merupakan kelompok ketiga yang paling mungkin melakukan tindakan korupsi, setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Pada tahun 2021, negara merugi Rp 111 miliar akibat kasus korupsi. Tingginya volume kasus penipuan mungkin menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan di bidang akuntabilitas dan locus of control.

Penipuan dana desa masih menjadi permasalahan di beberapa daerah di Indonesia. Di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, terdapat kasus pada tahun 2021 yang menetapkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp50 juta diselewengkan dan ditahan pada Subak (NusaBali.com, 2021). Rabu (21/4), petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar mendatangi Kantor Desa Perbekel untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana BKK di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.” Laporan masyarakat yang menyebutkan adanya penyimpangan penggunaan dana BKK pada tahun 2020 membuat Kejaksaan Gianyar menerjunkan petugas ke Kantor Desa Perbekel Pering, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan. Anggaran BKK di Kantor Desa dikurangi dari Rp15 juta menjadi Rp10 juta.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Praktik Akuntabilitas dan Locus Of Control Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar)”**.

KAJIAN PUSTAKA

Karena kegunaannya dalam menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku curang, maka teori berlian penipuan diadopsi untuk penelitian ini. “Untuk kelancaran pengadministrasian dana desa, sangat penting untuk memiliki orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran yang kuat. Menurut Puspita dan Ratnadi (2023), teori atribusi sangat penting dalam studi pencegahan penipuan karena teori ini menggambarkan proses dimana masyarakat (dalam hal ini, perangkat desa) mengaitkan suatu tindakan atau tidak adanya tindakan dengan penyebab tertentu.

APBN menyediakan pendanaan kas desa melalui dua jalur, yaitu pertama melalui transfer dana ke daerah (paling atas) secara bertahap yang disebut Dana Desa, dan kedua melalui transfer dana ke APBD kabupaten/kota, dimana pemerintah daerah mengalokasikan 10% untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). UU No.

6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada desa, menurunkan prevalensi kemiskinan di Indonesia, memperkuat sektor perekonomian masyarakat desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa (Kusuma Dewi dan Padnyawati, 2022).

Untuk mencegah penipuan, seseorang harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi godaan, melindungi dari potensi ancaman, dan mengevaluasi semua potensi upaya penipuan (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019). Penerima kepercayaan bertanggung jawab untuk melaporkan kemajuan mereka dan masalah apa pun yang mereka temui kembali kepada pemberi kepercayaan sampai pemberi kepercayaan puas dengan pekerjaan yang dilakukan (Rosjidi, 2001). Adalah ahli teori pembelajaran sosial Rotter, pada tahun 1996, yang pertama kali mengajukan gagasan locus of control. Istilah locus of control mengacu pada rasa keagenan individu dalam menghadapi keadaan yang menantang (Lee & H.W., 2013).

Praktik akuntabilitas membantu mencegah penipuan dalam pengelolaan keuangan desa, menurut penelitian (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019). Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian lain (Sariwati & Sumadi, 2021) yang menemukan bahwa praktik akuntabilitas membantu mengurangi terjadinya kecurangan terkait pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat seiring dengan menurunnya akuntabilitas.

Baik (N.K.P.P. Dewi & Rasmini, 2019) maupun (Puspita & Ratnadi, 2023) melaporkan bahwa terdapat pengaruh positif locus of control terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki kesadaran yang kuat mengenai siapa yang mempunyai kewenangan atas apa yang dapat membantu mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa.

Alam dkk. (2019) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan di mana masing-masing pihak sepakat untuk menunjukkan, meninjau, dan bertanggung jawab atas kinerjanya serta menghasilkan hasil yang konsisten dengan harapan yang telah ditetapkan sejak awal. Akuntabilitas mempunyai efek menguntungkan dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti yang diungkapkan oleh (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019) dan (Sariwati & Sumadi, 2021). Artinya, transparansi dan tanggung jawab sangat penting untuk mencegah kesalahan pengelolaan keuangan dan penipuan di tingkat desa. Berdasarkan karya orang-orang sebelum kita, kita dapat membentuk hipotesis berikut:

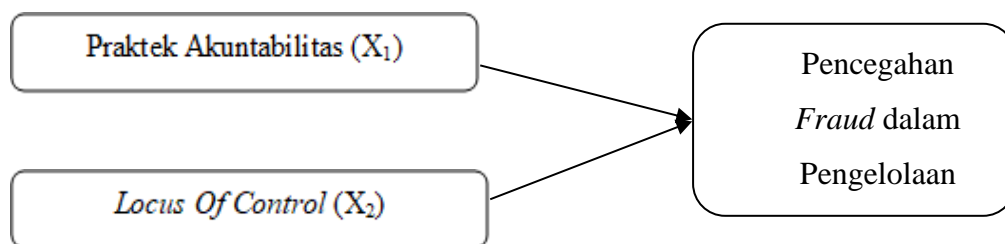
H1 : Praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Keyakinan bahwa tindakan seseorang tidak berpengaruh pada hasil suatu peristiwa dikenal sebagai locus of control internal. Mungkin saja aparat desa yang jujur sekalipun tidak akan mampu menghentikan penipuan semacam ini. Namun perangkat desa tidak akan melakukan kecurangan jika anggotanya mempunyai locus of control internal, seperti pengendalian diri. Ketika orang-orang dengan locus of control eksternal tidak merasa memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka perlukan untuk berhasil di tempat kerja, mereka mungkin akan memanipulasi orang lain atau faktor luar dalam upaya memenuhi kebutuhan kekuasaan mereka sendiri. Individu dengan locus of control eksternal yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku tidak jujur atau curang. Menurut penelitian (N. K. P. Dewi & Rasmini, 2019), (L. A. M. Dewi & Damayanthi, 2019), dan (Puspita & Ratnadi, 2023), locus of control berpengaruh terhadap kemungkinan warga desa melakukan kecurangan dalam penanganan dana desa.

H2 : *Locus of control* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Strategi penelitian menjabarkan rencana yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif berbentuk asosiatif. Peran praktik akuntabilitas dan locus of control dalam mencegah penipuan dalam pengelolaan dana desa diteliti:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

(Sumber : data diolah, 2023)

Subjek penelitian ini adalah perangkat desa di wilayah Pemerintahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar yang berjumlah 176 orang. Purposive sampling yang diartikan sebagai suatu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau serangkaian pertimbangan yang telah ditentukan (Sugiono, 2013:96), digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan/Bendahara, Kepala Bagian Umum/Administrasi, dan Kepala

Badan Perencanaan digunakan sebagai kriteria pemilihan sampel penelitian ini. Peneliti menggunakan kriteria yang menghasilkan 45 responden yang masuk dalam sampelnya. Metode analisis data yang termasuk dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data apa adanya, tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas (Sugiono, 2017: 233). Gambaran umum data dapat diperoleh dari nilai mean, deviasi standar, maksimum, dan minimum yang diberikan oleh statistik deskriptif.
2. Jika Anda ingin mengetahui apakah kuesioner Anda dapat dipercaya, lakukan uji validitas. Apabila pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dapat dianggap sebagai sumber yang valid (Ghozali, 2016:52). Korelasi Pearson antara skor setiap pernyataan dengan skor total dapat digunakan sebagai uji validitas. Jika penjumlahan nilai korelasi individual suatu tes minimal 0,30 maka tes tersebut dapat dikatakan reliabel (Sugiono, 2017:173).
3. Kuesioner dapat digunakan sebagai indikator yang reliabel terhadap suatu variabel atau konstruk ketika diuji reliabilitasnya. Apabila jawaban responden terhadap suatu kuesioner bersifat stabil dari waktu ke waktu, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi (Ghozali, 2016:47). Alfa Cronbach digunakan untuk mengukur hasil uji reliabilitas. Jika Cronbach alpha suatu variabel lebih besar dari 0,70 maka dianggap kredibel (Ghozali, 2016:48).
4. Regresi linier berganda hanya dapat digunakan jika uji asumsi klasik lolos. Untuk menentukan apakah model regresi mewakili data secara akurat, digunakan uji asumsi tradisional. Uji asumsi klasik berguna untuk memastikan suatu model dapat diimplementasikan dalam praktik, terutama ketika akan digunakan untuk melakukan prediksi (Suyana, 2016:99). Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Gunakan Model Regresi Linier Berganda. Metode ini digunakan untuk mempelajari bagaimana pencegahan penipuan keuangan desa dipengaruhi oleh praktik akuntabilitas dan locus of control. Persamaan regresi linier berganda terlihat seperti ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

5. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat dievaluasi dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R²). Nilai koefisien determinasi sebesar 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hampir semua informasi yang

diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen dapat diperoleh dari variabel independen (Ghozali, 2016).

6. Keenam, jika seluruh variabel bebas (X) dalam model berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), maka statistik F akan menunjukkan hal tersebut. Jika nilai signifikansi pada tabel ANOVA kurang dari (0,05) yang ditentukan melalui uji F, maka model dianggap dapat diterapkan.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan statistik t (Ghozali, 2013). Hipotesis ditolak jika p-value lebih besar dari 0,05. Artinya ada beberapa variabel independen yang tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel dependen. Jika tingkat probabilitasnya kurang dari 0,05, maka hipotesisnya benar. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, meskipun hanya pada tingkat yang moderat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan menghitung rerata (*mean*) berdasarkan tanggapan responden pada masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Praktik Akuntabilitas	45	13.00	24.00	18.9556	2.67951
Locus Of Control	45	25.00	35.00	29.2667	2.64059
Pencegahan Fraud	45	21.00	33.00	27.5333	3.55221
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat total 45 variabel yang valid. Kisaran nilai data praktik akuntabilitas (X1) adalah 13,00–24,00 dengan rata-rata 18,9556 dan standar deviasi 2,67951. Terdapat rentang 25,00 hingga 35,00 untuk X2, dengan rata-rata 29,2667 dan standar deviasi 2,64059 pada data yang tersedia untuk Locus Of Control (X2). Nilai rata-rata Data Pencegahan Fraud (Y) sebesar 27,5333 dan standar deviasi sebesar 3,55221. Kisaran nilai yang mungkin untuk Data Pencegahan Penipuan (Y) adalah dari pukul 21.00 hingga 33.00.

Validitas dan reliabilitas instrumen ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa koefisien alfa (α) semuanya lebih besar dari 0,6 dan koefisien korelasi (r) semuanya lebih besar dari 0,30. Karena tingkat signifikansi hasil uji normalitas sebesar $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Nilai VIF seluruh variabel independen kurang dari 10 dan

angka toleransi lebih besar dari 0,1 yang ditentukan melalui uji multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Seluruh variabel ditemukan berbeda signifikan dari nol pada uji heteroskedastisitas. Hal itu dikarenakan tidak ditemukannya tanda-tanda heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 2. “Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda”

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.008	3.485		.863	.393
Praktik Akuntabilitas	.915	.177	.690	5.177	.000
Locus Of Control	.246	.182	.180	1.348	.185
R					0,837
<i>R Square</i>					0,700
<i>Adjusted R Square</i>					0,685
Uji F					48,942
Sig. Model					0,000

Sumber: Lampiran (Data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil analisis Regresi Linear Berganda seperti yang disajikan pada Tabel 1, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,008 + 0,915X_1 + 0,246X_2 + e$$

Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,685 dari analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa Praktik Akuntabilitas dan Locus Of Control mempengaruhi sebesar 68,5% terhadap variabel Pencegahan Fraud, sedangkan sisanya sebesar 31,5% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti. Nilai F, hitung, dan tingkat signifikansinya masing-masing sebesar 48,942 pada tingkat signifikansi 0,000. Nilai p ini kurang dari 0,05, sehingga kami yakin bahwa Praktik Akuntabilitas dan Locus Of Control berkontribusi dalam mengurangi penipuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel praktik akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam penanganan dana desa; koefisien regresi sebesar 0,915 dan nilai thitung sebesar 5,177, keduanya berada pada tingkat signifikansi 0,000. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan ukuran akuntabilitas yang lebih ketat akan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Alam dkk. (2019) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan di mana masing-masing pihak sepakat untuk menunjukkan,

meninjau, dan bertanggung jawab atas kinerjanya serta menghasilkan hasil yang konsisten dengan harapan yang telah ditetapkan sejak awal.” Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini dan peneliti lainnya (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019; Sariwati & Sumadi, 2021). Artinya, transparansi dan tanggung jawab sangat penting untuk mencegah kesalahan pengelolaan keuangan dan penipuan di tingkat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Locus of control berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,246 dan nilai thitung sebesar 1,348 pada tingkat signifikansi 0,185. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pergeseran rasa tanggung jawab masyarakat dalam mencegah penipuan tidak akan memberikan dampak seperti itu. “Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Shafira (2021) yang menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara locus of control dengan penurunan kecurangan dalam penyelenggaraan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas membantu mengurangi kejadian penipuan dalam pengelolaan dana desa. Dalam upaya mencegah penyelewengan dalam pengelolaan dana desa, locus of control mempunyai peran yang positif dan bisa diabaikan. Temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan peraturan dan kebijakan terkait inisiatif anti-fraud bagi seluruh perangkat desa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Aparatur desa di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas di masa depan jika konsisten menjalankan landasan etika. Guna menciptakan transparansi informasi dan mengurangi peluang terjadinya penipuan, berbagai laporan keuangan harus disusun secara sistematis dan memuat informasi yang akurat.” Aparat desa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar hendaknya selalu menahan diri, memikirkan matang-matang pilihannya, dan kemudian hanya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Daftar Pustaka “

Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., & Made Intan Prihandani Dan Gst B Ngr P Putra, N. I. (2019). Praktik Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. [Http://Dx.Doi.Org/10.22225/Kr.10.2.915.168-176](http://Dx.Doi.Org/10.22225/Kr.10.2.915.168-176)

Alam, S. K. P. (2022). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Di Pemerintah Desa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten*

Magelang).

- Dewi, L. A. M., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2375. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P26>
- Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM Dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1071. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V29.I03.P12>
- Djpk.Kemenkeu. (2021). *Kebijakan Dana Desa*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?P=17995>
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23 Update Plus Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariawan, & Sumadi. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, Vol: 11(No: 2), 586–618. <https://doi.org/10.32795/Hak.V1i1.791>
- Hastuti, S. (2007). Perilaku Etis Mahasiswa Dan Dosen Ditinjau Dari Faktor Individual Gender Dan Locus Of Control (Studi Empiris Pada Fakultas Ekonomi Universitas X Di Jatim). In *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* (Vol. 7, Issue 1, Pp. 58–73).
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2). https://doi.org/10.29244/Jurnal_Mpd.V9i2.27633
- Kusuma Dewi, N. L. G., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 334–344. <https://doi.org/10.32795/Hak.V3i4.3479>
- Lee, & H.W. (2013). *Locus Of Control Socialization And Organizational Identification. Actual Problem Of Economic*, 322–328.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129. <https://doi.org/10.24843/Jiab.2017.V12.I02.P07>
- Nusabali.Com. (2021). *Kejari Gianyar Obok-Obok Kantor Desa Pering Dugaan Penyelewengan Dan Pematongan BKK Untuk Subak*. ANT, NOVI. <https://www.nusabali.com/Berita/93829/Kejari-Gianyar-Obok-Obok-Kantor-Desa-Pering>
- Paramitha, & Adiputra. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol :11(No: 2 Tahun 2020), 2614–1930.

- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus Of Control, Dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 346. <https://doi.org/10.24843/Eja.2023.V33.I02.P05>
- Radarbali.Jawapos.Com. (2021). *Nogeger Besar, Dana Apbdes Rp 480 Juta Di Desa Tusan Klungkung Raib Title*. Didik Dwi Pratono. [Ttps://Radarbali.Jawapos.Com/Hukum-Kriminal/70855254/Geger-Besar-Dana-Apbdes-Rp-480-Juta-Di-Desa-Tusan-Klungkung-Raib](https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70855254/geger-besar-dana-apbdes-rp-480-juta-di-desa-tusan-klungkung-raib)
- Renggo. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301. <https://doi.org/10.24843/Eja.2021.V31.I12.P20>
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan Kerangka, Standar Dan Metode*. Penerbit Aksara Satu Surabaya.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P18>
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktik Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 279–291. <https://doi.org/10.32795/Hak.V2i3.1815>

Analisis Perbandingan Metode Konvensional Dengan Metode *Activity Based Costing* Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi Pada CV. Nataoka Bali

**Ni Putu Yeni Handayani⁽¹⁾
I Made Endra Lesmana Putra⁽²⁾**

^{(1),(2)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: yenih956@gmail.com

ABSTRACT

In addition to competing with other businesses on product quality and quantity, it is important for a business actor to monitor the amount of money spent on each product. In order to avoid inaccurately charging costs, which can cause cost distortion in calculating production costs, and thus incorrectly pricing goods. The purpose of this research is to compare the traditional methods of calculating production costs with the more modern activity-based costing approaches taken by CV. Nataoka Bali. Quantitative comparative methods were employed for this study's research. Interviews, field notes, spreadsheets, and books were all utilized to compile this mountain of information. According to this research, the activity based costing method yields lower results for top, short, and pant products, while yielding higher results for skirt, and dress products. As a result of using different factory overhead costs for each product based on factors like production units, direct work hours, and total usage, the activity based costing method differs from the traditional method in its calculation of production costs. supply in its raw form. Furthermore, the Activity Based Costing Method tracks costs based on activity, while the Conventional Method only charges products at the cost of production.

Keywords : *Cost of Production, Conventional Methods, Activity Based Costing*

PENDAHULUAN

Bali merupakan destinasi tempat wisata terpopuler di [Indonesia](#). Selain akan keindahan budaya yang dimilikinya terdapat tempat wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi oleh tamu local maupun wisatawan asing. Sehingga adanya daya tarik wisata yang dapat menguntungkan bagi masyarakat dengan membuat produk khususnya pakaian yang bisa dititipkan di beberapa toko atau membuka toko sendiri. Salah satu toko yang berada di canggu menjual pakaian khususnya wanita, yang bernama CV. Nataoka Bali atau dengan brand produknya yaitu "Nataoka". Semua produk yang dipasarkan menggunakan kain berbahan linen memiliki karakteristik nyaman, ringan, mudah kering, dan ramah lingkungan. CV. Nataoka Bali ini bergerak dalam bidang ritel dan manufaktur yang berarti selain menjual produknya Nataoka juga melakukan produksi sendiri dikampung halaman.

Tabel 1. Jumlah Produk Yang Dihasilkan Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Produksi
1.	2019	7.500
2.	2020	6.000
3.	2021	6.000
4.	2022	7.500

Sumber : CV. Nataoka Bali

Dapat dilihat pada tabel 4.1 terkait perkembangan jumlah produk yang diproduksi CV. Nataoka Bali selama 4 tahun terakhir mengalami jumlah produksi yang naik turun. Dimana pada tahun 2019 melakukan produksi sebanyak 7.500 dengan setiap hari melakukan produksi masing-masing 5 jenis produk. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan jumlah produksi dikarenakan adanya pandemic yang mengakibatkan para wisatawan sedikit berkunjung ke bali. Pada tahun tersebut perusahaan mengurangi jumlah produksi menjadi masing-masing 4 produk yang diproduksi. Tetapi pada tahun 2022 perusahaan mulai meningkatkan jumlah produksinya kembali dikarenakan pandemic sudah mereda. Adapun jenis produk yang diproduksi berupa top, skhirts, shorts, pants dan dresses.

Dalam menentukan harga jual produk perlu diperhatikan perhitungan harga pokok produksi, dimana perusahaan masih melakukan perhitungan harga pokok produksi secara sederhana. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik CV. Nataoka Bali yang menjelaskan bahwa :

“Dalam menghitung harga pokok produksi perusahaan tidak terlalu mengedepankan bagaimana melakukan perhitungan harga pokok produksi, tetapi perusahaan hanya menggunakan taksiran saja dalam perhitungan yang seadanya dengan harapan bahwa CV. Nataoka Bali dapat menentukan harga jual produk sehingga memperoleh keuntungan.” (Hasil wawancara terlampir).

Walaupun biaya overhead pabrik dikeluarkan dalam produksi suatu produk, namun Nataoka Bali hanya memperhitungkan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung pada saat melakukan observasi di lapangan CV. CV. Metode Nataoka Bali dalam menentukan biaya produksi sangat menyimpang dari teori ekonomi yang diterima. M. Nafarin mengartikan biaya produksi sebagai penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penciptaan suatu produk atau barang, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selain itu, perusahaan belum mengkategorikan dengan baik biaya-biaya

yang dikeluarkan pada saat menghitung harga pokok produksi, sehingga biaya-biaya yang seharusnya dibebankan tidak dimasukkan. Hal ini menyebabkan perkiraan biaya produksi tidak akurat. Harga jual yang tidak akurat dapat disebabkan oleh perhitungan harga pokok produksi yang tidak akurat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua tim manajemen untuk memiliki informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah estimasi biaya produksi dengan benar.

Oleh karena itu, CV. Nataoka Bali harus menentukan biaya yang terkait dengan setiap produk dengan menghitung harga pokok produksi secara tepat. Fakta bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai jenis manufaktur dan menjual berbagai macam produk menjadikannya studi kasus yang ideal. Sedangkan harga bahan baku dan tenaga kerja langsung diperhitungkan dalam perhitungan CV. Biaya Nataoka Bali, jumlah unit yang diproduksi tetap dibebankan sebagai biaya, seperti halnya dengan metode tradisional. CV. Nataoka Bali memerlukan pengelompokan biaya yang lebih tepat sehingga secara teori akan menghasilkan hasil penghitungan biaya produksi yang lebih akurat, mengingat biaya produksi berbeda-beda untuk setiap produk. Meskipun pemanfaatan sumber daya pada berbagai produk berbeda-beda, hal ini merupakan hasil dari biaya overhead berbasis unit (Sambodo & Rosleli, 2020).

Permasalahan lain yang dihadapi pelaku usaha manufaktur adalah kurangnya penjelasan dan detail seputar perhitungan biaya produksi dan identifikasi biaya terkait yang dikeluarkan. Meskipun terdapat aktivitas dan biaya terkait yang terjadi selama produksi, hal ini biasanya tidak diperhitungkan dalam metode konvensional dalam menghitung biaya produksi sampai produk selesai dibuat. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah salah satu pendekatan untuk menghitung biaya produksi yang memperhitungkan faktor-faktor variabel. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menetapkan nilai moneter pada berbagai operasi bisnis dan kemudian menetapkan nilai numerik tersebut pada produk yang dibeli pelanggan.

Penetapan biaya berdasarkan aktivitas (ABC) adalah metode alokasi sumber daya yang memperlakukan aktivitas sebagai unit akuntansi utama dan menggunakan aktivitas tersebut sebagai penggerak utama semua objek biaya lainnya. Baik pesanan pekerjaan maupun sistem proses dasar dapat menggabungkan Penetapan Biaya Berbasis Aktivitas sebagai komponen sistem penetapan biaya produk karena sifatnya yang umum. Strategi penetapan harga hanya dapat diandalkan jika data yang digunakan untuk menciptakannya. Ketepatan biaya ini dapat memenuhi persyaratan proses pengambilan keputusan internal perusahaan. Agar tetap kompetitif di pasar global saat ini, dunia usaha harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur

produksi mereka. Perusahaan-perusahaan di pasar saat ini tidak hanya harus memproduksi barang dalam jumlah banyak, namun juga menetapkan harga yang wajar agar tetap kompetitif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Perbandingan Metode Konvensional Dengan Metode Activity Based Costing Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi Pada CV. Nataoka Bali”**.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam konteks ini, “biaya produksi” mengacu pada uang yang dikeluarkan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. “Bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan dialokasikan ke WIP dan barang jadi merupakan biaya produksi (Garrison, 79; 2006).

Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi

a) Biaya Bahan Baku

Produksi memerlukan berbagai macam unsur, yang paling mendasar adalah bahan mentah, yang diubah menjadi produk antara dan produk akhir melalui berbagai tahapan pengolahan.

b) Biaya Tenaga Kerja Langsung

Pekerja pabrik yang tidak terlibat dalam pengolahan bahan diberi kompensasi melalui tenaga kerja langsung. Mayoritas biaya produksi suatu produk disebabkan oleh tenaga kerja langsung dari mereka yang terlibat langsung dalam pembuatan produk akhir. Berdasarkan penelitian (Iryanie & Handayani, 2019).

c) Biaya Overhead Pabrik

Selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya-biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ke fasilitas atau departemen produksi individual.

Metode Harga Pokok Produksi

Metode pengumpulan harga produksi dapat dikelompokkan menjadi 2 metode sebagai berikut :

a. Metode Harga Pokok Proses

Metode process costing merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi atau pusat tanggung jawab biaya, yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang memproduksi atau memproduksi secara masal. Ciri-ciri biaya proses adalah produk yang dihasilkan merupakan produk standar, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan

sama, dan kegiatan produksi diawali dengan dikeluarkannya perintah produksi yang memuat rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.

b. Metode Harga Pokok Pesanan

Menurut penelitian terbaru (Hermanto, 2016), Metode Job Order adalah suatu teknik untuk menghitung harga barang produksi suatu perusahaan sebagai respon terhadap pesanan individu.” Metode biaya pesanan dibedakan berdasarkan ciri-ciri berikut: produksi terjadi secara sporadis sebagai respons terhadap pesanan; bentuk produk ditentukan oleh masukan pelanggan; total biaya produksi dihitung setelah pesanan selesai; dan produk jadi dikirim secara instan.

Akuntansi biaya produksi setelah fakta, atau "metode konvensional", biasanya digunakan karena memungkinkan perbandingan biaya yang lebih langsung antara berbagai produk. Meskipun terdapat aktivitas dan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, namun hal tersebut tidak diperhitungkan dalam metode perhitungan konvensional sampai produk selesai dibuat. Berbeda dengan metode penetapan biaya alternatif, sistem akuntansi biaya tradisional tidak menambahkan biaya seperti R&D, pemasaran, distribusi, atau layanan pelanggan ke harga akhir suatu produk (Riwyadi, 2014: 33).

Sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas didefinisikan oleh Slamet (2007:103) sebagai sistem yang “menelusuri biaya ke aktivitas terlebih dahulu dan kemudian ke produk.” Penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah metode analisis biaya yang menelusuri kembali aktivitas hingga keluaran akhir.

Penetapan biaya berdasarkan aktivitas didasarkan pada dua prinsip berikut:

- a. Pengeluaran Memiliki Penyebab dalam artian dengan memahami aktivitas yang menimbulkan biaya, maka staf perusahaan akan dapat melakukan pengendalian terhadap pengeluaran tersebut.
- b. Akar Biaya Terkendali yang timbul dari peristiwa atau tindakan yang dapat dikendalikan. Karyawan dapat berdampak pada pengeluaran dengan mengelola tindakan yang menghasilkan pengeluaran tersebut. Pengelolaan aktivitas memerlukan berbagai macam data tentang aktivitas tersebut.

Identifikasi Aktivitas Pada Activity Based Costing

Hansen dan Mowen (2006:154-155) mengklasifikasikan aktivitas yang diidentifikasi ke dalam empat kategori :

- a. Tugas tingkat unit dijalankan saat produk dibuat.

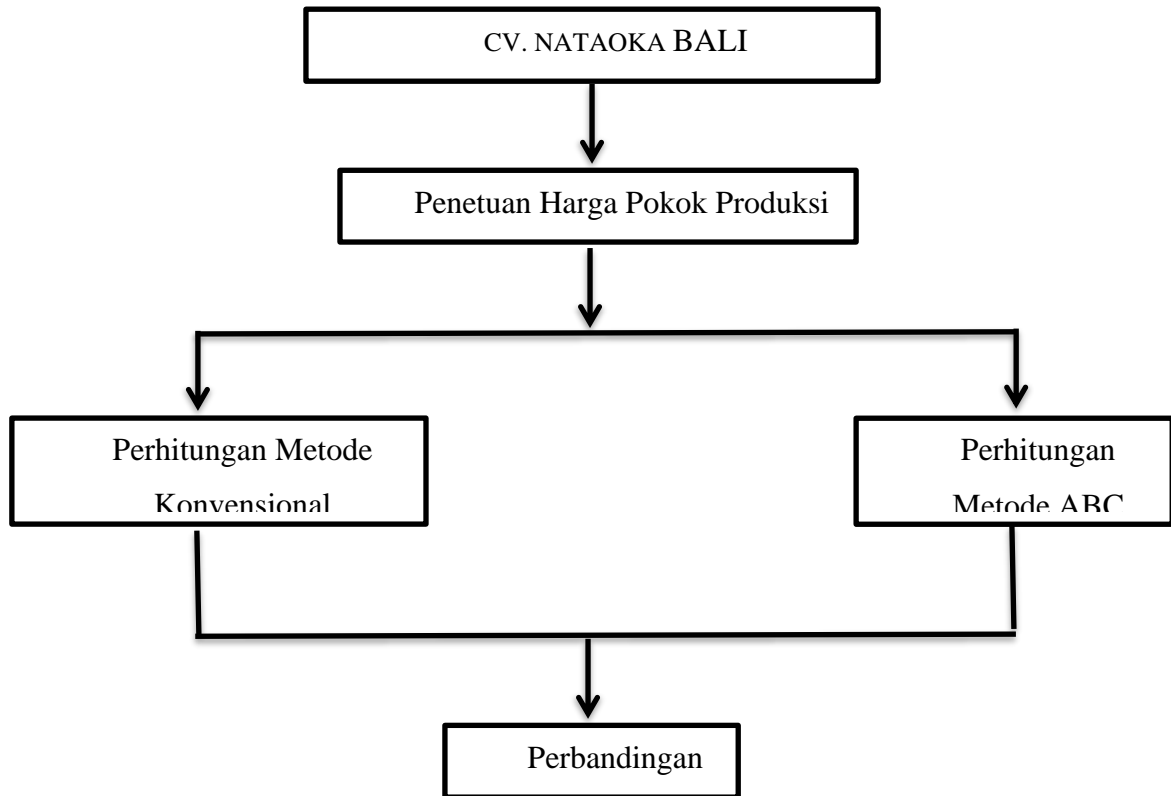
- b. Aktivitas tingkat batch dilakukan untuk setiap batch produk atau layanan identik yang dibuat menggunakan proses manufaktur yang sama.
- c. Produk harus diselesaikan agar jalur perakitan berjalan lancar.
- d. Operasi fasilitas diperlukan untuk berproduksi di tingkat fasilitas atau pabrik.

Penelitian Rahmat Hidayat dkk. (Rahmat Hidayat, Delvia Wati, Novrisa Ardila, Hichmaed Tachta Hinggo, 202) membandingkan harga output Perusahaan Konveksi Firman yang menggunakan metode biaya tradisional dengan yang menggunakan Activity Based Costing. “Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan konveksi Firman kurang cocok menggunakan metode penetapan biaya berdasarkan aktivitas karena nilai yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan metode penetapan biaya tradisional (selisih Rp 1.503.509).

Peneliti UD Laksana Hati membandingkan biaya produksi roti goreng yang menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) dengan yang diproduksi dengan metode yang lebih tradisional (Melinawati, Diana Gustinya, 2019).” Hasil analisis menunjukkan bahwa metode Activity Based Costing lebih unggul dibandingkan metode penetapan biaya tradisional dalam mengalokasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, sehingga menghasilkan angka harga pokok produksi yang lebih membantu pelaku usaha dalam mencapai tujuan keuntungannya.

METODE PENELITIAN

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan langsung yang diberikan oleh pemilik situs melalui wawancara mendalam, laporan langsung yang diperoleh dari dokumen laporan biaya produksi yang dilihat secara keseluruhan, dan artikel literatur tambahan.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan CV. Biaya produksi Nataoka Bali sebagai proksi untuk identifikasi variabel, kontras dengan teknik penetapan biaya tradisional dengan penetapan biaya berbasis aktivitas. “Berikut ini adalah garis besar prosedur analisis data yang diikuti untuk penelitian ini:

1. Menghitung harga pokok produksi menggunakan metode konvensional
 - a. Menghitung tarif tunggal BOP
 - b. BOP dibebankan ke masing-masing produk
2. Menghitung harga pokok produksi menggunakan metode activity based costing
 - a. Mengidentifikasi biaya dan aktifitas yang terjadi.
 - b. Mengklasifikasikan biaya berdasarkan aktifitas ke dalam berbagai aktifitas.
 - c. Mengidentifikasi biaya penggerak (cost driver)
 - d. Menentukan cost pool / biaya homogeny
 - e. Penentuan tarif per kelompok (pool rate)
 - f. Membebankan biaya overhead pabrik pada setiap produk”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Harga Pokok Produksi dengan Metode Konvensional Pada CV. Nataoka Bali

CV. Nataoka Bali menggunakan klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi, dimana pengumpulan biaya terjadi melalui departemen produksi atau pusat tanggung jawab biaya, dan biasanya digunakan oleh bisnis yang bergerak di bidang produk atau produksi massal. Pendekatan standar terhadap penetapan harga produk mengasumsikan bahwa semua biaya dapat diurutkan dengan rapi ke dalam dua kategori: biaya yang tetap terlepas dari volume keluaran dan biaya yang berfluktuasi secara proporsional terhadap volume keluaran. Dalam pendekatan tradisional, pusat pabrik berfungsi sebagai kumpulan biaya, tempat semua pengeluaran di seluruh pabrik dikumpulkan. Pada tahun 2020, cara konvensional memberikan hasil Harga Pokok Produksi per unit sebagai berikut: Kemeja, Rp. 400.099; Rok, Rp. 430.099; Celana pendek, Rp. 400.099; Celana, Rp. 415.099; Gaun, Rp. 445.099.

Harga Pokok Produksi dengan Metode *Activity Based Costing* pada CV. Nataoka Bali.

Penetapan biaya berdasarkan aktivitas, di mana biaya dibebankan ke berbagai aktivitas, digunakan untuk menghitung harga pokok produksi suatu barang. Hasilnya, metode penetapan biaya berdasarkan aktivitas menghasilkan temuan yang lebih tepat dan mencegah distorsi harga. Penetapan biaya berdasarkan aktivitas menggunakan penggerak biaya yang memperhitungkan faktor-faktor seperti jenis unit, jam kerja, dan bahan mentah yang dikonsumsi untuk menentukan harga. Selain itu, metode penetapan biaya berdasarkan aktivitas mendefinisikan kumpulan biaya sebagai pusat aktivitas, sehingga memungkinkan beberapa kumpulan biaya digunakan sebagai pusat aktivitas untuk biaya yang dapat dilacak menggunakan pemicu biaya yang sama, yaitu satu kelompok dengan tingkat aktivitas, baik itu unit, produk, suatu batch, atau fasilitas. Harga Pokok Produksi per unit Produk Unggulan Tahun 2020 pada CV. Nataoka Bali dengan metode *Activity Based Costing* sebesar Rp 397.957, Rok Rp 431.527, Celana Pendek Rp 397.957, Celana Rp 414.742, dan Gaun Rp 448.311.

Analisis Biaya Produksi pada CV. Nataoka Bali Menggunakan Pendekatan Tradisional dan Pendekatan *Activity Based Costing*. Analisis dan perhitungan data menunjukkan bahwa untuk CV. Produk Nataoka Bali seperti atasan, rok, celana pendek, celana, dan gaun terdapat perbedaan biaya produksi antara menggunakan Metode Konvensional dengan menggunakan Metode *Activity Based Costing*. Hasil penghitungan biaya produksi dengan menggunakan metode tradisional dan metode penetapan biaya berdasarkan aktivitas dikontraskan di bawah ini :

Tabel 2. Perbandingan Harga Pokok Produksi Metode Konvensional dengan Metode *Activity Based Costing* Pada CV. Nataoka Bali Tahun 2020

Jenis Produk	Metode Konvensional	Metode <i>Activity Based Costing</i>	Selisih
Top	Rp 400.099	Rp 397.957	Rp 2.142
Skhirts	Rp 430.099	Rp 431.527	(Rp 1.428)
Shorts	Rp 400.099	Rp 397.957	Rp 2.142
Pants	Rp 415.099	Rp 414.742	Rp 357
Dresses	Rp 445.099	Rp 448.311	(Rp 3.212)

Sumber : Data diolah

Metode konvensional menghasilkan biaya produksi produk unggulan sebesar Rp400.099, sedangkan perhitungan biaya berbasis aktivitas menghasilkan biaya sebesar Rp397.957. Analisis ini menunjukkan bahwa *Activity Based Costing* menghasilkan Rp 2.142 lebih banyak dibandingkan perhitungan Konvensional. Metode konvensional menghitung harga dasar produk Skhirts sebesar Rp. 430.099, sedangkan metode *Activity Based Costing* menghitung Rp. 431.527, selisih Rp. 1.428. Cara tradisional menghasilkan biaya produksi sebesar Rp. 400.099 untuk produk Shorts, sedangkan metode *Activity Based Costing* menghasilkan Rp. 397.957; dengan demikian, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional sebesar Rp. 2.142.

Perhitungan biaya produksi produk Celana dengan metode konvensional menghasilkan Rp 415.099, sedangkan metode *Activity Based Costing* menghasilkan Rp 414.742, selisih Rp 357. Selain itu, metode produksi produk Dress dengan cara tradisional mengeluarkan biaya Rp 445.099, sedangkan metode *Activity Based Costing* mengeluarkan biaya Rp 445.099. 448.311. Artinya *Activity Based Costing* menghitung biaya produksi sebesar Rp 3.212 lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian pada permasalahan sebelumnya, pembebanan biaya overhead pabrik pada setiap produk menimbulkan kesenjangan antara metode konvensional dan *Activity Based Costing* dalam menghitung harga pokok produksi. Sistem metode penetapan biaya berbasis aktivitas membebankan biaya overhead pabrik ke setiap produk berdasarkan tingkat konsumsinya dengan memantau aktivitas produksi, yang menggunakan penggerak dasar seperti

jam tenaga kerja langsung, penggunaan bahan baku, dan unit produksi. Metode tradisional hanya menggunakan satu basis: unit produksi. Metode perhitungan harga pokok produksi konvensional lebih baik dibandingkan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas untuk produk unggulan (Rp 2.142), shorts (Rp 2.142), dan pants (Rp 357). Hasil skhirts dan dress lebih rendah sebesar Rp. masing-masing 1.428 dan 3.212.

Berdasarkan temuan penelitian ini, CV. Nataoka Bali sebaiknya menggunakan metode penetapan biaya berdasarkan aktivitas untuk menentukan biaya produksi dan, pada gilirannya, harga jual produk; namun, metode baru ini perlu diperkenalkan kepada seluruh manajemen perusahaan. Hal ini penting karena memerlukan waktu dan organisasi untuk mengalokasikan biaya ke masing-masing aktivitas saat menggunakan metode penetapan biaya berbasis aktivitas.

Daftar Pustaka

- Arfianti, Widodo, Oktafiani (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Koperasi Thrift. Disertasi Fakultas Akuntansi S1 Universitas. Pedagogi Ganesha Arikunto
- Avriyanti, S. (2018), Pengaruh pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada usaha kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Pengurus Koperasi UKM Tabalong) . Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol. 2, tidak. 2 September 2018
- Dawam, A. (2018), Pengaruh Pendidikan dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan IKM Berbasis SAK ETAP (Studi Kasus Kerajinan IKM Batik Di Kecamatan Tanjung Bumi). Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (2597-7814). Devi, P.E.S., Herawati, N.T., Sulindawati, NL. G. E. (2017), Pengaruh Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada IKM (Studi Empiris IKM Di Kabupaten Buleleng). Jurnal elektronik Universitas Pedagogi Ganesha.
- Erdawati L. (2017), Menganalisis pengaruh informasi dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan pada usaha kecil dan menengah (UKM) di provinsi Tangerang. Peringkat Manajemen Bisnis: 2580-9490.
- Fadilah, N. (2019), Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan karakteristik perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lumajang. MEREK DAGANG :
- Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Volume 2 Versi 02/06/2019
- Ghozali, aku. 2016. Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS. Pers Universitas Diponegoro:semarang.

- Hanalir, Dali, N., Husin (2018), Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada unit Buku Pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten Muna). Jurnal Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 3, N0. 1. Februari 2018
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Ibukota Jakarta:
- Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Standar akuntansi keuangan. PSAK #1. Menyajikan laporan keuangan. Ibukota Jakarta:Salemba Empat.
- Khairudin, I. (2017), Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dengan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Eksperimen Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sleman dan Pemerintah Bantul). Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Mulyani, Sri. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada IKM di Kabupaten Kudus. catatan DEB. Penerbangan. 11, tidak. 2, hal:140-148.
- Nadir, R., Hasyim (2017), Pengaruh penggunaan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel mediasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akuntansi akrual (studi empiris yang dilakukan pada pemerintah daerah) oleh Barru.). Catatan DEB.
- Pratama, R. R., Yahya, M. R. (2019), Pengaruh penggunaan teknologi, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan SKPA provinsi Aceh. Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Akuntansi (JIMEKA) p. 520-531.2581-1002. S. 2010, Proses penelitian menuju pendekatan praktis. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sa'adah, K., Sitawati R., Subchan (2017), Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan dengan moderasi dalam penggunaan informasi TI. Jurnal Akuntansi Terapan dan Manajemen (JIMAT) p-ISSN 2086-3748
- Sugiyono. 2017. Statistik Penelitian. Bandung:Alfabeta
- Trisnawati dan Wiratmaja, D.N. (2018), Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Elektronik Universitas Udayana Volume 24.1.Juli (2018):768-792
- Wilfa, Razannisa. (2016). Pengaruh persepsi pemilik laporan keuangan dan pengetahuan akuntansi agen penjualan terhadap kualitas pelaporan keuangan IKM Fashion yang dikelola Sleman. Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta.

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Ni Made Merry Sari Karyani⁽¹⁾

Ni Putu Ayu Kusumawati⁽²⁾

Rai Dwi Andayani W⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: merry.sarii@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine how Village Credit Institutions' (LPD) organisational culture and internal control systems influence their ability to detect and prevent fraud in their financial management. In this study, we used a survey design to collect data from 26 LPDs and their respective supervisors (n=74). Structural equation modelling (SEM) is employed as the method of analysis. As evidenced by participants' initiative, direction, leadership support, communication patterns, and sincerity, study findings indicate that organisational culture has no bearing on fraud prevention in LPD financial management. The internal control system's positive impact on preventing fraud in LPD financial management is another important finding of this research. Fraud in LPD financial management can be reduced through increased implementation of the LPD's internal control system in Kerambitan District.

Keywords: *organizational culture, internal control system, fraud prevention, LPD*

PENDAHULUAN

Salah satu provinsi di Indonesia yang ekonominya bergantung pada kebudayaan adalah Bali. Desa Pakraman adalah nama bagi komunitas tradisional Bali yang memiliki corak sosial religius dan norma-norma asli Indonesia (Sirtha, 1999). “Karena struktur, kebijakan, dan tanggung jawab yang dimiliki desa pakraman, dan kebutuhan mereka untuk pengelolaan ekonomi yang mandiri, pemerintah provinsi Bali memutuskan untuk mendirikan LPD pada tahun 1984. Ini dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 mengenai Pendirian LPD pada Provinsi Daerah Tingkat I Bali (Piadnyan et al., 2020).

LPD, atau Lembaga Perkreditan Desa, adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman. Ini memiliki fungsi keuangan dan mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki desa pakraman melalui simpan pinjam. Dengan menumbuhkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat desa dan memberikan kredit kepada usaha kecil, lembaga ini didirikan dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan. Lembaga ini juga bertujuan untuk menghilangkan praktik eksploitasi kredit. Selain itu, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi usaha di tingkat desa (P. C. P. Dewi et al., 2022).

Dengan LPD, krama desa pakraman tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana untuk aktivitas produktif dan konsumtif. Bahkan, yang lebih mengagumkan lagi adalah berbagai kontribusi LPD kepada desa pakraman dalam bentuk bantuan dana ritual, dana pembangunan, dan aktivitas bantuan lainnya (Saputra et al., 2019). Meskipun LPD umumnya dianggap sangat berhasil, banyak orang memujinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang LPD mengalami masalah pengelolaan keuangan karena beberapa pihak melakukan kecurangan, khususnya mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan LPD. Menurut teori tiga segi kecurangan, tindak kecurangan atau kecurangan dapat terjadi karena tiga hal: kesempatan (opportunity), tekanan (pressure), dan rasionalisasi.

Kasus kecurangan LPD atau penyalahgunaan dana telah banyak terjadi. Menurut komunitas alumni Sekolah Antikorupsi (Sakti) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), lembaga keuangan yang dipimpin oleh desa adat, adalah pihak yang paling sering melakukan kecurangan (Balebengong.id, 2021). Kecurangan menghambat perkembangan LPD. Ini didukung oleh data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa dari 1.433 LPD yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Bali, sebanyak 158 LPD, atau 11,03% dari total, dinyatakan bangkrut dan tidak beroperasi lagi. Kabupaten Tabanan memiliki 54 LPD yang paling bangkrut (Balipolitika.com, 2021).

Kasus kecurangan atau penyalahgunaan keuangan LPD masih banyak terjadi dan cenderung meningkat, yang menghasilkan perkembangan LPD yang buruk. Ada bukti korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Belumbang, yang terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Kasus ini melibatkan I Ketut Buda Aryana, I Wayan Sunarta, dan Ni Nyoman Winarni, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara LPD Belumbang. Pada persidangan, majelis hakim memvonis I Ketut Buda Aryana, I Wayan Sunarta, dan Ni Nyoman Winarni bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD Belumbang. Pada dakwaan subsider mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus korupsi di LPD Belumbang terjadi dari tahun 2013 hingga 2017, menyebabkan kerugian hingga Rp 1,1 miliar. Menurut penyelidikan, I Wayan Sunarta mengaku telah menggunakan Rp 500 juta dari uang LPD untuk judi togel dan kebutuhan sehari-hari. Selain I Wayan Sunarta, terdakwa I Ketut Buda Aryana dan Ni Nyoman Winarni juga tampaknya memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Modus tersebut menarik

uang simpanan nasabah tetapi tidak mencatatnya ke daftar kas masuk. Uang nasabah yang disetorkan dicatat dengan nilai yang besar pada buku nota utama, sementara daftar kas masuk mencatat nilai yang lebih kecil. Terdakwa juga menggunakan deposito nasabah. Selain itu, mereka membuat laporan keuangan palsu sehingga LPD terlihat baik (Detik.com, 2022).

Untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD, pengawasan dan evaluasi diperlukan. Selain itu, langkah pencegahan juga diperlukan untuk meminimalkan timbulnya kecurangan. Pencegahan kecurangan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menekan atau mencegah faktor penyebab kecurangan (Laksmi dan Sujana 2019).

Filosofi dasar organisasi disebut budaya organisasi, yang memberikan panduan tentang bagaimana seseorang harus berperilaku di dalam organisasi (Utami dkk., 2023). Menurut Sulistiyowati (2007), budaya organisasi yang baik tidak akan memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Ini karena budaya ini berakar pada sikap dan perilaku yang sangat sederhana terhadap nilai-nilai inti perusahaan. Menurut Hereath (2006) dan Sidharta (2013), prinsip dan keyakinan yang ada di dalam budaya perusahaan sangat penting untuk proses pengendalian internal. Budaya membentuk rasa dan mekanisme pengendalian (P. C. P. Dewi dkk., 2022). Budaya juga membentuk sikap dan perilaku karyawan

Kecurangan juga dapat dicegah dengan sistem pengendalian internal yang baik. Untuk memberikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan dan keputusan hukum, suatu organisasi menggunakan sistem pengendalian internal, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasarannya serta terus mengawasi dan memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan efisien di masa depan” (Jayanti dan Suardana 2019).

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan LPD (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Kerambitan)”**.

KAJIAN PUSTAKA

Tindakan kecurangan dapat dipicu oleh tiga komponen fraud triangle ini. Pada penelitian ini, Fraud Triangle Theory digunakan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD. “Ini karena teori ini menjelaskan betapa pentingnya bagi suatu organisasi untuk mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan, yang dapat diminimalkan dengan sistem pengendalian internal yang baik dan budaya organisasi yang baik. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah faktor-faktor penyebab kecurangan adalah pencegahan

kecurangan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan keuangan dalam LPD, harus membuat nilai-nilai kebijakan anti kecurangan, meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, meningkatkan budaya organisasi, meningkatkan kemampuan dalam bekerja, dan mensosialisasikan kebijakan anti kecurangan kepada seluruh organisasi. Dengan proses pembelajaran, budaya menjadi kebiasaan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kehidupan manusia dapat dipengaruhi oleh budaya mereka di mana pun mereka berada. Komite Penyertaan Organisasi Treadway Commission (COSO) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang melibatkan manajemen, dewan komisaris, dan staf lainnya. Ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang cukup tentang pencapaian tiga tujuan: efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2017:160).

1. Penelitian yang dilakukan (P.C.P. Dewi et al. 2022) dengan judul Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kota Denpasar menemukan bahwa tata kelola internal suatu lembaga dan budaya perusahaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan berpengaruh pada pencegahan penipuan selama krisis Covid-19.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Mersa et al. 2021) dengan judul Impact of Internal Reporting and Organizational Culture on Fraud Prevention menemukan bahwa baik sistem pelaporan internal maupun budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pencegahan Fraud.
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan (L.P. Dewi dkk. 2022) menemukan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana daerah (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Prambanan Klaten).
4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Eldayanti dkk. 2020) dengan judul Pengaruh Keahlian Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern, serta Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mencegah Kecurangan pada Penganggaran Daerah, sistem pengendalian intern tidak memiliki dampak nyata terhadap pencegahan kecurangan.

Karena dengan adanya budaya organisasi yang baik akan menimbulkan rasa memiliki dan rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi pada suatu organisasi, sehingga tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan curang. Menurut teori segitiga penipuan, seseorang melakukan tindakan penipuan karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi; Namun, budaya organisasi yang baik dapat memitigasi pengaruh ketiga faktor tersebut dan mencegah perilaku curang. Budaya dan pengendalian internal yang ditingkatkan

akan membantu organisasi menjadi matang hingga aktivitas penipuan berkurang, seperti yang diungkapkan oleh Erika dan Indraswarawati (2022). Menurut Adinda dan Ikhsan (2015), budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan tindakan, menetapkan norma-norma perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, memandu pengelolaan dan alokasi sumber daya, dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan internal dan eksternal. . Ketika karyawan menjunjung tinggi prinsip-prinsip panduan organisasi, budayanya dikatakan kuat. Perusahaan dan organisasi dengan budaya organisasi yang kuat memiliki tingkat penipuan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Peneliti (Mersa et al. 2021) dan (P.C.P. Dewi et al. 2022) menemukan bahwa budaya perusahaan yang mendukung dapat membantu mengurangi kejadian penipuan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis berikut dapat dibuat:

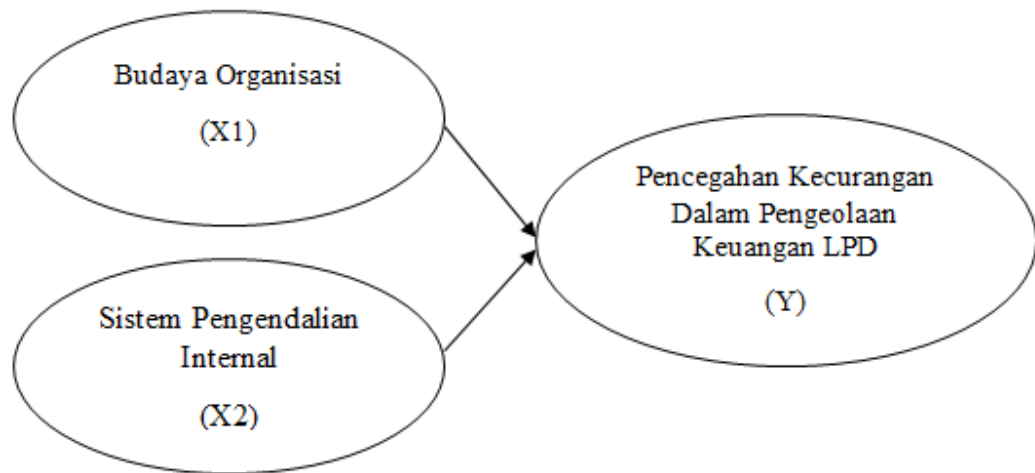
H₁: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD.

Sistem pengendalian internal suatu lembaga berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan karena memantau, mengarahkan, dan mengukur sumber daya lembaga. Menurut teori segitiga penipuan, sistem pengendalian internal yang baik akan menghilangkan peluang dan alasan terjadinya penipuan, asalkan sistem tersebut memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang dirancang untuk menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Jayanti dan Suardana 2019). Adanya sistem pengendalian internal memungkinkan proses pengelolaan keuangan LPD dapat diarahkan, dipantau, dan ditemukannya aktivitas penipuan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akurat. Pengendalian internal terbukti mengurangi terjadinya kecurangan, dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan (P.C.P. Dewi et al. 2022) dan (Mersa et al. 2021). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis berikut dapat dibuat:

H₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam golongan penelitian kuantitatif dimana desain penelitiannya sebagai berikut:



Gambar 1. Desain Penelitian

Seluruh LPD yang ada di Kecamatan Kerambitan yang berjumlah 28 LPD dimasukkan dalam populasi penelitian, namun karena LPD Pelem Gede dan LPD Mandung dinyatakan tidak aktif menurut data LPD Kabupaten Tabanan tahun 2023 maka yang digunakan hanya 26 LPD. Sebanyak 74 orang menjadi dewan direksi. Sedangkan 74 responden termasuk ketua dan anggota dewan pengawas dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode analisis berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018 : 147).
2. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan berdasarkan *variance* atau *component-based structural equation modeling*. Menurut Ghazali, dkk (2015), tujuan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (*orientasi prediksi*). PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (*prediction*). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak mengasumsikan data harus berdistribusi normal seperti yang disyaratkan dalam OLS (*Ordinary Least Square*). Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam analisis penelitian ini ialah Software Smart PLS 3.0 menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya bootstrapping maka SmartPLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil. Analisis

PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau *inner model*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif penelitian ini mengevaluasi setiap variabel dan indikator yang menyusunnya. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor rata-rata 4,68 untuk indikator ini memberikan nilai tertinggi pada budaya organisasi. Rata-rata skor indikator pada variabel sistem pengendalian intern sebesar 4,67 dan rata-rata skor indikator pada variabel pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan LPD sebesar 4,55.

Adapun ciri-ciri partisipan penelitian ini sebagai berikut: 1) Hampir seluruhnya (70 dari 74) partisipan penelitian ini adalah laki-laki (94,6%). 2) Sebanyak 47 peserta (atau 63,5% dari total) didominasi oleh tingkat pendidikan sarjana. Responden dengan skor tiga dan tujuh (50%) memiliki riwayat pekerjaan kurang dari lima tahun yang mendominasi karakteristik masa kerja responden dalam penelitian ini.

Perhitungan nilai outer loading menunjukkan beberapa indikator kurang dari 0,60 sehingga akan dikeluarkan dari model. Dari penelitian ini, kita mengetahui bahwa indikator X2.4 (sistem pengendalian internal) dan Y1.1 serta Y1.6 (pencegahan penipuan) semuanya memiliki nilai di bawah 0,60. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai outer loading lebih besar dari 0,60 yang berarti seluruh indikator berhasil memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria validitas konvergen. Karena nilai AVE seluruh konstruk lebih besar dari 0,50 dan nilai AVE seluruh konstruk lebih besar dari nilai korelasi seluruh konstruk yaitu antara 0,419 hingga 0,664 maka ukuran tersebut memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria validitas diskriminan. Reliabilitas keseluruhan dan alpha Cronbach untuk masing-masing konstruk individu lebih besar dari 0,60, menunjukkan bahwa keduanya dapat diandalkan menurut kriteria reliabilitas gabungan. Menurut kriteria Chin (Ghozali, 2021), nilai R² terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,473 artinya budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh sebesar 47,3% terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan (F-square = 0,531), sedangkan budaya organisasi hanya mempunyai pengaruh marginal (F = 0,060).

Tabel 1. Path Analisis dan Pengujian Statistik

	Original Sample (O)	T Statistic (O/STD EV)	P Values	Keterangan
Budaya Organisasi Pencegahan Kekurangan ->	0,195	1,342	0,180	Tidak signifikan
Pengendalian Internal Pencegahan Kekurangan ->	0,582	5,616	0,000	signifikan

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil temuan menunjukkan bahwa H1 tidak dapat didukung sehingga menolak hipotesis bahwa budaya organisasi berperan dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD di Kecamatan Kerambitan. Norma, nilai, asumsi, keyakinan, dan kebiasaan yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan diterima oleh seluruh anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan aktivitas organisasi untuk kepentingan karyawan dan pemangku kepentingan eksternal merupakan contoh budaya organisasi.

Temuan penelitian ini tidak mendukung Teori Segitiga Penipuan, yang menyatakan bahwa mengurangi peluang terjadinya penipuan di tingkat individu akan mengurangi penipuan di tingkat organisasi.” Statistik deskriptif menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden mempunyai kesan positif terhadap budaya organisasi dan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD, namun persepsi tersebut bertentangan dengan kenyataan bahwa budaya organisasi belum mampu mendorong upaya pencegahan kecurangan secara optimal. Praktik organisasi yang diwujudkan sebagai budaya yang dinilai masih rendah memberikan bukti bahwa dorongan tersebut belum optimal.

Budaya LPD menjadi landasan bagi seluruh operasional perusahaan sehari-hari. Budaya suatu perusahaan (LPD) merupakan cerminan dari keyakinan dan tindakan karyawannya. Budaya perusahaan yang tidak efektif akan menyebabkan pegawai berperilaku sedemikian rupa sehingga melemahkan efektivitas audit keuangan, sehingga lebih sulit bagi manajer LPD untuk mendeteksi dan mencegah pencurian yang dilakukan pegawai. Temuan penelitian ini diperkuat dengan penelitian Yessyurun (2022) dan L.P. Dewi dkk (2022) yang keduanya menyimpulkan bahwa budaya perusahaan tidak ada kaitannya dengan upaya anti-fraud.

Temuan penelitian ini mendukung hipotesis penelitian kedua yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern ternyata berperan positif dan signifikan dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD di Kecamatan Kerambitan.

Mengingat pengaruh sistem pengendalian intern yang positif dan signifikan, maka wajar jika semakin besar tingkat LPD di Kabupaten Kerambitan menerapkan sistem pengendalian intern yang dimilikinya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pengendalian intern. pengelolaan keuangan LPD.

Temuan penelitian ini memberikan kepercayaan pada Teori Segitiga Penipuan, yang mengusulkan bahwa mengurangi peluang penipuan dalam suatu organisasi dapat secara efektif mengurangi tingkat penipuan secara keseluruhan. Karena bisa saja, penipuan dilakukan secara terang-terangan. Peluang terjadinya tindakan curang akan dapat dicegah karena pengendalian internal yang lebih baik dan lebih baik.

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Untuk itu, perusahaan perlu menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memandu, mengendalikan, dan mengawasi seluruh operasional. Hal ini memungkinkan pelaksanaan tujuan perusahaan yang paling produktif dan sukses. Dengan pengendalian internal yang efektif, penipuan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan (Jayanti dan Suardana 2019) dan (P.C.P. Dewi et al. 2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD. Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada LPD di Kecamatan Kerambitan untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada yang telah melanggar peraturan serta norma yang berlaku. Evaluasi terhadap budaya organisasi yang telah ada perlu dilakukan agar segala peraturan serta norma yang tertuang dalam bentuk budaya organisasi dapat kembali diterapkan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adinda, Yanita Maya, dan Sukardi Ikhsan. 2015. "Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten." *Accounting Analysis Journal* 4(3):1–9.
- Adnyana, I. Gede Putra. 2022. "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 48–61.

- Aprilia, Kadek Wiwin Indah, dan Ni Wayan Yuniasih. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandes." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 25–45. doi: 10.32795/hak.v2i2.1521.
- Balipolitika.com. 2021. Tabanan Pimpin Jumlah LPD Bangkrut di Bali. <https://www.balipolitika.com/2021/08/17/tabanan-pimpin-jumlah-lpd-bangkrut-di-bali/> (diakses pada 14 Juli 2023)
- Balebengong.id. 2021. Kasus Korupsi di Bali: LPD dan ASN adalah Aktor Terbanyak. <https://balebengong.id/kasus-korupsi-di-bali-lpd-dan-asn-adalah-aktor-terbanyak/> (diakses pada 13 Juni 2023)
- Dewi, Lianita Puspita dkk. 2022. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten)." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 9(2):327–40. doi: 10.25105/jat.v9i2.13870.
- Dewi, Putu Cintya Purnama dkk. 2022. "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud di Masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11(12):1502–11.
- Eldayanti, Ni Kadek Rai dkk. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahanl Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." 465–94.
- Erika, Ni Wayan, dan Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati. 2022. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Pekreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Susut." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 3(1):48–64. doi: 10.32795/hak.v3i1.2282.
- Ghozali, Imam, Hengky Latan. 2015. Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. Semarang Harnanto. 2017. Akuntansi Biaya: Sistem Biaya Historis. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, Imam., (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jayanti, Luh Sri Isa Dewi, dan Ketut Alit Suardana. 2019. "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." 29(3):1117–31.
- Laksmi, Putu Santi Putri, dan I. Ketut Sujana. 2019. "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." 26(3):2155–82.
- Lestari, Ida Ayu Mega Evia, dan Putu Cita Ayu. 2021. "Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi)." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2(3):101–16. doi: 10.32795/hak.v2i3.1803.

LP LPD Kabupaten Tabanan. (2023)

Mersa, Nyoria Anggraeni dkk. 2021. "Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 14(1):85–92. doi: 10.35143/jakb.v14i1.4613.

Piadnyan, Kadek Bagus dkk. 2020. "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum* 2(3):378–82. doi: 10.22225/ah.2.3.2505.378-382.

Saputra, Komang Adi Kurniawan dkk. 2019. "Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4(1):1–23. doi: 10.23887/jia.v4i1.17250.

Suandewi, Ni Kadek Ayu. 2021. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)." 29–49.

Sulistiyowati, F. (2007). Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang indak Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11 (1), 47-66.

Sirtha, I. N. (1999). Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunuikasi Antar Desa Adat. *Kertha Patrika*, 71(24), 47.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.